

KEPENDUDUKAN INDONESIA

Conflicts and Segregation of Housing Communities and Surrounding
Pitri Yandri

Globalisasi Migrasi dan Peran Diaspora: Suatu Kajian Pustaka
Haning Romdiati

DPSIR Model as A Tool to Asses Land Conversation
Tariff Policy in Yogyakarta
*Nina Novira, Syarifah Aini Dalimunthe, Aditya Pandu Wicaksono,
Nur Indah Sari Dewi dan Triana Sefti Rahayu*

Memahami Adaptasi Penduduk Terhadap Perubahan Iklim
untuk Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih di Pulau-pulau
Kecil Belitung dan Bintan
Laksmi Rachmawati

Membaca Kembali Dinamika Kependudukan Dataran Tinggi
dalam Konteks Perubahan Ekologi dan Intervensi Negara:
Perspektif Ekologi Politik
Nur Rosyid

Penciptaan Mata Pencaharian Alternatif: Strategi Pengurangan
Kemiskinan dan Perlindungan Sumber Daya Laut
(Studi Kasus Kota Batam dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan)
Mita Noveria dan Meirina Ayumi Malamassam



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Jurnal Kependudukan Indonesia	Vol. 10	No. 2	75-150	Jakarta, Desember 2015	ISSN 1907-2902
----------------------------------	---------	-------	--------	---------------------------	-------------------

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

Jurnal Kependudukan Indonesia merupakan media informasi, komunikasi, dan pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah kependudukan, ketenagakerjaan dan ekologi manusia. Jurnal ini merupakan *peer-reviewed* jurnal Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Kependudukan-LIPI) yang diterbitkan dua kali dalam setahun. Artikel dapat berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, tinjauan buku, dan jenis tulisan ilmiah lainnya yang ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.

Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi
Dewan Redaksi

Dra. Haning Romdiati, MA
 Dra. Titik Handayani, MS
 Dra. Mita Noveria, MA
 Widayatun, SH, MA
 Dra. Ade Latifa, M.Hum
 Zainal Fatoni, MPH
 Vanda Ningrum, MGM
 Syarifah Aini Dalimunthe, M.Sc.
 Andini Desita Ekaputri, MSE
 Intan Adhi Perdana Putri, M.Si
 Puguh Prasetyoputra, M.H.Econ
 Puji Hartana, S.Sos

Mitra Bestari

Prof. Gavin W. Jones, Ph.D., National University of Singapore-Singapore
 Prof. Haruo Kuroyanagi, Sugiyama Jogakuen University-Japan
 Dr. Djoko Hartono, Konsultan World Bank
 Dr. Deny Hidayati, MA., Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
 Prof. Terence H. Hull, Ph.D., Australian National University- Australia
 Sukamdi, M.Sc., Ph.D., Universitas Gadjah Mada
 Dr. Semiarto Aji Purwanto, M.Si., Universitas Indonesia

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
 Widya Graha LIPI, lantai X, Ruang 2127
 Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12190-Indonesia
 Tromol Pos 250/JKT 1002,
 Telp. +62 21 5207205, 5225711, 5251542 Pes/ext. 2106
 Fax: +62 21 5207205
 E-mail: jurnalkependudukanindonesia@mail.lipi.go.id
 Website: www.kependudukan.lipi.go.id

Penerbit

Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
 Widya Graha LIPI, lantai X
 Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12190-Indonesia
 Telp. +62 21 5207205, 5225711, 5251542 Pes/ext. 2106



Conflicts and Segregation of Housing Communities and Surrounding
Pitri Yandri

Globalisasi Migrasi dan Peran Diaspora: Suatu Kajian Pustaka
Haning Romdiati

DPSIR Model as A Tool to Asses Land Conversation Tariff Policy in Yogyakarta
**Nina Novira, Syarifah Aini Dalimunthe, Aditya Pandu Wicaksono,
Nur Indah Sari Dewi dan Triana Sefti Rahayu**

Memahami Adaptasi Penduduk Terhadap Perubahan Iklim untuk Pemenuhan
Kebutuhan Air Bersih di Pulau-pulau Kecil Belitung dan Bintan
Laksmi Rachmawati

Membaca Kembali Dinamika Kependudukan Dataran Tinggi dalam Konteks
Perubahan Ekologi dan Intervensi Negara: Perspektif Ekologi Politik
Nur Rosyid

Penciptaan Mata Pencaharian Alternatif: Strategi Pengurangan Kemiskinan dan
Perlindungan Sumber Daya Laut (Studi Kasus Kota Batam dan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan)
Mita Noveria dan Meirina Ayumi Malamassam



JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

Volume 10, Nomor 2, Desember 2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii-viii
ABSTRAK/ABSTRACT	ix-xvi
Conflicts and Segregation of Housing Communities and Surrounding <i>Pitri Yandri</i>	75-88
Globalisasi Migrasi dan Peran Diaspora: Suatu Kajian Pustaka <i>Haning Romdiati</i>	89-100
DPSIR Model as A Tool to Asses Land Conversation Tariff Policy in Yogyakarta <i>Nina Novira, Syarifah Aini Dalimunthe, Aditya Pandu Wicaksono, Nur Indah Sari Dewi dan Triana Sefti Rahayu</i>	101-108
Memahami Adaptasi Penduduk Terhadap Perubahan Iklim untuk Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih di Pulau-pulau Kecil Belitung dan Bintan <i>Laksmi Rachmawati</i>	109-124
Membaca Kembali Dinamika Kependudukan Dataran Tinggi dalam Konteks Perubahan Ekologi dan Intervensi Negara: Perspektif Ekologi Politik <i>Nur Rosyid</i>	125-138
Penciptaan Mata Pencanharian Alternatif: Strategi Pengurangan Kemiskinan dan Perlindungan Sumber Daya Laut (Studi Kasus Kota Batam dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan) <i>Mita Noveria dan Meirina Ayumi Malamassam</i>	139-150

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT kami ucapkan atas tersusunnya Jurnal Kependudukan Indonesia.

Jurnal Kependudukan Indonesia (JKI) kembali hadir melalui Volume 10, No. 2, Desember 2015. Pada terbitan ini JKI menyajikan enam artikel dengan beragam topik dan penulis dari beragam institusi. Selain fokus pada kajian Demografi seperti migrasi dan pengurangan kemiskinan disajikan. Fokus pada perubahan pemanfaatan lahan, adaptasi perubahan iklim dan politik ekologi menarik untuk dibaca pada volume ini.

Artikel pertama dengan judul *Conflicts and Segregation of Housing Communities and Surrounding* ditulis oleh Pitri Yandri melihat fenomena kawasan perumahan di Indonesia telah berubah signifikan. Artikel ini menyoroti dalam rentang waktu empat belas tahun terakhir para pengembang cenderung lebih menyukai membangun perumahan klaster di tengah lingkungan permukiman warga lokal. Isu konflik meliputi konflik kepentingan dan akses terhadap jalan. Kajian ini mengemukakan bagaimana segregasi tercipta tidak hanya akibat dari preferensi warga pada kedua kawasan, tetapi terjadi karena sistem ekonomi dan kebijakan pembangunan.

Artikel kedua oleh Haning Romdiati, menyajikan hasil *literature review* dengan judul Globalisasi Migrasi dan Peran Diaspora. Globalisasi telah menciptakan peluang investasi dan mendorong kompetisi pasar dengan menciptakan dan menarik perhatian tenaga-tenaga ahli dan profesional dari negara-negara berkembang menuju negara-negara yang lebih maju. Proses semacam ini merupakan sebuah potensi untuk perkembangan dan penguatan jejaring komunitas diaspora.

Artikel ketiga ditulis oleh Nina Novira dkk, menawarkan model pajak pemanfaatan lahan untuk mengurangi laju konversi lahan. Judul artikel *DPSIR Model as a Tool To Assess Land Conversion Tariff Policy in Yogyakarta*. Perubahan pemanfaatan lahan di pertanian ke non pertanian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah penyebab utama berkurangnya lahan pertanian produktif. Model DPSIR digunakan untuk dasar penilaian dampak terhadap kebijakan tariff yang sudah diimplementasikan untuk mengurangi laju konversi lahan. Berdasarkan analisis, pendorong utama terjadinya konversi lahan adalah migrasi. Kondisi tekanan terhadap lahan memiliki implikasi terhadap dimensi ekonomi, dimensi lingkungan dan dimensi sosial.

Artikel keempat ditulis oleh Laksmi Rachmawati yang mengkaji upaya adaptasi yang telah dilakukan oleh penduduk dan pemerintah di pulau-pulau kecil yang ada di Belitung dan Bintan. Hasil survey pada level rumah tangga dan wawancara mendalam menunjukkan telah ada upaya adaptasi yang bersifat responsif/reaktif dan antisipatif yang dilakukan oleh pemerintah maupun penduduk lokal. Namun demikian, pengelolaan air (*water governance*) belum menjadi prioritas padahal hal ini penting untuk meningkatkan kapasitas adaptasi penduduk terkait pemenuhan kebutuhan air bersih di pulau-pulau kecil.

Artikel kelima ditulis oleh Nur Rosyid berjudul *Ekologi Politik dan Dinamika Sosio-Ekonomi di Dataran Tinggi Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah*. Studi ini memberi kajian dinamika kependudukan sejalan dengan dinamika kebijakan pengelolaan dataran tinggi dan perekonomian masyarakat setempat. Dinamika akses petani di dataran tinggi terhadap tanah sebagai bagian paling penting dalam membangun tempat tinggal, ekonomi, hingga persoalan lain yang lebih luas. Dalam konteks kajian di dataran tinggi Pemalang, menyempitnya akses tersebut terjadi melalui kebijakan dan gerakan konservasi yang mendorong petani menanam tanaman kayu. Menyempitnya akses petani terhadap lahan pertanian produksi pangan, mendorong mereka untuk mengakses sumber-sumber ekonomi non-pertanian di luar daerahnya sendiri. Hal ini cukup berpengaruh terhadap semakin meningkatnya arus urbanisasi dan atau migrasi dari dataran tinggi ke rendah, dari desa ke kota, atau dari Jawa ke Luar Jawa.

Artikel keenam ditulis oleh Mita Noveria dan Ayumi Malamassam berjudul Penciptaan Mata Pencaharian Alternatif: Strategi Pengurangan Kemiskinan dan Perlindungan Sumber Daya Laut (Studi Kasus Kota Batam dan Kabupaten Pangkajene dan kepulauan). Artikel ini adalah hasil dari kegiatan (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coremap*) di Kota Batam, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Pangkajene. Melalui program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang di dua wilayah memperlihatkan bahwa upaya penciptaan alternatif pekerjaan cenderung kurang mempertimbangkan kondisi/kebiasaan kerja yang selama ini dilaksanakan oleh kelompok target. Sebagai contoh, pekerjaan alternatif yang ditawarkan dalam COREMAP dilakukan secara berkelompok, namun sayangnya bekerja dalam kelompok belum menjadi kebiasaan penduduk setempat. Pekerjaan alternatif yang ditawarkan dalam program ini umumnya memerlukan waktu yang relatif lama untuk memperoleh hasilnya, padahal penduduk masih terbiasa memperoleh penghasilan dengan cara cepat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Penulis yang telah berkontribusi pada terbitan ini juga kepada Mitra Bestari yang sudah bekerja sama dengan redaksi untuk menyampaikan saran dan reviewnya terhadap artikel -artikel ini. Selamat Membaca!

Salam Hangat,

Redaksi JKI



DDC: 300.303

Pitri Yandri

KONFLIK DAN SEGREGASI KLUSTER PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN SEKITARNYA

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 10, No. 2, Desember 2015, Hlm. 75-88

Sejak pertama kali diteliti oleh Leicsh (2002), fenomena kawasan perumahan di Indonesia telah berubah signifikan. Empat belas tahun telah mengubah segalanya, dan perubahan itu diakibatkan oleh perilaku pemerintah daerah. Kini, para pengembang cenderung lebih menyukai membangun perumahan klaster dan tragisnya mereka membangunnya di tengah lingkungan permukiman warga lokal. Dalam kasus ini, komunitas berpagar lebih nyata dibanding empat belas tahun yang lalu. Dengan Uji Mann Whitney, ditemukan adanya ketidakcocokan antara warga perumahan klaster dengan warga lokal dan dalam banyak hal menimbulkan konflik. Isu konflik meliputi konflik kepentingan dan akses terhadap jalan. Pada saat yang sama, baik warga di perumahan klaster maupun warga lokal sama-sama tersegregasi. Segregasi di Indonesia terjadi pada kedua kawasan dengan tekanan segregasi yang berbeda-beda. Karena itu, 'segregasi sukarela' dan 'segregasi tak-sukarela' tidak sepenuhnya dapat menjawab problem segregasi di kawasan suburban di Indonesia. Di sini, segregasi tercipta tidak hanya akibat dari preferensi warga pada kedua kawasan, tetapi terjadi karena sistem ekonomi dan kebijakan pembangunan.

Dengan Analisis Wacana Kritis, artikel ini menyajikan kesimpulan munculnya pola baru segregasi, yaitu segregasi sistemik- spasial.

Kata Kunci: Perumahan, Komunitas Berpagar, Perumahan Klaster, Segregasi, Segregasi Sistemik-Spasial

DDC: 300.331

Haning Romdiati

GLOBALISASI MIGRASI DAN PERAN DIASPORA: Suatu Kajian Pustaka

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 10, No. 2, Desember 2015, Hlm. 89-100

Tulisan ini mencoba memahami fenomena globalisasi dan konteksnya terhadap pembentukan serta peran diaspora di negara asal. Meskipun belum ada pembuktian yang jelas, tetapi sering diasumsikan bahwa ada percepatan arus migrasi internasional sebagai bagian dari proses globalisasi. Percepatan ini dapat dilihat sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pembentukan dan penguatan diaspora. Globalisasi migrasi yang diukur dari peningkatan volume dan perluasan destinasi migrasi internasional, mungkin terjadi sebagai akibat revolusi teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah mengurangi biaya migrasi secara signifikan. Kondisi seperti ini tidak hanya meningkatkan volume migrasi internasional, tetapi juga menimbulkan pergeseran pola migrasi global. Perubahan destinasi baru yang diikuti dengan peningkatan volume migrasi memungkinkan imigran membentuk suatu komunitas atau bergabung dengan komunitas diaspora yang sudah ada, dalam upaya menjamin kehidupan transasional mereka yang sekaligus menjaga hubungan yang kuat dengan negara asal. Diaspora yang sudah lama terbentuk dapat berkontribusi terhadap pembangunan negara asal. Partisipasi dalam pembangunan bukan hanya dalam bentuk remitansi, tetapi juga membangun jembatan antara negara asal dan tujuan dalam bidang ekonomi, transfer ketrampilan, teknologi, dan budaya.

Kata Kunci : Globalisasi, Migrasi, Diaspora

DDC: 300.305

Nina Novira, Syarifah Aini Dalimunthe, Aditya Pandu Wicaksono, Nur Indah Sari Dewi dan Triana Sefti Rahayu

MODEL DPSIR SEBAGAI METODE PENILAIAN KEBIJAKAN KONVERSI LAHAN DI YOGYAKARTA

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 10, No. 2, Desember 2015, Hlm. 101-108

Perubahan pemanfaatan lahan di pertanian ke non pertanian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah penyebab utama berkurangnya lahan pertanian produktif. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan permintaan akan lahan bertambah. Sulitnya memenuhi kebutuhan lahan untuk pembangunan di perkotaan semakin massif terjadi. Model DPSIR digunakan untuk dasar penilaian dampak terhadap kebijakan tariff yang sudah diimplementasikan untuk mengurangi laju konversi lahan. Berdasarkan analisis, pendorong utama terjadinya konversi lahan adalah migrasi. Kondisi tekanan terhadap lahan memiliki implikasi terhadap dimensi ekonomi, dimensi kelingkungan dan dimensi social. Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa degradasi lahan semakin terjadi yang pada akhirnya mengancam ketahanan pangan dan memunculkan polusi. Sebagai respon, pemerintah daerah menerbitkan PERDA No. 53 Year 2007 mengenai otorisasi pemanfaatan lahan di DIY. Artikel ini akan membahas bagaimana DPSIR model dimanfaatkan untuk menilai implementasi kebijakan tersebut.

Kata Kunci : DPSIR, Penilaian, Perubahan Pemanfaatan Lahan, Kebijakan Pemanfaatan Lahan

DDC: 600.643

Laksmi Rachmawati

MEMAHAMI ADAPTASI PENDUDUK TERHADAP PERUBAHAN IKLIM UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH DI PULAU-PULAU KECIL BELITUNG DAN BINTAN

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 10, No. 2, Desember 2015, Hlm. 109-124

Pemenuhan kebutuhan air merupakan masalah pokok, mengingat air merupakan kebutuhan dasar manusia. Pulau-pulau kecil merupakan wilayah yang secara alamiah rentan, dengan adanya perubahan iklim kerentanan pulau-pulau kecil akan meningkat. Perubahan temperatur dan pola curah hujan akibat perubahan iklim akan mempengaruhi siklus hidrologi yang pada akhirnya berdampak pada pasokan air bersih di pulau-pulau kecil. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji upaya adaptasi yang telah dilakukan oleh penduduk dan pemerintah di pulau-pulau kecil yang ada di Belitung dan Bintan. Penelitian dilakukan dengan mempergunakan metode kuantitatif (survei pada 400 responden) dan metode kualitatif (wawancara dan diskusi kelompok terfokus). Hasil studi di pulau-pulau kecil yang ada di Bintan dan Belitung menunjukkan telah ada upaya adaptasi yang bersifat responsif/reaktif dan antisipatif yang dilakukan oleh pemerintah maupun penduduk lokal. Beberapa upaya adaptasi yang telah dilakukan diantaranya dengan memperbesar tampungan sumber air, membeli, mencari sumber air baru, desalinisasi air, pemanenan air hujan maupun melakukan distribusi air yang lebih baik. Selain itu salah satu kegiatan menjaga ekosistem mangrove di Selat Nasik merupakan kegiatan adaptasi perubahan iklim yang dapat menjaga sumber air dari intrusi air laut. Namun demikian, pengelolaan air (*water governance*) belum menjadi prioritas padahal hal ini penting untuk meningkatkan kapasitas adaptasi penduduk terkait pemenuhan kebutuhan air bersih di pulau-pulau kecil.

Kata Kunci: Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih, Pulau-Pulau Kecil, Adaptasi, Responsif/Reaktif, Antisipatif, Kapasitas Adaptasi, Pengelolaan Air (*Water Governance*)

DDC: 700.707

Nur Rosyid

EKOLOGI POLITIK DAN DINAMIKA SOSIO-EKONOMI DI DATARAN TINGGI KABUPATEN PEMALANG, JAWA TENGAH

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 10, No. 2, Desember 2015, Hlm. 125-138

Tulisan ini menjelaskan signifikansi intervensi Negara di sektor ekologi dalam membentuk dinamika kependudukan dataran tinggi, khususnya dinamika migrasi, penyempitan and perluasan sektor pekerjaan, dan negosiasinya dengan perubahan ekologi. Selama

ini, studi mengenai permasalahan kependudukan selalu berangkat dari isu kemiskinan, ketimpangan sumber daya, lonjakan populasi, dan surplus tenaga kerja, dan sebagainya. Penjelasan kausalitas ini mempunyai kelemahan dalam menjawab apa yang memungkinkan kondisi tersebut dapat terjadi. Penelitian yang dilakukan di dataran tinggi Watukumpul, Pemalang, Jawa Tengah, mencoba memahami bagaimana dinamika kependudukan dataran tinggi disituasikan oleh kekuatan ekonomi politik dan kondisi ekologis. Daerah tersebut cukup menarik untuk ditinjau lebih lanjut karena ada praktik pengubahan jenis tanaman produksi dalam waktu yang relatif singkat: dari tanaman glagah dan padi ke tanaman Albasia yang cukup masif melalui program penanaman pohon dan kampanye penghijauan. Dengan menggunakan pendekatan Ekologi Politik, saya berasumsi perubahan ekologi ini bukan dikarenakan rasionalitas penduduk setempat saja, melainkan ada intervensi politik-ekonomi negara melalui kebijakannya, serta kondisi lingkungan yang memungkinkan kedua itu bisa berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat beberapa perubahan strategi petani dalam mengembangkan produksi tanaman barunya dan pola-pola migrasi sebagai bagian dari siasat membaca peluang-peluang ekonomi. Pilihan ini berimplikasi terhadap perubahan rutinitas dan keseharian pola produksi di tingkat keluarga petani.

Kata Kunci: Kependudukan, Ekologi Politik, Perubahan Ekonomi dan Lingkungan, Strategi Petani, Pola Migrasi

DDC : 300.380

Mita Noveria dan Meirina Ayumi Malamasam

PENCIPTAAN MATA PENCAHARIAN ALTERNATIF: STRATEGI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT (STUDI KASUS KOTA BATAM DAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol. 10, No. 2, Desember 2015, Hlm. 139-150

Salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan di kalangan nelayan adalah menciptakan kegiatan ekonomi alternatif yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Kegiatan ini antara lain diwujudkan melalui diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga. Ini memungkinkan para nelayan melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar bidang perikanan tangkap, sekaligus merupakan suatu upaya untuk memelihara kelestarian sumber daya laut.

Mata pencaharian alternatif dapat mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya laut dan pesisir. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji upaya penciptaan mata pencaharian alternatif yang dilakukan melalui program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coremap*). Data yang digunakan adalah data kualitatif, bersumber dari penelitian di dua lokasi, yaitu Kota Batam (Kepulauan Riau) dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) di Sulawesi Selatan. Hasil analisis data memperlihatkan bahwa upaya penciptaan alternatif pekerjaan cenderung kurang mempertimbangkan kondisi/kebiasaan kerja yang selama ini dilaksanakan oleh kelompok target. Sebagai contoh, pekerjaan alternatif yang ditawarkan dalam COREMAP dilakukan secara berkelompok, namun sayangnya bekerja dalam kelompok belum menjadi kebiasaan penduduk setempat. Selain itu, pekerjaan alternatif yang ditawarkan dalam program ini umumnya memerlukan waktu yang relatif lama untuk memperoleh hasilnya, padahal penduduk masih terbiasa memperoleh penghasilan dengan cara cepat.

Kata Kunci: Pengurangan Kemiskinan, Mata Pencaharian Alternatif, Kota Batam, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



DDC: 300.303

Pitri Yantri

**CONFLICTS AND SEGREGATION OF HOUSING
CLUSTER COMMUNITIES AND ITS
SURROUNDING**

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol.10, No. 2, December 2015. Page 75-88

Since it was first studied by Leicsh (2002), the phenomenon of housing cluster in Indonesia has changed significantly. Fourteen years have changed everything, and these changes are caused by local governments. Now, developers are more inclined and prefer to build a housing cluster, and tragically it is located in the middle of local neighborhoods. In this case, gated communities are more apparent than fourteen years ago. Through the Mann Whitney U test, it turns out that there is dissimilarity among people in the housing cluster with people in the local neighborhood, and it has even shown a confrontational conflict. The issues of the conflict revolve around conflict of interest, access-to and use-off the road. At the same time, people in the housing cluster and local neighborhood are segregated. Segregation in Indonesia occurs in both areas with different tension. However, voluntary and involuntary segregation could not fully answer the case of residential segregation in the suburb of this country. Hence, segregation is created not because of the preferences of people in both areas, but y and for an economic and social system of development policy. Using Critical Discourse Analysis, this paper demonstrates the emergence of new patterns of residential segregation, namely systemic spatial segregation.

Keywords: Housing, Gated Communities, Housing Cluster, Segregation, Systemic Spatial Segregation

DDC: 300.331

Haning Romdiati

**GLOBALIZATION OF MIGRATION AND THE
ROLE OF DIASPORA: A Literature Review**

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol.10, No. 2, December 2015, Page 89-100

This paper aims to understand how is the globalization of migration and the role of the diaspora to their country of origin. Though it has remained largely untested, it is commonly assumed that international migration has accelerated as part of globalization processes. The broad trend of the globalization of migration assumes to be one of contributing factor to establishment and engagement of diaspora. Globalization of Migration measured by an increase in stock and widening in geographical scope of international migration may occur mainly due revolution of information, communication, and transportation that have significantly reduced the cost of migration. Such situation not only increases in the volume of migration but also generates the shift in global migration pattern. The change to new destination followed by the rise of migration are more likely to connect immigrants into one big community or to join to existing diaspora to ensure their transnational life and also to keep well and strong connection with their homeland. Diaspora that has been long established affects development in countries of origin. Such participation in development is not only in remittances, but also in building bridges between countries of origin and destination which convey in economic activity, transfers of, skills, technological development, and cultural enrichment.

Keywords: Globalization, Migration, Diaspora

DDC : 300.305

Nina Novira, Syarifah Aini Dalimunthe, Aditya Pandu Wicaksono, Nur Indah Sari Dewi dan Triana Sefti Rahayu

DPSIR MODEL AS A TOOL TO ASSES LAND CONVERSION TARIFF POLICY IN YOGYAKARTA

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol.10, No. 2, December 2015, Page 101-108

Land use change from agricultural land to non-agricultural purposes in Yogyakarta Special Province (DIY) is the main factor leading to the decrease of agricultural land. The increasing population growth has led to a higher demand for land, which is contributing to the rapid land use changes. Land scarcity has led to a change in land utilization within the city and in the surrounding area. The DPSIR Model is used as the basis for the impact assessment analysis on the tariff policy implementation regarding to the controlling of the land use change. Driving force in this model is migration and the pressure is land use change. The state is divided into three categories, state of economic dimension, environmental dimension, and social dimension. These have caused impacts on land degradation, threats to food security, and pollution. As the response to this, the government introduced the policy PERDA No. 53 Year 2007 about authorizing land use in DIY. This paper is intended to explain how the DPSIR model is used to assess the policy implementation.

Keywords: DPSIR, Assessment, Land Use Change, Land Use Policy.

DDC: 600.643

Laksmi Rachmawati

UNDERSTANDING CLIMATE CHANGE ADAPTATION ON WATER FULFILLMENT FOR SMALL ISLANDS POPULATION IN BELITUNG AND BINTAN

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol.10, No. 2, December 2015, Page 109-124

Freshwater is an essential need for human being thus a sufficient supply of it it is required. Naturally, small islands are vulnerable. The occurrence of climate change

the vulnerability of these islands increase. Changes on temperature and precipitation can alter the hydrological cycle and will directly affect the water supply in small islands. This paper examines various adaptation efforts implemented by local population and government in small islands situated in Belitung and Bintan. Using quantitative method (survey to 400 respondents) and qualitative method (interview and focus group discussion), the research found that the adaptation has already taken place. The responsive/reactive and anticipatory adaptation are managed by government and local people who live in these small islands. Some of the adaptation actions are widening water storage, buying, searching for new water resources, desalination of salt water, rain water harvesting and improvement of water distribution. In addition, local mangrove management in Selat Nasik acts as adaptation functions for barriers of salt water intrusion. However, water governance has not been prioritized although it is proven to be necessary to support adaptive capacity for fresh water fulfillment

Keywords: Fresh Water Fulfillment, Small Islands, Adaptation, Responsive/Reactive, Anticipatory, Adaptive Capacity, Water Governance

DDC : 700.707

Nur Rosyid

EKOLOGI POLITIK DAN DINAMIKA SOSIO-EKONOMI DI DATARAN TINGGI KABUPATEN PEMALANG, JAWA TENGAH

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol.10, No. 2, December 2015, Page 125-138

This paper explain the significance of state intervention in ecological aspects in the forming of upland demography, especially in uplanders migration dynamic, the expansion and constriction of labours, and their negotiation to the ecological changes. So far, many scholars set out the demographic problems by the issues of poverty, inequality resources, increase of population, labour surplus, and so on. This causal explanation was lack in question on what kind of possibilities force those problems happened. The research has been done in the upland of Watukumpul, Pemalang, Central Java, try to understand how the upland demographical dynamics situated by political-economic and ecological forces. This area is suitable because of vast spreading in changing of farming system: from rice and glagah cultivation to cash crop of Albasia through the reforestation programs and Green campaign. By using

Political Ecology perspective, I assume that the ecological changes are forced and situated by political economic state interventions through policies and environmental condition which both farmer and state negotiation be possible. The result show, there was a changing to develop the new rural econonomic (new plantation) and migration pattern as a part of farmer strategies concerning to the econ omic opportunities and state intervention through reforestation programs. These choices imply to the changing of farmer's daily rutinities and their household production

Keywords: Demography, Political Ecology, Economic And Environmental Change, Farmer Strategies, Migration Pattern

DDC : 300.380

Mita Noveria dan Meirina Ayumi Malamasam

ALTERNATIVE INCOME GENERATING ACTIVITIES: A STRATEGY FOR POVERTY ALLEVIATION AND MARINE RESOURCES PROTECTION (CASE STUDY FROM THE CITY OF BATAM AND PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DISTRICT)

Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol.10, No. 2, December 2015, Page 139-150

One attempt to alleviate poverty of fishermen is, among others, by creating alternative income generating activities to facilitate additional income. The activities are implemented through diversification of household income's sources. This enables fishermen to carry out jobs other than fisheries, which is also an effective effort to conserve marine resources. The reason is because alternative income generating activities could reduce the high dependency of fishery households on marine resources. This paper aims to assess alternative income-generating activities implemented through the Coral Reef Rehabilitation and Management Program (Coremap). It is based on two Coremap study sites, ie. the City of Batam in the Province of Riau Islands and the district of Pangkajene Islands (Pangkep) in the Province of South Sulawesi. This paper based on qualitative data, particularly on the supporting and challenging factors in implementing income-generating activities. The result of data analysis shows that the alternative income generated activities offered by the program tend to neglect the work habits of the targeted groups. For example, the activities requested target population to work collectively in a group. However, in reality, they are not accustomed to such manner. Moreover, the initiated income generated activities took quite long time to harvest, while the target population normally carried out quick yielding jobs.

Keywords: Poverty Alleviation, Income-Generating Activities, The City of Batam, The District of Pangkajene Islands

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

CONFLICTS AND SEGREGATION OF HOUSING CLUSTER COMMUNITIES AND ITS SURROUNDING

(KONFLIK DAN SEGREGASI KLUSTER PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN SEKITARNYA)

Pitri Yandri

PSDOD STIE Ahmad Dahlan Jakarta

Regional and Rural Development Planning Sciences IPB

Korespondensi Penulis: *p.yandri@gmail.com*

Abstrak

Sejak pertama kali diteliti oleh Leicsh (2002), fenomena kawasan perumahan di Indonesia telah berubah signifikan. Empat belas tahun telah mengubah segalanya, dan perubahan itu diakibatkan oleh perilaku pemerintah daerah. Kini, para pengembang cenderung lebih menyukai membangun perumahan klaster dan tragisnya mereka membangunnya di tengah lingkungan permukiman warga lokal. Dalam kasus ini, komunitas berpagar lebih nyata dibanding empat belas tahun yang lalu. Dengan Uji Mann Whitney, ditemukan adanya ketidakcocokan antara warga perumahan klaster dengan warga lokal dan dalam banyak hal menimbulkan konflik. Isu konflik meliputi konflik kepentingan dan akses terhadap jalan. Pada saat yang sama, baik warga di perumahan klaster maupun warga lokal sama-sama tersegregasi. Segregasi di Indonesia terjadi pada kedua kawasan dengan tekanan segregasi yang berbeda-beda. Karena itu, 'segregasi sukarela' dan 'segregasi tak-sukarela' tidak sepenuhnya dapat menjawab problem segregasi di kawasan suburban di Indonesia. Di sini, segregasi tercipta tidak hanya akibat dari preferensi warga pada kedua kawasan, tetapi terjadi karena sistem ekonomi dan kebijakan pembangunan. Dengan Analisis Wacana Kritis, artikel ini menyajikan kesimpulan munculnya pola baru segregasi, yaitu segregasi sistemik- spasial.

Kata Kunci: Perumahan, Komunitas Berpagar, Perumahan Klaster, Segregasi, Segregasi Sistemik-Spasial

Abstract

Since it was first studied by Leicsh (2002), the phenomenon of housing cluster in Indonesia has changed significantly. Fourteen years have changed everything, and these changes are caused by local governments. Now, developers are more inclined and prefer to build a housing cluster, and tragically it is located in the middle of local neighborhoods. In this case, gated communities are more apparent than fourteen years ago. Through the Mann Whitney U test, it turns out that there is dissimilarity among people in the housing cluster with people in the local neighborhood, and it has even shown a confrontational conflict. The issues of the conflict revolve around conflict of interest, access-to and use-off the road. At the same time, people in the housing cluster and local neighborhood are segregated. Segregation in Indonesia occurs in both areas with different tension. However, voluntary and involuntary segregation could not fully answer the case of residential segregation in the suburb of this country. Hence, segregation is created not because of the preferences of people in both areas, but y and for an economic and social system of development policy. Using Critical Discourse Analysis, this paper demonstrates the emergence of new patterns of residential segregation, namely systemic spatial segregation.

Keywords: Housing, Gated Communities, Housing Cluster, Segregation, Systemic Spatial Segregation

INTRODUCTION

Since the publication of Leisch (2002), the issue of gated communities in Indonesia has continued to get the attention of many researchers. The issue is not just about the gated community's *an sich*, but became more widespread that covers a wide range of disciplines, including social, marketing, economics and even architecture. Their research areas are then extended to various regions in Indonesia, among others are: Bandung (Aris, 2003; Rudiawan, 2008; Hapsariniaty, 2013), Pekanbaru City (Febby, 2010); Bandar Lampung (Ehwan, 2004), Depok (Kusumawardhani, 2004; Hand, 2009); Yogyakarta (Widhyharto, 2009; Handoko, 2011); Kota Malang (Kerr, 2008), Denpasar-Bali (Sueca and Fitriany, 2012), Semarang (Nurhadi, 2004) and the Sengkang City, South Sulawesi (Ahmadi, 2005).

The area of Leisch's (2002) at that time is two biggest residential area in Indonesia, namely Lippo Karawaci and Bumi Serpong Damai (BSD). Now, BSD changed its name to BSD City. The term "city" means that as if the area is a residential town complete with facilities and infrastructures that supports the emergence of a city.

In the past, Lippo Karawaci was located in Tangerang Regency, and most of the land was part of the administrative region of Tangerang Municipality, while the entire BSD land existed in Tangerang Regency. However, in 2008, Tangerang divided into two regions, which then led to a new administrative region, namely South Tangerang Municipality. Automatically, BSD now is in the part of the administrative region of South Tangerang Municipality. Geographically, South Tangerang Municipality is one of the municipality in Banten Province. The region is located in the eastern of Banten Province and administratively consists of 7 districts and 54 sub-districts with an area of 147.19 km². The region also acts as an area that connects the Banten and Jakarta Province. It is clear enough that the region is a buffer of Jakarta (Figure 1).

Along with that, now the Indonesian political system has changed, from centralization to decentralization. It is characterized by the Act. No. 32/2004 (revision of the Act. No. 22/1999) on Local Government and Act. No. 33/2004 (revision of the Act. No. 25/1999) on Fiscal Balance between Central and Local Government. This regulation resulted in a number of areas underwent decentralization (Santoso, 2007; Prasajo & Holidin, 2012; and Sjahrir et al, 2013). The impact is clear that the decentralized region has the authority to administer their own territory, especially the authority to give permission for investment. The authority also includes the granting of investment to housing developers.

Now days, developers are more inclined and prefer to build a residential in a small area of land, which in Indonesia is known as housing cluster (Hapsariniaty, 2013) and/or "housing complex" (Kerr, 2008) (Table 1). For the sake of terms uniformity, this paper will refer to such residential areas as "housing cluster", unless indicated. What happens in South Tangerang Municipality is exactly similar to Hapsariniaty study (2013) in Metropolitan Bandung, which stated that the housing clusters are built on a small plots and land relatively smaller than 2 hectares. Moreover, especially in South Tangerang Municipality and apparently common in all suburb in this country, housing clusters are built in the middle of the local neighborhood.

Aris (2003) stated, this phenomenon occurs because investors involved in this project have a small capital. However, not infrequently the developers who have a medium-large capital also become "players" in this business, for example is Bintaro Jaya Residential. They learn from the experience; vast residential areas often suffer from over-supply (Lesich, 2002). For them, this option is more profitable than buying a vast land, apart from the issues that building large residential areas requiring them to build social and public facilities.

Table 1. List of Housing Area by Size 0.1-2 hectares in South Tangerang Municipality

Name of Residential	Developer	Location (District/Sub-district)	Facility	Area (Hectar)	Planned Developed (Unit)	Built (Unit)
Abiyasa Residence	Individual	Pondok Benda, Pamulang	Garden, <i>One Gate</i>	0,3	29	11
Bamboo Residence	Individual	Jurang Mangu Timur, Pondok Aren	Garden	1	47	19
Beranda Pondok Cabe	PT. Hana Kreasi Persada	Pondok Cabe Ilir	-	1	50	11
Beranda Rempoa	PT. Hana Kreasi Persada	Rempoa, Ciputat Timur	Swimming Pool	1	30	17
Bintan Residence	PT. Prodekon Mitratama	Rengas, Ciputat Timur	Garden	0,6	31	20
Citra Kedaung Asri	Individual	Kedaung, Pamulang	Garden, <i>One gate</i>	0,5	14	4

Cluster Hakiki Pamulang	Individual	Serua, Ciputat	Garden	1	64	20
Damai Indah Pamulang	Individual	Ciater, Serpong	Garden	2	120	1
Graha Hijau Riviera	PT. Puri Agung Sarana Jaya	Kp.Sawah, Ciputat	Children's Playground, Jogging track, Swimming Pool	2	69	11
Grand Cireundeu	PT. Giradi mega Utama	Pisangan, Ciputat Timur	Swimming Pool	1	45	18
Griya Aviva 2	Individual	Cempaka Putih, Ciputat Timur	Garden	1	48	35
Griya Galeri Bintaro	Individual	Sawah Lama, Ciputat	System Cluster	0,3	9	3
Griya Laksana Pinasti	Individual	Pondok Benda, Pamulang	Garden	1	38	14
Griya Pesona Prima	PT. Griya Pesona Indah	Pisangan, Ciputat Timur	Garden	1	57	57
Griya Serua Permai	PT. Bina tama Adhikarya	Serua, Ciputat	Sports, Children's Playground	1	156	136
Mega Persada Residence	PT. Bumi Selaras Rezeki	Jurang Mangu, Pondok Aren	Play ground	2	58	20
Pesona Cinere	PT. Framayasa Mitrasarana Abadi	Pondok Cabe Udik, Pamulang	Jogging Track	1,3	53	31
Pondok Benda Residence	Individual	Pondok Benda, Pamulang	Garden, Worship Facilities	1,7	110	90
Pondok Indah Puri Bintaro	PT. Tritunggal Artamas Sentosa	Bintaro	Sport Club	0,8	39	16
Puri Mas Town House	PT. Tunggal Putra Pratama	Cinangka, Ciputat	Garden	1	100	-
Purnawarman Residence	Cipta Properti	Pisangan, Ciputat Timur	24 ours Security	0,5	31	31
Sing Asri	Best House	Kp. Sawah, Ciputat	Modern Stores, Garden	1,2	45	--
Smal Vile	Individual	Sawah Lama, Ciputat	Garden	1,2	8	8
Villa Selecta	Barco Group	Ciater, Serpong	Minimarket	1	72	20

Source: Banten Province, 2012

Housing and Inequality

The problem is that housing cluster development become the main cause of income inequality, especially among residents in housing cluster with local residents (Wheeler & Jeunesse, 2007; Yandri, 2014). Wheeler and Jeunesse (2007) said that principal cause of the inequality is income heterogeneity. While Yandri (2014) said that determinant factors of inequalities are: firstly, people who live in housing cluster is the commuters that the location of their offices located in urban areas (Jakarta). Secondly, the main characteristic of urban areas is high variation in type of work. The implication of it, there is highly differentiation of work on people in the housing cluster. Work differentiation led to variations in the level of wages. And thus, variation in the level of wages that is the only reason why resident's income in housing cluster is not evenly distributed equally than income in local residents. Thirdly, the opposite happens is that people in local neighborhood is origin community which relatively have homogeneous type of work. And in many aspects, inequality in different areas is closely related to the conflict (Pratiwi & Elgifienda, 2008; Gunawan, 2011; and Rahman, 2013), especially residents of housing in different regions (Smigiel, 2013).

By photo documentation, this paper elaborated in detail how conflicts arise among residents in the housing cluster with residents in local neighborhoods. The conflicts, according to Leisch's study (2001), has not come to the surface. He only mentioned the possibility of social disharmony among citizens. It seems, 14 years has changed the phenomenon of gated communities in the suburb of Indonesia significantly, and these changes are caused by—either intentionally or not—many local governments.

In that context, the role of local government has often become the primary cause of gated communities in residential areas. This issue has been noted by Widhyharto (2009), who said that this could happen because of lack of control by the local government in anticipation of housing spatial fragmentation. Therefore, in fact, the emergence of the massive gated communities in suburbs, as stated Güzey (2014), cannot be separated from the collaboration between the interests of the state/central government, local governments, developers, media (supply side) and the consumer as well (the demand side).

Studies in many regions of Indonesia explained that, as mentioned earlier, consumer preferences towards

housing cluster are highly varied, either because of lifestyle, prestige and security. However, whatever their preferences are, their choices result in segregation, more specifically residential segregation. Residential segregation is defined by Massey and Denton (1988) in Huie and Frisbie (2000) as “the degree to which two or more groups live separately from one another, in different parts of urban environment”.

Following Vinkovic (2009) and Crooks (2010) in Quadros (n.d), segregation in urban areas can be divided

and occurs in two categories, namely the voluntary segregation and involuntary segregation. Voluntary segregation refers to what the individual or the social class of the individual seeks, by own initiative, to be located close to other people of the same social class. However, what happened in the suburb of Indonesia apparently cannot be categorized into both segregations. Precisely because of this, this paper would also demonstrate why both types of segregation are not fully able to answer the pattern of residential segregation in Indonesia.



Figure 1. South Tangerang Municipality Map

This paper used a mix-combination of approaches: quantitative and qualitative. By questionnaire quantitative approach was used to examine the conflict between both areas. Tests performed using the Mann Whitney U test (equation 1-3). The tests were used to compare the independent populations which were divided into people in the housing cluster and local neighborhood. In-depth interviews was also used to strengthened the issue.

$$U_1 = n_1 \cdot n_2 + \frac{n_2(n_2+1)}{2} - \sum R_2 \quad (1)$$

$$U_2 = n_1 \cdot n_2 + \frac{n_1(n_1+1)}{2} - \sum R_1 \quad (2)$$

Annotation:

U_1 : test statistic U_1

U_2 : test statistic U_2

R_1 : total rank of local neighborhood

R_2 : total rank of housing cluster

n_1 : sample in local neighborhood

n_2 : sample in housing cluster

Using purposive sampling, this study observed 88 household respondents. Sample selection criteria based on spatial location of the households in the housing cluster and the outside of housing clusters (local

neighborhood). Central Limit Theorem stated that if $X_1, X_2, \dots, X_n$ is a random variable of the population (in this case, the probability distribution) by any mean μ_x and variance σ_x^2 , then the mean of the sample tends to be normally distributed with mean μ_x and variance $\frac{\sigma_x^2}{n}$ when the sample size is increased to infinity. If X_i is assumed comes from a normal population, the sample mean will follow a normal distribution regardless of the sample size. Respondents spread into both areas, people in housing clusters and people in local communities. The theory states that if the number of samples in each category are over 20, it can use the test statistic Z as follows.

$$Z = \frac{U - \frac{n_1 \cdot n_2}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}}} \quad (3)$$

A qualitative approach was used to test the validity of the theory of Massey and Denton (1988) on residential segregation. Specifically, the approach was done through critical discourse analysis (CDA). Rodak and Meyer (2009) said, CDA is a type of discourse analytical research that primarily studies the way power abuse, dominance, and equalities are enacted, reproduced, and resisted by text and talk in the social

and political context. With such dissident research, critical discourse analysis takes explicit position, and thus wants to understand, expose, and ultimately resist social inequalities. Therefore, CDA is politically committed to social change (Jorgensen & Phillips, 2002).

The main principle in the use of this model is that the text can only be understood in relation to other texts in a social context linkages. That is, the text can never be understood separately (Eriyanto, 2001). The analysis technique consists of three dimensions, namely

1. The text, which is the analysis of the linguistic characteristics of the text, descriptive explanation of the text. For example, vocabulary, language and grammar
2. Discourse practice. The dimension of the processes associated with the production and consumption of the texts. The analysis focused on how the writer relies on existing discourse in the process of making the text, and then how to apply text recipients, consume and interpret it.
3. Social practices. This dimension describes the relationship between text with sociocultural practices in the society.

The Character of Housing Cluster

The survey was conducted in four residential cluster areas, which located in three districts and five sub-districts. Those districts were Ciputat, Serpong and Pamulang, while the sub-districts were Serua, Ciater, Benda Baru, Bakti Jaya and Pondok Ranji. The first observed cluster of residential areas was Villa Dago Tol Residential. This residential was developed by PT. Grup Duta Putra with total area up to 32 hectares, consists of 1,500 housing units. Construction started in 1999 and began to be marketed in 2001. This residential is equipped with sports arenas, such as swimming pools, tennis and basketball courts.



Figure 2. Satellite Map of *Villa Dago Tol* Residential

The second residential was Villa Dago Pamulang Residential. This residential is located in Pamulang District. It was built around 1995 by PT. Grup Duta Putra with total area to 100 hectares. Inside the residential, there are a variety of business facilities including a minimarket and a number of other intermediate enterprises. In addition, it is also supported by sports facilities, such as tennis, basketball and badminton courts and also swimming pool.



Figure 3. Satellite Map of *Villa Dago Pamulang* Residential

The third location was Permata Pamulang Residential. Permata Pamulang Residential is located in the Bakti Jaya Sub-district. Unfortunately, there is no accurate information about the residential area, such as when it was built, area width and the number of housing units.



Figure 4. Satellite Map of *Permata Pamulang* Residential

The fourth location was Menjangan Residence Residential. This is the real exclusive cluster residential. This residential is located in the Pondok Ranji Sub-district. The name “Menjangan” is used because this cluster is located at Jl. Menjangan.



Figure 5. Satellite Map of *Menjangan Residence* Residential

Confrontational Conflict

There were 8 questions which then grouped into two major aspects. The first aspect was related to social

interaction in the form of conversation between both areas. The interaction was one form of social cohesion and openness (inclusion) from one region to another region. Forms of openness was for one and another. The survey showed that there were differences in perception between both regions. Residents in the housing cluster stated “often” (42.1%) talked with residents in local neighborhood, but the residents in local neighborhood stated “never” (26.3%) talked with people in the housing cluster (Figure 6).

Differences in perception of social interaction were likely attributable to differences between them. The majority of residents in the housing cluster, for example, answered “somewhat close” (36.8%) while the majority of residents in local neighborhood replied “not far and not close”. The second highest frequency distribution thereafter was “somewhat far”. Despite having a different frequency distribution, namely 31.6% in the housing cluster and 26.3% in local neighborhood, both regions felt and described togetherness or closeness as “somewhat far” (Figure 7).

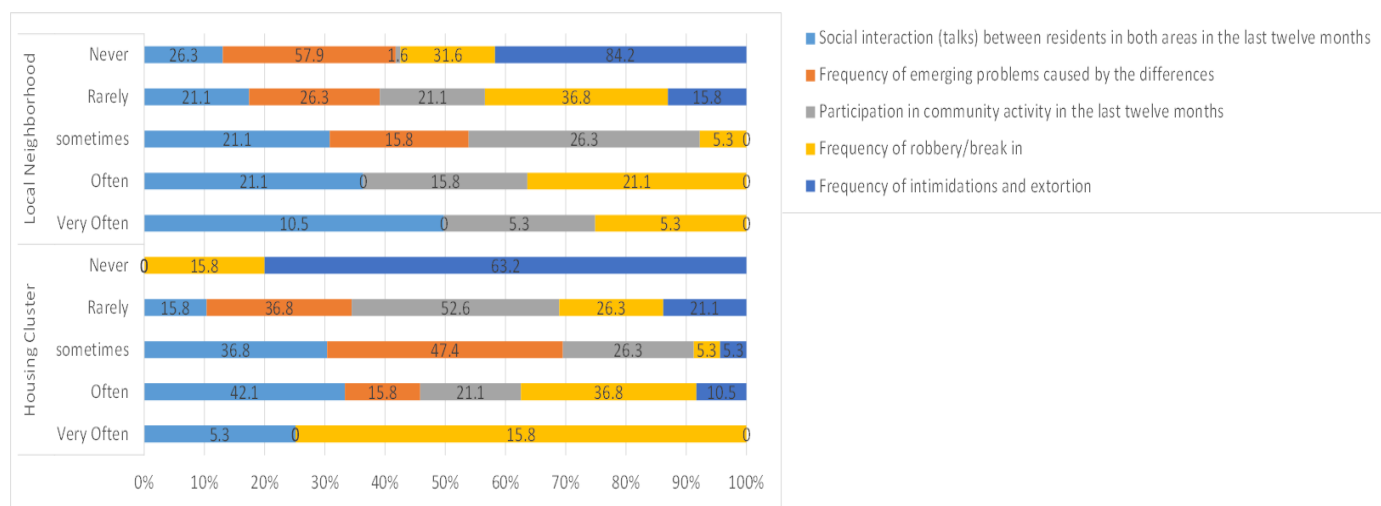


Figure 6. Frequency of Social Interaction, Emerging Problems, Participation in Community and Intimidation Incident

At Villa Dago Pamulang for example, social interaction was more artificial than conducted in sustainable patterns. The forms of interaction are usually done at Eid al-Adha where residents in the housing cluster distribute sacrificial coupon (Qurban). Mr. Subki (39 years of age) stated, one of the causes of the difficulty in interacting with residents in housing cluster is that they are not in the same neighborhood (RT). Neighborhood is divided by blocks in the housing cluster and apart from the area outside in the local neighborhood.

Parallel with it, when I asked about the differences in characteristics, the majority of residents in both areas answered “not big and not small”, although the frequency distribution was different, namely 47.4% in housing cluster and 36.8% in local neighborhood. However, the magnitude of the difference was equally recognized by the residents in both areas, with the frequency distribution of each was 31.6% in housing cluster and 36.8% in local neighborhood. A striking differences was the difference in social status (22%), the difference in education (17%), the difference between the old and new residents (17%) and differences in land ownership (11%) (Figure 7).

Residents in housing cluster recognized that the differences “sometimes” create problems. The distribution frequency reached 47.4%. In contrast, residents in the local neighborhood considered that the differences “never” create some problems with the distribution frequency of 57.9%. Therefore, it could be presumed that there was an uncomfortable feeling that arose from the residents in housing cluster, whereas the residents in local neighborhood assumed that the differences were not a problem that must be contested (Figure 8).

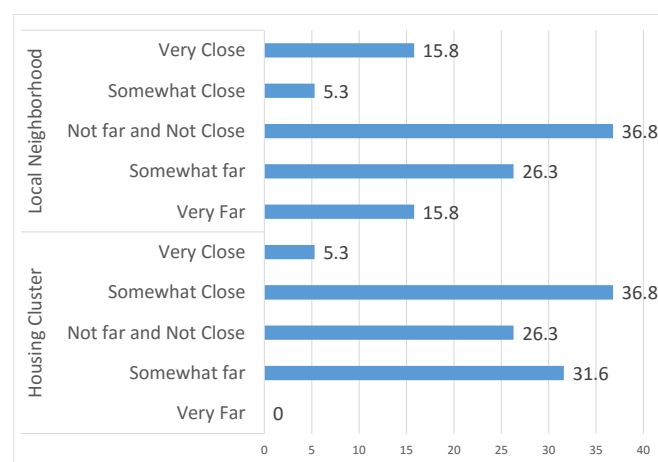


Figure 7: Sense of Collectiveness

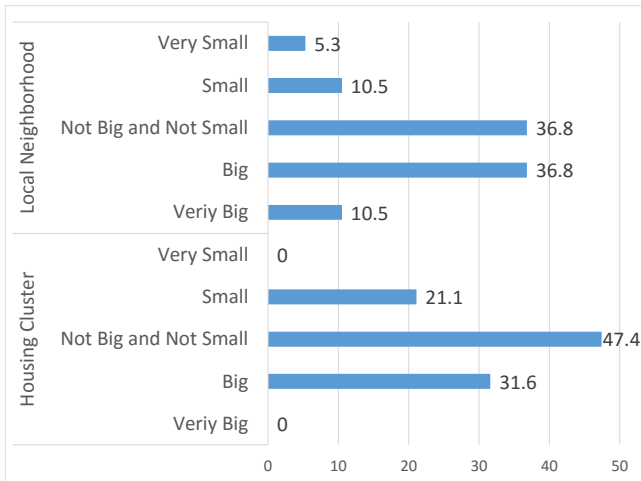


Figure 8: Characteristic differences between Both Areas

The residents in both areas are relatively “rarely” and even “never” participated in the community activities. Residents in the housing cluster, as many as 52.6% of respondents answered “rarely” as much as 31.6% of the local neighborhood replied “never”. These empirical facts showed that residents in the housing cluster was more active in their village communities than residents in the local neighborhood. Community activities most widely followed by both areas were the mutual assistance in cleaning the environment (31%), monthly/weekly recitation (23%), community patrolling (13%), regular social gathering (10%), the PKK (8%) and community organizations (2%) (Figure 6).

Although all respondents in both areas answered their environment was “very peaceful”, but there were high differences in the frequency distribution, namely 31.6% in housing cluster and 84.2% in local neighborhood. The differences in the frequency distribution showed that there were differences in sense of security and peace in the areas. Of the frequency distribution, it could be stated that the sense of security and peace felt by the residents in local residents was greater than resident’s feeling in housing cluster. On the other hand, it could be stated that the residents in housing cluster were more insecure to their community (Figure 9).

Therefore, in the housing cluster, the frequency of robbery and break events were said to be very “often” occurred with a frequency distribution reached 36.8% of the total respondents, while in the local neighborhood, respondents answered “rarely” (36.8%) and even “never” (31.6%). This was an indication which strengthen the empirical facts about the feeling of security and peace of residents in housing cluster that was lower than a feeling of security of residents in local neighborhood (Figure 6). According to respondents,

frequency of robbery in last year reached 2-3 times. The type of goods that were often robbed were motor cycles (49%), mobile phones (12%), cars (9%), money (6%), bicycles (3%) and laptops (3%). The frequency of robbery was higher in housing cluster rather than local neighborhood, so the actual incidence of loss of motor cycle and various other items were more common for people living in the housing cluster.

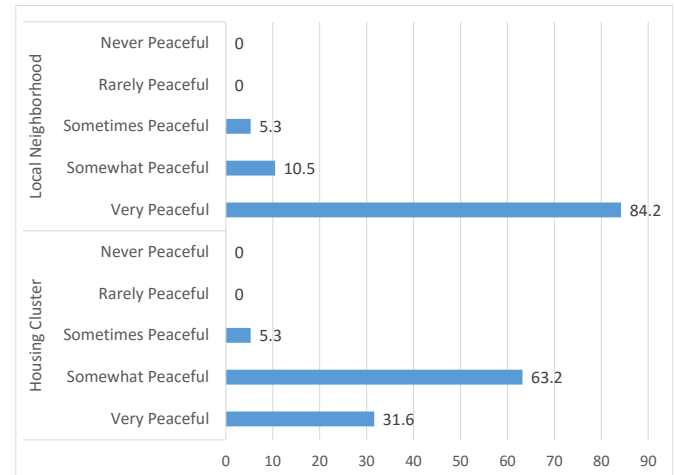


Figure 9: Neighborhood Security

In general, the majority of respondents believed that the incidents of assault, extortion or intimidation was “never” happened in both areas. As many as 63.2% of residents in housing cluster answered “never”. The same thing was felt by residents in local neighborhood, i.e 84.2% of them said “never” felt assaulted, extorted or intimidated. However, as many as 10.5% of respondents in housing cluster “often” attacked, extorted or intimidated. None of the respondents in local neighborhood answered about this. This supported previous empirical fact that the conditions of security and peace in housing cluster were even lower than in local neighborhood.

Descriptive explanation above was confirmed by Mann Whitney Test that residents in both areas were not identical/dissimilar (Table 2). The table shows the value of significance (P-value) test result was worth 0.0074 ($P\text{-value} < \alpha$). The identicalness/dissimilarity was the one that will give rise to potential conflicts between them. In an interview with Mr. Subki (35 years of age) and Mrs. Yoyoh (47 years of age) in the Villa Dago Residential and Mrs. Cucum (28 years of age) in the Villa Dago Tol Residential, information was gathered, which in essence is:

“There is a huge difference on the characters between the residents in housing cluster with local neighborhood. However, those differences do not cause any

problems that can lead to a split between us. Residents in local neighborhood usually are not confident to interact with the residents in housing cluster because there are differences in many factors, including social status and income level”.

Table 2. Mann Whitney Test

	N	Median
Housing Cluster	44	22.00
Local Neighborhood	44	3.50

Point estimate for ETA1-ETA2 is 18.50

95.3 Percent CI for ETA1-ETA2 is (0.24,22.50)
 $W = 462.5$
 Test of ETA1 = ETA2 vs ETA1 not = ETA2 is significant at 0.0076
 (adjusted for ties)

Source: Data proceeded

Therefore, not long after Yandri's study (2014) in South Tangerang Municipality, there was a social movement which was done by a group of residents in local neighborhood. Figure 10 below was an empirical illustration taken in the September 2014.



Source: Author (2014)

Figure 10.

Empirical Illustration of Confrontation Conflict Inter Housing Areas

In Figure 10.1a and 1c, a group of people showed dissatisfaction by sticking a banner on one of the walls of the house which divided a small street that connects housing cluster area with local neighborhood. The sentence listed on the banner was “closing the road means beating the drums of war with the local residents” (10.1a), while banners in Figure 1c said “we are local residents will be ready for war if the road is closed”. What was even more appalling is when a group of local residents deconstructed road. The road was one of the shortest and fastest way for housing cluster residents to get to the main road and to the central city (10.1b).

Therefore, conflicts in natural resources, including land, was characterized by two major types of conflict, namely conflict of access-to and use-off. The pictures above showed that there has been a conflict caused by the lack of local residents' access to the access of road. Eminently, an important message behind the demonstrations were local residents wanted the territory for which they occupy is not closed by the name of any interests of a particular community.

In addition, in many theoretical and empirical research, conflicts can arise because there are goals that are inconsistent or not equal (Fisher *et al.*, 2001). In an economic perspective, the causes of conflict include imbalanced development and inequality economic distribution, position or title imbalance (Hendrajaya *et al.*, 2010). Fisher *et al.*, (2001) said, the conflict consists of five stages, namely: (1) pre-conflict; (2) confrontation; (3) crisis; (4) impact; and (5) post-conflict.

Table 3. Conflict Analysis

Identification	Conflict Analysis
Stage of conflict	Confrontation
Type of conflict	Open
Criteria for conflict	- Interest conflict - Conflict of access-to - Conflict of use-off
Involved of stakeholder	Residents
Conflict solution	not yet identified

Based on those stages, residential conflict in South Tangerang Municipality has indeed entered a stage of confrontation. Anwar (2002) argued, it is necessary to identify: (1) type of conflict; (2) criteria for conflict; (3) stakeholders related to the conflict; (4) mapping of the conflict; (5) an alternative solution to the conflict. Table 3 is a summary analysis of the conflict based Hendrajaya *et al*, (2010) and Anwar (2002).

Systemic Segregation

Another problem is the massive development of small residential area, which ranges from 1-2.5 acres of land area. Those area could only support 10-15 housing units. For example is a residential area in Menjangan Residence in Pondok Ranji District (Figure 11). This housing cluster is ironically built in the middle of local neighborhood. In a spatial perspective, this housing cluster has been isolated by the surrounding local neighborhood. This picture clearly shows why people in housing cluster and local neighborhood often get disharmonized. These findings confirmed and, at the same time, clarified the concept of Leisch's gated community (2002) who explains that the gated community has a security feature of the environment in physical form, such as the use of portals, fences, security guards and CCTV cameras.

Widhyharto (2009), through his studies in Yogyakarta, explained the specific reasons why a gated community can be formed. First, the title of being "exclusive" is often attached to the occupants of a gated community. This exclusive impression appeared because of the dwellers themselves who often feel no need to interact since they are able to accommodate their needs. Second, the need for security and conformability. The residents require high privacy and absence from social activities that deemed unnecessary and take a lot of effort and time. They replaced it by providing funds in a certain amount. Third, the growing solidarity of the residents in the new environment usually also want to create new 'feel' as well. The solidarity model, which they don't like, will be left in the old neighborhood and they will develop new models of solidarity based on their own preferences.

Thus, this paper clarifies lies in differences of the social, economic and political conditions in Indonesia when Leisch (2002) conducted his study. Now, Indonesia has changed where each region can their own administrative proliferation and guaranteed by a number of regulations on decentralization (Act. No. 32/2004, PP. 25/2000, and PP. 38/2007). Moreover, the central government has also issued a number of regulations and changed the paradigm of civil servant

(PNS) service and investment in local permitting process (Act. No. 25/2007, PP. No. 97/2014, Minister of Home Affair No. 26/2006, etc.).



Figure 11. Mejangnan Residence and Its Segregation

In the context of local government role, now South Tangerang Municipality accelerates their economic growth by opening themselves to investors.. Those economic dynamics can be seen from the deregulation process of investment, which the authority has been widely opened. On behalf of the regulation, it is guaranteed by the Local Act. No. 11/2012 on Implementation of Investment. The regulation is certainly driven by the spirit of intensification of own-source revenue (PAD), which aims to increase the portion of local financing. In that context, in my opinion, it indirectly contributes to the creation of gated community in the present form: housing cluster. These findings are parallel with Smigiel (2013) through his research in Sofia by stating that "gated communities in Sofia have been constructed by a powerful group or private stakeholders, they were able produce these segregated landscapes only because of a neo-liberal policy setting whose main policy pillars are deregulation, decentralization, privatization and commodification".

With a small area of housing and located in the middle of local neighborhood, this phenomenon is referred to as spatial and residential segregation (Massey and Denton, 1988 in Huie and Frisbie, 2000). Residential segregation is a measure of social clumping in urban environment. It has different meanings depending on the specific form and structure of the city, and its categories include income, class and race. The effects of segregation on cities are overwhelmingly negative. In particular, socioeconomic segregation limit acces of disenfranchised population groups to infrastructure and job opportunities, while reinforcing rasial and social prejudice.

In Quadros's (n.d) perspective, the pattern of spatial segregation is "natural area, defined by Zorbaugh as a geographical area characterized by physical and cultural individuality, resulting from the impersonal process of competition that would generate spaces of domination from different social group, replicating to the city-level the process which occur in the vegetable world".

The findings of this research were also confirmed and parallel with Feitosa et al. in Quadros (n.d). Although they are "close", but in fact they are "far away". It was proved from the sense of collectiveness between them. This is caused by the absence of a social mechanism participation that can enable them to have opportunity to interact in a social activity. This 'naked' phenomenon occurred in the Menjangan Residence (Figure 11), with the exclusive housing as it almost had no sustained social interaction. The social interaction between them was nothing more than when the occupants purchased a number of retail products in the grocery stores which were located in front of the gate. The case was referred to by Massey and Denton (1988) as the isolation, concentration, centralization and clustering/spatial proximity.

In the Villa Dago Tol Residential for example, there were no occupants in local neighborhood involved in the activities of residents in housing cluster. Mrs. Cucum (28 years of age) informed, in housing cluster there is regular calisthenics every Saturday and Sunday morning, but the activity is not followed by occupants

in local neighborhood. In addition, in the housing cluster there is also a women routine activities, such as Quran recitation. That was the only activity that, according to Mrs. Cucum, the occupants in local neighborhood participate in.

Figure 12 shows that local neighborhood was increasingly isolated or segregated as oppressed by the housing cluster. Local neighborhood was among the housing cluster area. At the time of observation (2013), a bridge between the local neighborhood and Villa Dago Tol Residential was only connected by a wood and bamboo bridge. According to Mrs. Cucum, no occupants in Villa Dago Tol Residential contributed to the construction of the bridge, as well as money, materials, and/or involved when it constructed first, although the bridge was often bypassed by the residents of Villa Dago Toll Residential.

Now, the question is why could spatial and residential segregation occur? Housing cluster were formed driven by high demand housing as a result of migration and urbanization and/or suburbanization.

As a result, they moved and bought a house in the suburbs, and the type of house they purchased was a housing cluster. At the end, they were then segregated. This segregation cases generally occurred in large clusters of housing area, ranging from 0.1 to 2.5 acres.



Figure 12. Local Neighborhood Segregation

Meanwhile, involuntary segregation occurred not because of their own will, but due to lack of choice. This form of segregation was what seems to happen to residents in local neighborhood. They were segregated because there was no other choice for them but to stay with their families for generations in the neighborhood adjacent to the different social classes. It is dissimilarity of the dimensions of residential segregation called by Massey and Denton (1988).

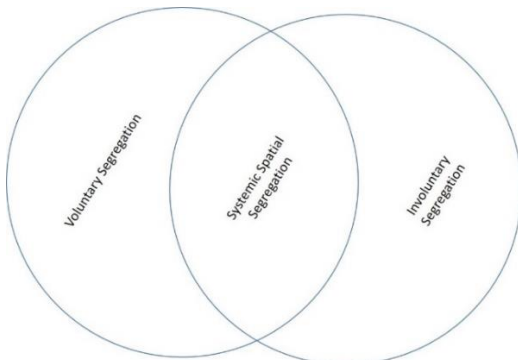


Figure 13. Systemic Spatial Segregation

In the context of Indonesia suburb, it seemed rather difficult for us to classify each housing area into both types of segregation. This is due to the implied meaning that segregation in this country was not only happened in the residents in local neighborhood, but also the residents in the housing cluster. Residential segregation in Indonesia occurred in both areas, but the intensity levels of segregation was different. The above explanation, the segregation was actually created not because of the wish of residents—both traditional housing and modern housing residents—but created by and for an economic and social system development policy. In that context, the authors assumed that there seems to be a type of segregation that was in between both types of residential segregation. That is because the type of residential segregation in the suburb of Indonesia cannot be entirely categorized into both pattern of segregation as mentioned by Massey and Denton (1988); the authors proposed a form of segregation that was referred to as systemic segregation. Of course, the validity of this new concept of residential segregation needed to be tested further in a variety of empirical research in other countries.

CONCLUSION

The important findings of this paper is that there is dissimilarity between people in the housing cluster with people in the local neighborhood, and it has even shown a confrontational conflict. The conflict showed by the banner which content a protest to people of housing cluster. The issues of conflict revolve around conflict of

interest, access-to and use-off to the road. At the same time, people in both regions are segregated. Segregation in Indonesia occurred in both areas with different tension. However, voluntary and involuntary segregation could not fully answer the case of residential segregation in the suburb of this country. Here, segregation is created not because of the preferences of people in both areas, but it was created by and for an economic and social system of development policy. Therefore, the pattern of segregation is more accurately described as systemic spatial segregation.

But one thing is clear, that we need to create a social mechanism which can integrate both areas. The social mechanism can be designed with simple activities such as monthly recitation engagement between residents in both areas, social gatherings and meetings between residents and other activities. This activity can be initiated by the local government at the grassroots level as Chairman of Neighborhood (RT or RW). In addition, the need to change the policy of modern housing development patterns in the South Tangerang Municipality and thus at the national level. Especially in South Tangerang Municipality, the policy changes can be initiated from the reformulation of local act deregulation. At the national level, it needs to reform a number of regulations in order to create social harmony between both areas.

ACKNOWLEDGEMENT

The author would like to thank the Dirjen. of Higher Education of Cultural & Education Ministry of Republic of Indonesia for financial support of the research, Contract Number: DIPA-023.04.1.673453/2013, date: 5 December 2012.

REFERENCES

- Ahmadi, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Fisik Area Pinggiran Kota Berdasarkan Aspek Persepsi Bermukim pada Kota Sengkang Provinsi Sulawesi Selatan*, Master Thesis, Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Anwar, Effendi, 2002, *Pengantar Analisis Konflik*, Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Riyani, Aris, 2003, *Perilaku Pengembang Kecil dalam Keputusan Investasi di Bandung Raya*, Magister Thesis, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung, Bandung.

- Ehwan, Yeri, 2004, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Perumahan di Kota Bandar Lampung*, Master Thesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Eriyanto, 2001, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, LKiS, Yogyakarta.
- Asteriani, Febby, 2010, Preferensi Penghuni Perumahan di Kota Pekanbaru dalam Menentukan Lokasi Perumahan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 12(1), 77-91.
- Fisher S., et al., 2001, *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, (terj), Jakarta: The British Council.
- Gunawan, Ganda Setya, 2011, Eksklusifitas Golongan dan Konflik Sosial, *Jurnal Dialektika*, Edisi 08 Tahun 2011, 1-4.
- Güzey, Özlem, 2014, Neoliberal Urbanism Restructuring the City of Ankara: Gated Communities as a New Life Style in Suburban Settlement, *Cities*, 36(2014), 93-106.
- Handayani, Asri, Wening, 2009, Pola Atribut yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen dalam Membeli Rumah di Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta Tahun 2008, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 91-105.
- Handoko, J.P.S., (2011), *Pertumbuhan Permukiman Gated Community di Yogyakarta: Perumahan-Perumahan di Kabupaten Sleman*, Yogyakarta, Proceeding Seminar Nasional SCAN#2 Lifestyle and Architecture.
- Hapsariniaty, Alia, Widyarini, et al., 2013, Comparative Analysis of Choosing to Live in Gated Communities: A Case Study of Bandung Metropolitan Area, *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 101 (2013), 394-403.
- Huie, S.A.B., and Frisbie W.P., 2000, The Components of Density and the Dimensions of Residential Segregation, *Population Research and Policy Review*, 19: 505-524.
- Jorgensen, Marriane, & Phillips, L., 2002, *Discourse Analysis as Theory and Method*, Sage Publication, London.
- Kerr, Jessica., 2008, *Di Belakang Pagar Perumahan: Kampung-Kampung Golongan Menengah di Malang, Jawa Timur*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Kusumawardhani, Agnes, 2004, *Analisis Preferensi Konsumen terhadap Multiatribut Produk Hunian, Studi Kasus pada Calon Konsumen Perumahan Telaga Golf Sawangan*, Master Thesis, Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Leicsh, Herald, 2002, Gated Communities in Indonesia, *Cities*, Vol. 19, No. 5, 341-350.
- Liebersohn, Stanley, & Carter, D.K., (1982), A Model for Inferring the Voluntary and Involuntary Causes of Residential Segregation, *Demography*, November 1982, Vol. 19, Issue 4: 511-526.
- Nurhadi, Imam, 2004, *Preferensi Masyarakat dalam Memilih Perumahan Perkotaan di Kota Tangerang Studi Kasus Perumahan Banjar Wijaya, Poris Indah dan Perumnas IV*, Master Thesis, Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prasojo, Eko, & Holidin, Defny., (2012), Rethinking Problematic Governance of Local Government in New Proliferation Regions and Their Impacts, *International Journal of Administrative Science & Organization*, Vol. 19, Number 2, May 2012, 149-152.
- Pratiwi, Niken. B., dan Elgifienda, Pratiwi, Tiara, 2008, Tatkalat Kampung Kota Bicara Konflik-Harmonisasi, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 12, No. 1 Juli 2008, 41-57.
- Quadros, Carlos., et al, (n.d), *A Study on Socio-Spatial Segregation Models Based on Multi-Agent System*, unduh 14 Maret 2014, <http://www.ppgia.pucpr.br/~enia/anais/bwss/artigos/104969.pdf>
- Rodak, Ruth., & Meyer, Michael, 2009, *Critical Discourse Analysis: History, Agenda, Theory and Methodology*, 2nd Edition, Sage, London.
- Rudiawan, Rudy, 2008, *Kajian Pengembangan Wilayah dan Implikasinya terhadap Bisnis dan Investasi Properti di Kabupaten Bandung Barat*, Master Tesis, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Santoso, Purwo, 2007, *Proliferation of Local Governments in Indonesia: Identity Politics within a Trouble Nation State*, Seminar Paper, International Convention of Asia Scholars, Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia, 2-5 August 2007.
- Sjahrir, Bambang, Suharnoko., et.al, 2014, *Administrative Overspending in Indonesian Districts: The Role of Local Politics*, *World Development*, Volume 59, July 2014, 166-183
- Smigiel, Christian, 2013, The Production of Segregated Urban Landscape: A Critical Analysis of Gated Communities in Sofia, *Cities* 35(2013), 125-135.
- Sueca, Ngakan, Putu, dan Fitriani, L.R.D., 2012, *Profile Gated Community di Denpasar*, Prosing Temu Ilmiah IPLBI.
- Wheler, Christopher, H., dan Jeunesse, La., E.A., (2007), *Neighborhood Income Inequality*, Working Paper 2006-039B, Federal Reserve Bank of St. Louis, St. Louis, unduh 13 Februari 2013, <https://research.stlouisfed.org/wp/2006/2006-039.pdf>.

- Widhyharto, Derajat, S., 2009, Komunitas Berpagar: Antara Inovasi Sosial dan Ketegangan Sosial (Studi Kasus Komunitas Berpagar di Provinsi DI. Yogyakarta), *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 13, No. 2, November 2009, 204-230.
- Yandri, Pitri, 2014, Residential Area and Income Inequality in Suburban Indonesia, *Indonesian Journal of Geography*, Vol. 45, No. 1, June 2014, 69-77.

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

GLOBALISASI MIGRASI DAN PERAN DIASPORA: Suatu Kajian Pustaka

GLOBALIZATION OF MIGRATION AND THE ROLE OF DIASPORA: *A Literature Review*

Haning Romdiati

Peneliti, Pusat Penelitian Kependudukan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Korespondensi Penulis: hromdiati@yahoo.com

Abstract

This paper aims to understand how is the globalization of migration and the role of the diaspora to their country of origin. Though it has remained largely untested, it is commonly assumed that international migration has accelerated as part of globalization processes. The broad trend of the globalization of migration assumes to be one of contributing factor to establishment and engagement of diaspora. Globalization of Migration measured by an increase in stock and widening in geographical scope of international migration may occur mainly due revolution of information, communication, and transportation that have significantly reduced the cost of migration. Such situation not only increases in the volume of migration but also generates the shift in global migration pattern. The change to new destination followed by the rise of migration are more likely to connect immigrants into one big community or to join to existing diaspora to ensure their transnational life and also to keep well and strong connection with their homeland. Diaspora that has been long established affects development in countries of origin. Such participation in development is not only in remittances, but also in building bridges between countries of origin and destination which convey in economic activity, transfers of, skills, technological development, and cultural enrichment.

Keywords: Globalization, Migration, Diaspora

Abstrak

Tulisan ini mencoba memahami fenomena globalisasi dan konteksnya terhadap pembentukan serta peran diaspora di negara asal. Meskipun belum ada pembuktian yang jelas, tetapi sering diasumsikan bahwa ada percepatan arus migrasi internasional sebagai bagian dari proses globalisasi. Percepatan ini dapat dilihat sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pembentukan dan penguatan diaspora. Globalisasi migrasi yang diukur dari peningkatan volume dan perluasan destinasi migrasi internasional, mungkin terjadi sebagai akibat revolusi teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah mengurangi biaya migrasi secara signifikan. Kondisi seperti ini tidak hanya meningkatkan volume migrasi internasional, tetapi juga menimbulkan pergeseran pola migrasi global. Perubahan destinasi baru yang diikuti dengan peningkatan volume migrasi memungkinkan imigran membentuk suatu komunitas atau bergabung dengan komunitas diaspora yang sudah ada, dalam upaya menjamin kehidupan transnasional mereka yang sekaligus menjaga hubungan yang kuat dengan negara asal. Diaspora yang sudah lama terbentuk dapat berkontribusi terhadap pembangunan negara asal. Partisipasi dalam pembangunan bukan hanya dalam bentuk remitansi, tetapi juga membangun jembatan antara negara asal dan tujuan dalam bidang ekonomi, transfer ketrampilan, teknologi, dan budaya.

Kata Kunci : Globalisasi, Migrasi, Diaspora

PENDAHULUAN

Globalisasi dalam tulisan ini merujuk proses globalisasi yang terjadi sebagai akibat revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan transportasi sejak tahun 1990-an. Globalisasi sering dipahami sebagai proses menipisnya batas-batas negara, karena dunia semakin terkoneksi/terintegrasi dan interdependensi antar negara semakin tinggi (Li, 2008). Indikator kunci dari globalisasi adalah peningkatan yang cepat dalam segala perpindahan/aliran, dimulai dari aliran uang dan perdagangan, tetapi juga nilai-nilai demokrasi, produk kultural dan media, dan yang paling penting dalam konteks migrasi penduduk adalah aliran orang (Castles dkk, 2014:33). Globalisasi membuka akses sarana-prasarana transportasi yang seluas-luasnya, sehingga memudahkan penduduk untuk pergi wilayah yang lebih jauh dari sebelumnya dengan biaya yang terjangkau. Revolusi teknologi dan transportasi tersebut telah menurunkan biaya migrasi secara signifikan sehingga mempermudah dan mempercepat migrasi penduduk hingga wilayah yang jauh (Castells, 1996 dalam Czaika dan de Haas, 2014).

Negara-negara maju di semua kawasan regional merupakan negara tujuan migran internasional. Data bersumber dari UN-Population Division tahun 2013 menunjukkan, jumlah migran internasional di dunia sebanyak 234,5 juta. Lebih dari separuh (58,56 persen) migran tersebut tinggal dan menetap di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Amerika bagian Utara dan negara-negara di Eropa. Sumber data yang sama juga mencatat, kira-kira 30,6 persen migran internasional berada di negara-negara Asia, terutama di Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Mudah dipahami karena dua negara ini merupakan negara penghasil minyak yang bukan hanya menjadi tempat tujuan tenaga kerja migran terampil, tetapi juga tenaga kerja semi/kurang dan tidak terampil. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah salah satu contoh tenaga kerja migran kurang terampil di Saudi Arabia. Namun, sebaran destinasi TKI telah menunjukkan pergeseran dalam beberapa tahun terakhir, yaitu dari kawasan Timur Tengah ke negara-negara di Asia Timur, seperti Taiwan dan Hongkong (Noveria dkk, 2011; Raharto dkk, 2013). Pola ini sejalan dengan yang terjadi di tingkat dunia, misalnya pergeseran migrasi orang Afrika dari Perancis dan United Kingdom (UK) ke negara-negara Eropa bagian timur, Timur Tengah, dan Asia (Czaika dan de Haas, 2014: 284).

Pergerakan migrasi yang semakin mendunia disebut dengan globalisasi migrasi (Castle dkk, 2014: 16). Globalisasi migrasi dicirikan oleh semakin banyak

negara yang dipengaruhi secara signifikan oleh migrasi internasional. Lebih lanjut dikemukakan bahwa negara-negara penerima imigran semakin diwarnai oleh migran dari berbagai negara dengan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya yang semakin beragam. Di negara tujuan, sebagian imigran membentuk jaringan dengan sesama imigran maupun negara asal dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejahtera ekonomi, sosial, kultural, dan politik, dan menjalani kehidupan transnasional. Komunitas imigran ini merupakan akar/cikal bakal dari diaspora.

Belum ada pengertian universal yang diterima secara luas tentang diaspora. Istilah diaspora sering dipakai untuk menandakan fenomena yang berbeda-beda bergantung pada kepentingan dan fokus kajian. Dalam kajian migrasi, IOM dan MPI (2013) mengartikan diaspora sebagai “emigran dan keturunannya yang tinggal di luar negara tempat lahir atau nenek moyangnya, tetapi mereka tetap mempertahankan hubungan sentimental dan material dengan negara asalnya”. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah diaspora dipastikan lebih banyak dari jumlah migran internasional.

Sejumlah kajian migrasi dan diaspora menyimpulkan bahwa migrasi internasional yang terjadi pada era globalisasi bukan hanya dapat memperluas sebaran diaspora, tetapi juga dapat memperkuat eksistensi mereka. Van Hear (1988) mengemukakan, salah satu hasil proses globalisasi adalah peningkatan interkoneksi diaspora. Mereka dengan mudah dihubungkan dengan jaringan informasi dan komunikasi untuk saling mengenal dan kemudian membentuk komunitas-komunitas yang cakupan geografisnya semakin meluas yang pada akhirnya berupaya untuk memperkuat eksistensi diaspora. Memperjuangkan kewarga-negara ganda (dwi kewarganegaraan) sering diupayakan oleh diaspora untuk memperkuat eksistensi mereka dalam menjalani kehidupan transnasional, yaitu kehidupan yang berorientasi pada lebih dari satu negara (Santoso, 2014). Eksistensi lain dari diaspora adalah terkait dengan peran mereka dalam mewujudkan sebuah simbiosis yang menguntungkan bagi negara tujuan maupun negara asal. Beberapa contoh negara yang dinilai berhasil memetik keuntungan dari keberadaan diaspora adalah Cina, India, dan Filipina (Lever-Tracy et al, 1996 dalam Lucal, 2001; CODEV et al, 2013, Tejada et al 2014 dalam Siddiqui dan Tejada, 2014; Garchitorena, 2007; MPI, 2014). Selain negara asal, keberadaan diaspora juga memberi manfaat positif bagi negara penerima (IOM, 2009; MPI, 2012; Nathan, 2013). Tulisan ini mencoba membahas globalisasi migrasi dalam konteksnya dengan

penguatan diaspora. Bahasan berdasar kajian literatur dan data sekunder tentang migrasi internasional. Analisis tentang arah dan kecenderungan/tren migrasi internasional terkini dilakukan untuk mengetahui akar diaspora dan penguatan peran mereka. Penguatan peran diaspora yang dibahas dalam tulisan ini berfokus pada kebutuhan diaspora dan kontribusinya terhadap negara asal.

PENINGKATAN JUMLAH DAN PERSEBARAN MIGRAN INTERNASIONAL: INDIKATOR GLOBALISASI MIGRASI

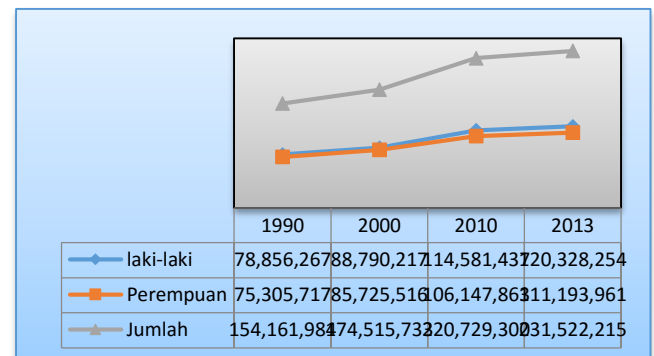
Migrasi internasional telah berlangsung lama sebelum proses globalisasi, tetapi volume, intensitas, ruang lingkup, dan kompleksitas migrasi dalam era globalisasi belum pernah terjadi sebelumnya (Li, 2008; King, 2012; Engbersen, 2012). Tingkat migrasi internasional (jumlah orang yang tinggal di negara yang bukan negara tempat lahir terhadap total penduduk dunia) pada tahun 1980 sebesar 2,2 persen (*United Nation-UN-Population Division*, 2004). Angka tersebut naik menjadi 3,2 persen pada tahun 2010 (*UN- Population Division*, 2014). Sebagian pihak menilai bahwa tingkat migrasi yang rendah tersebut menunjukkan belum adanya peran besar globalisasi terhadap proses migrasi internasional (Wickramasekara, 2011). Namun perlu disadari bahwa data migrasi internasional yang akurat tidak mudah diperoleh. Hal ini terutama karena hanya sedikit negara yang memiliki catatan arus migrasi masuk dan keluar dengan baik. Jumlah migran internasional tersebut belum termasuk migran non reguler/permanen (*irregular migrants*) yang pada umumnya terdiri dari tenaga kerja migran yang masuk ke negara tujuan secara ilegal, sehingga tidak tercatat dalam statistik di negara asal maupun tujuan. Dengan demikian, besar kemungkinan proporsi migran internasional terhadap jumlah penduduk dunia lebih tinggi dari data yang tersedia.

Merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Castles dkk (2014), globalisasi migrasi dapat diindikasikan dari peningkatan volume dan cakupan negara yang terpengaruh migrasi, baik sebagai negara penerima maupun pengirim, atau bahkan ke duanya. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan teori “sistem migrasi”, dimana aliran migran (juga ide, barang, dan modal) ke satu arah cenderung menghasilkan aliran-aliran balik (*counterflows*) migrasi dalam jangka menengah dan panjang (Czaika dan de Hass, 2014). Dalam konteks ini, maka globalisasi migrasi dapat digambarkan dari peningkatan tren migrasi dan persebaran migran internasional.

(a) Tren jumlah migran internasional

Tren peningkatan jumlah migran internasional dapat digambarkan dari data *UN-Population Division*. Pada gambar 1 terlihat, kenaikan jumlah migran internasional selama periode 2010-2013 sebesar 9,93 persen, atau bertambah 3,60 juta per tahun (*UN-Population Division*, 2013). Peningkatan paling tinggi terjadi antara tahun 2000 dan 2010 (gambar 1). Selama periode tersebut, jumlah migran internasional rata-rata bertambah 4,62 juta per tahun. Angka ini lebih tinggi daripada pertambahan tahunan satu dekade sebelumnya (1990-2000) yang hanya 2,03 juta per tahun. Tren kenaikan volume/stok migran internasional tersebut bukan saja karena revolusi TIK dan transportasi di era global, tetapi juga karena pengaruh membaiknya pengetahuan dan tingkat pendidikan, serta pendapatan yang dapat meningkatkan kapabilitas dan aspirasi untuk bermigrasi (Castles dkk, 2014).

Data tren stok migran internasional juga menunjukkan, jumlah migran internasional laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Demikian pula tren peningkatannya, migran internasional laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan migran perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa feminisasi migrasi internasional yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir masih belum merubah selektivitas migrasi yang selama ini ditemukan dalam kajian migrasi, yakni laki-laki lebih banyak melakukan migrasi dibandingkan perempuan.



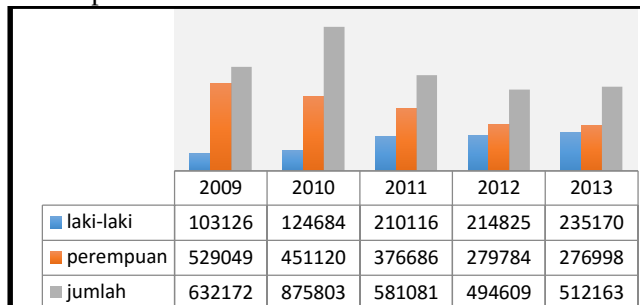
Gambar 1.
Tren Jumlah Migran Internasional Menurut Jenis Kelamin, Tahun 1990-2013

Sumber: UN-Population Division, 2013)

Dalam konteks Indonesia, data jumlah emigran dan imigran tidak tersedia dengan akurat. Satu-satunya sumber data adalah sensus penduduk yang diterbitkan satu kali setiap sepuluh tahun pada tahun yang berakhir dengan angka nol (0), tetapi sumber data ini juga terbatas pada migran internasional permanen seumur hidup. Data emigran internasional yang tercatat resmi dari tahun ke tahun adalah migran

tenaga kerja Indonesia (TKI) yang pindah melalui program pemerintah, yaitu Program Pengiriman dan Penempatan TKI. Padahal selain TKI, ada emigran Indonesia yang tinggal sementara maupun menetap di luar negeri, tetapi masih menjadi warga negara Indonesia (WNI), baik karena bekerja, melanjutkan pendidikan, mengikuti anggota keluarga, maupun alasan lainnya. Namun, karena tidak tersedia data publikasi tentang emigran Indonesia diluar TKI, maka tidak dapat dikemukakan dalam tulisan ini.

Memperhatikan data tren penempatan TKI pada gambar 2, terlihat selama periode lima tahun terakhir (2009-2013) cenderung ada penurunan jumlah TKI. Penurunan yang cukup besar terjadi pada kurun waktu tahun 2011-2012, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini mungkin berkaitan dengan adanya kebijakan moratorium penghentian pengiriman TKI ke Saudi Arabia pada tahun 2010.



Gambar 2:
Tren Penempatan TKI Menurut Jenis Kelamin
Periode 2009-2013

Sumber : BNP2TKI, 2013

Berbeda dengan pola global, TKI perempuan lebih banyak daripada laki-laki (lihat gambar 3). Kondisi ini sejalan dengan ketersediaan kesempatan kerja di sebagai penata laksana rumah tangga maupun perawat orang tua. Saudi Arabia merupakan negara tujuan bagi sebanyak 110.641 TKI perempuan (80,38 persen) pada tahun 2012. Negara-negara lain di Timur Tengah juga menjadi destinasi TKI perempuan, seperti Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Yordania, dan Oman (BNP2TKI, 2013). Data TKI ini hanya mencakup sebagian kecil dari jumlah migran internasional dari Indonesia. Di luar jumlah itu, masih ada migran internasional yang pindah secara perorangan yang dikirim oleh kantor/tempat kerja secara legal dan TKI ilegal. Kenyataan lebih banyaknya TKI perempuan dibanding laki-laki menggambarkan telah terjadi feminisasi migrasi, yaitu fenomena dimana semakin banyak perempuan yang terlibat dalam migrasi sendiri, tidak lagi sebagai migran pengikut. Kondisi ini merupakan salah satu ciri migrasi global (Jureidini dan Moukarbel, 2004; serta Miguez Morais, 2005 yang disetir dari Czaika dan de Haas, 2014).

(b) Persebaran geografis migran internasional

Selain peningkatan tren jumlah migran, globalisasi migrasi juga ditunjukkan oleh semakin banyak negara yang dipengaruhi proses migrasi. Misalnya Thailand yang sebelumnya dikenal sebagai negara pengirim migran internasional (emigran), tetapi pada tahun 2010 berubah status menjadi negara penerima. Data UN menggambarkan hal ini, yaitu imigran di Thailand pada tahun 1990 hanya sekitar 0,53 juta jiwa, naik tajam menjadi 3,22 juta jiwa pada tahun 2010, kemudian meningkat lagi menjadi 3,72 juta pada tahun 2013. Angka ini melebihi imigran di Singapura pada tahun 2013 (2,32 juta), Malaysia (2,47 juta), dan beberapa negara industri baru (*newly industrializing countries*) di kawasan Asia bagian timur, seperti Jepang (2,47 juta jiwa) dan Korea (1,23 juta jiwa) (UN-Population Division, 2013).

Pergeseran negara penerima migran nampak nyata di negara-negara kawasan Timur Tengah, walaupun secara umum terjadi peningkatan hampir di semua negara di kawasan ini. Sebagai contoh, jumlah imigran di Uni Emirat Arab meningkat sangat tajam (460,0 persen dalam periode 1990-2010). Kenaikan ini jauh lebih tinggi dari Saudi Arabia yang dikenal sebagai negara penerima imigran dari negara maju maupun berkembang, yang angkanya sebesar 68,7 persen (UN-Population Division, 2013). Selain dari negara-negara Afrika yang berdekatan dengan kawasan Timur Tengah, negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan merupakan penyumbang imigran di negara-negara Timur Tengah tersebut. Sementara itu, kenaikan imigran di Amerika Serikat sebagai negara tujuan migrasi dari berbagai negara-negara berkembang maupun maju meningkat 90,0 persen, lebih rendah dari Jepang (123,1 persen). Pergeseran destinasi migran internasional tersebut mungkin tidak terlepas dari adanya keterbukaan informasi, kemajuan sarana-prasarana transportasi dan komunikasi yang mempermudah dan mempercepat proses migrasi global.

Dari sisi negara pengirim, India, Meksiko, Federasi Rusia dan Cina termasuk empat negara pada urutan terbesar. Jumlah emigran pada tahun 2013 dari negara ini secara berturut-turut 14,17 juta; 13,21 juta; 10,84 juta, dan 9,34 juta jiwa. Mayoritas emigran dari Meksiko berada di Amerika Serikat. Persebaran emigran India dan Cina meluas ke semua benua, dengan jumlah yang besar di Asia, Eropa, Australia, dan Amerika (terutama negara Amerika Serikat dan Kanada) (lihat Un-Population Division, 2013: tabel 10). Pakistan, Malaysia dan negara-negara di kawasan Timur Tengah (seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab,

Bahrain, Kuwait) adalah beberapa negara destinasi emigran India. Kawasan timur tengah juga menjadi destinasi emigran Cina, juga Hongkong. Persebaran emigran India dan Cina di Eropa, antara lain di Inggris, Perancis, Belanda, Swedia, Federasi Rusia, Hongaria, dan Spanyol. Dilihat perkembangannya, emigran Cina meningkat sebesar 70,1 persen selama kurun waktu 2000-2013, sedang kenaikan emigran India sekitar 74,5 persen. Penyebaran emigran Cina dan India yang meluas hampir ke sebagian besar negara di dunia tersebut mungkin berkaitan dengan keberadaan diaspora dua negara ini yang sudah cukup kuat. Selain memberikan informasi tentang kondisi negara tujuan, diaspora Cina dan India mungkin juga memfasilitasi proses migrasi para emigran dari negara asal mereka.

Tabel 1: Tren Jumlah Emigran Indonesia Menurut Kawasan, Periode 1990-2013 (juta)

Tempat Tujuan	1990	2000	2010	2013
Afrika	0,08	0,15	0,21	0,23
Asia	9,99	16,29	24,09	25,59
Eropa	2,12	2,03	1,90	1,85
Amerika	0,06	0,08	0,18	0,19
Latin dan Karibia				
Amerika bagian utara	6,33	8,86	11,97	12,41
Oseania	0,53	0,74	0,93	0,95
Lainnya	0,17	0,13	0,15	0,14

Sumber: UN-Population Division, 2013

Emigran Indonesia juga menunjukkan pergeseran destinasi, meskipun tidak seluas. Berdasar data UN-Population Division tahun 2014, emigran menuju Eropa cenderung berkurang, sebaliknya ada kenaikan ke Amerika bagian Utara (terutama Amerika Serikat), Afrika, dan negara-negara lain di Asia. Data pada tabel 1 menggambarkan tren dan pergeseran emigran Indonesia di berbagai kawasan dunia.

Negara-negara di Asia masih menjadi negara tujuan utama bagi migran Indonesia. Hal ini terlihat dari tren jumlah emigran Indonesia yang terus meningkat dengan jumlah yang sangat besar. Diantara negara-negara di Asia, Malaysia adalah negara tujuan emigran Indonesia dalam jumlah paling banyak dibanding dengan negara-negara lain, demikian trennya juga meningkat (lihat tabel 2).

Tabel 2: Jumlah emigran Indonesia di beberapa negara Asia, periode 1990-2013 (ribu)

Tempat Tujuan	1990	2000	2010	2013
Malaysia	368,3	801,5	1.003,7	1.051,2
Singapura	21,5	58,5	137,0	152,7
Hongkong	90,2	111,1	131,9	133,0
Korea	0,1	18,8	26,7	34,2
Jepang	3,6	19,3	27,9	29,1
Saudi Arabia	279,2	256,0	353,2	379,6
Uni Emirat	46,6	94,3	299,8	320,7
Kuwait	56,3	57,3	75,8	82,1

Sumber: UN-Population Division, 2013

Kedekatan geografis dan sosio-kultural merupakan faktor yang menyebabkan tingginya emigran Indonesia di daerah ini. Meskipun demikian, destinasi emigran Indonesia juga cenderung meluas.

Selain Malaysia, destinasi emigran Indonesia dengan jumlah banyak adalah Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Saudi Arabia telah menjadi destinasi emigran Indonesia sejak sebelum tahun 1990-an dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun ada penurunan penempatan TKI ke negara ini, yaitu dari 279,633 orang (tahun 2009) menjadi hanya 137,643 orang pada tahun 2011 (BNP2TKI, 2013), tetapi kemungkinan terdapat tenaga kerja ilegal Indonesia yang masih berada di Saudi Arabia. Kemungkinan lain termasuk mereka adalah pada tenaga ahli atau semi terampil yang bekerja di negara tersebut. Sementara itu, Uni Emirat nampaknya mulai menarik banyak emigran Indonesia pada tahun 2010-an, bahkan pada tahun 2013 jumlah emigran Indonesia di negara ini hampir menyamai jumlah mereka yang ada di Saudi Arabia. Pergeseran/perluasan destinasi emigran Indonesia juga menuju ke beberapa negara yang sebelumnya (tahun 1990) hanya diminati oleh sebagian kecil emigran Indonesia, seperti Korea dan Jepang (lihat tabel 2). Kenaikan ini tidak terlepas dari adanya program pemerintah Indonesia untuk mengirim tenaga kerja semi terampil, misalnya melalui program pengiriman magang *government to government*. Pada umumnya mereka bekerja di sektor industri di kedua negara tersebut, serta sektor kesehatan untuk TKI semi terampil ke Jepang. Di tingkat mikro, hasil penelitian Pusat Penelitian Kependudukan (P2K) - LIPI di Jawa Timur maupun Jawa Barat juga memperlihatkan fenomena tren pergeseran negara tujuan tenaga kerja migran Indonesia (Noveria dkk, 2011; Aswatini dkk, 2013).

Tren kenaikan migran internasional dalam jumlah/skala yang diiringi dengan perluasan destinasi migran internasional tersebut menggambarkan adanya

proses globalisasi migrasi. Implikasi dari kenaikan jumlah dan perluasan destinasi migran internasional antara lain adalah memperbesar akar pembentukan diaspora, dan bahkan akan terjadi penguatan eksistensi diaspora yang sudah terbentuk.

DIASPORA DALAM PERSPEKTIF KAJIAN MIGRASI PENDUDUK

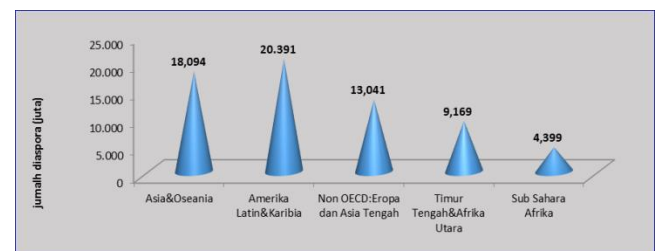
Diaspora memiliki beragam pengertian bergantung pada perspektif kajian. Secara umum diaspora berhubungan dengan tiga kata kunci, yakni kepergian/perpindahan terpaksa, permukiman di beberapa lokasi, dan tanah leluhur mereka. Diaspora pada awalnya hanya dipakai untuk menyebut orang-orang Yahudi yang terusir dari negara asalnya (Wahlbeck, 2002). Pada perkembangannya, diaspora juga dipakai pada komunitas yang terbentuk sebagai akibat pengungsian (*displacement*), misalnya pengungsi orang-orang Cina di Kanada, pengungsi orang-orang Armenia, pengungsi Palestina, dan pengungsi orang-orang Afrika (Clifford 1994; Safran 1991; Shuval 2003 dalam L. Anteby- Yemini et W. Berthomiere 2005; Li, 2010). Beberapa contoh lain adalah pengungsian orang Cina, pengungsian orang Indonesia (Maluku) di Belanda pada tahun 1952 karena menolak bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta orang Jawa yang dipindahkan dengan paksa untuk menjadi tenaga kerja kasar (kuli) oleh pemerintah penjajah Belanda ke Suriname pada periode tahun 1890-1916 (Mardiani, 2014).

Pengertian pengungsi dalam studi migrasi dikelompokkan dalam migrasi terpaksa (*forced migration*). Dengan demikian secara historis, terbentuknya diaspora diawali dengan adanya migrasi terpaksa. Pada perkembangan selanjutnya, yaitu ketika migrasi sukarela (*voluntary migration*) semakin banyak dilakukan oleh berbagai bangsa di dunia, tipologi diaspora juga semakin meluas. Diaspora tidak lagi hanya merujuk pada komunitas yang terpaksa pergi/pindah dari negara asalnya dan keturunan mereka, tetapi juga termasuk mereka yang tinggal di negara tujuan migrasi karena suatu pilihan (sukarela) yang didasari oleh beragam alasan: pekerjaan, pendidikan, afiliasi (keluarga), kultural, politik, dan lainnya. Migrasi internasional secara sukarela tersebut mencakup pindah permanen dan sementara (misalnya tenaga kerja yang terikat kontrak dalam jangka waktu tertentu, para diplomat dan anggota keluarga mereka, pelajar/mahasiswa). Dengan demikian, diaspora dalam kajian migrasi mencakup semua emigran dan anak keturunan mereka yang masih mempertahankan ikatan komunitas dengan negara asal atau leluhur. Konsep ini

memberikan gambaran bahwa jumlah migrasi diaspora jauh lebih besar dari jumlah migran internasional, baik permanen maupun sementara/temporer.

Jumlah diaspora sering hanya dilihat dari banyaknya migran internasional di suatu negara/kawasan. Data ini tidak hanya mencakup migran seumur hidup, yaitu mereka yang lahir dari negara yang berbeda dengan negara tempat tinggal saat pendataan, tetapi tidak memasukkan data seseorang yang lahir di negara tempat pendataan namun memiliki orang tua atau leluhur dari negara lain. Kondisi ini merupakan kelemahan penting untuk analisa diaspora dan berbagai konsekuensi yang ditimbulkannya, baik di negara tujuan maupun asal/asal leluhur.

Sebaran diaspora menurut negara dapat diperoleh dari *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) bekerja sama dengan *Agence Francaise de Development* (AFD), tetapi sumber data ini hanya terbatas pada diaspora di negara-negara anggota organisasi tersebut (OECD, 2012)¹. Berdasar sumber data ini diketahui jumlah diaspora pada tahun 2008 di 31 negara anggota² OECD sebanyak 124,89 jiwa (OECD, 2012:19). Di antara mereka, hampir separuhnya (58,78 juta jiwa) adalah diaspora yang berasal dari negara-negara OECD. Tiga kawasan dengan jumlah diaspora yang terbesar adalah; (a) Asia dan Oseania, (b) Amerika Latin dan Karibia, serta (c) kawasan Eropa dan Asia Tengah yang bukan anggota OECD (lihat gambar 5)



Gambar 5:
Diaspora Menurut Negara Tujuan, Tahun 2013

Sumber: OECD dan AFD, 2012.

Diaspora Amerika Latin di negara-negara OECD didominasi oleh diaspora Meksiko, yaitu mencapai 99 persen. Diaspora Meksiko di Amerika Serikat (AS) pada tahun 2011 mencapai 25 juta (ICD, 2014 yang menyeter Lopez dkk, 2013). Data ini sejalan dengan hasil Survei Masyarakat Amerika pada tahun 2011, dimana diaspora Meksiko merupakan negara yang

¹ Diaspora menurut OECD (2012) meliputi migran dan anak-anak mereka yang berusia 15 tahun ke atas.

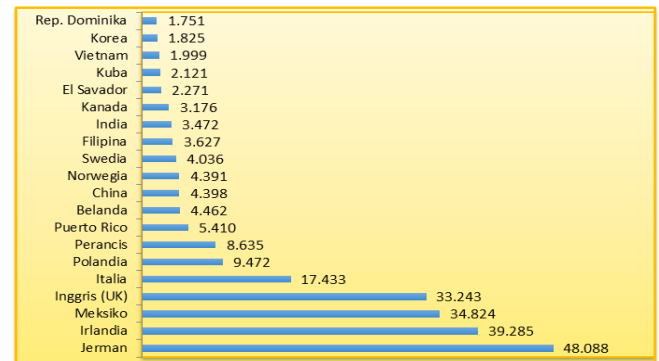
² Pada tahun 2010 ada tiga (3) negara yang masuk menjadi anggota OECD, yaitu Israel, Estonia, dan Chile (oecd.org, 2014)

berada pada urutan ke-3 terbanyak di Amerika Serikat, setelah Jerman dan Irlandia (gambar 6). Selanjutnya pada gambar 6 terlihat, diaspora dari negara-negara Eropa (Jerman, Irlandia, Inggris, Italia, Polandia, Perancis, Belanda, Norwegia, dan Swedia) termasuk dalam 9 besar dari 15 kelompok diaspora terbesar di Amerika Serikat. Banyaknya diaspora Eropa di AS antara lain dipengaruhi oleh besarnya arus emigran dari yang terjadi sejak awal abad 20 (Batalova, 2014). Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar diaspora Eropa adalah anak keturunan emigran yang merupakan generasi pertama, kedua, dan bahkan ketiga yang lahir di Amerika Serikat. Sebagai contoh, di antara diaspora Jerman, hanya ada satu (1) anggota diaspora yang lahir di luar Amerika Serikat, demikian pula dari semua diaspora Polandia, hanya kira-kira 5 persen yang lahir di luar Amerika Serikat (Batalova, 2014).

Kondisi berbeda ditemukan pada diaspora Asia yang meliputi China, Filipina, India, Vietnam, dan Korea. Kecuali Cina (42 persen keturunan Cina-Amerika), antara separuh hingga dua pertiga diaspora Asia terdiri dari generasi pertama imigran, masing-masing 50 persen keturunan Filipina-Amerika, 53 persen India-Amerika, 63 persen Vietnam-Amerika, dan 59 persen Korea-Amerika (Batalova, 2014). Memperhatikan data tersebut, persentase diaspora Cina di Amerika Serikat adalah terendah dibanding diaspora negara-negara Asia lain. Namun, dari sisi jumlah keseluruhan, diaspora Cina termasuk urutan ke sepuluh terbesar diaspora di Amerika Serikat. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih dari separuh diaspora Cina lahir di luar Amerika Serikat. Selain di Amerika Serikat, diaspora Cina juga tersebar di Asia Tenggara, Australia dan Selandia Baru (ICD, 2014). Dalam beberapa dekade terakhir arus migrasi internasional dari Cina melibatkan migran kelas menengah dan elit intelektual. Arus migrasi terampil dan terdidik ini menuju negara-negara industri maju di wilayah dunia bagian barat (seperti Amerika Serikat dan Kanada), Australia, dan Selandia Baru (Arjona, 2013 dalam ICD 2014)³.

³ Secara garis besar, migrasi bangsa Cina terjadi dalam tiga tahapan (ICD, 2012). Tahap pertama terjadi antara tahun 1850 an hingga 1950an yang sebagian besar dilakukan oleh petani laki-laki dari wilayah pesisir menuju Negara-negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapore, Indonesia, dan Thailand. Selama periode 1950-1980 yang merupakan tahap kedua adalah migrasi bangsa Cina dengan kualifikasi tidak/kurang terampil ke negara-negara yang lebih maju dimana tersedia kesempatan kerja bagi pekerja berupah rendah (seperti Amerika Utara, Eropa, dan Jepang). Migrasi yang terjadi pada tahap ini didorong oleh kondisi instabilitas dan meluasnya kekerasan di dalam negeri Cina. Arus migrasi bangsa Cina dengan karakteristik pekerja kurang terampil masih terjadi hingga kini, namun

Kenyataan empiris ini menggambarkan bahwa diaspora Cina merupakan diaspora terbesar di dunia dengan sebaran geografis yang cukup luas.



Gambar 5.
Jumlah Diaspora 20 terbesar di Amerika Serikat Tahun 2011.

Sumber: Migration Policy Institute-MPI (2014)

Diaspora Indonesia tidak ditemukan dalam sumber data OECD maupun hasil Survei Masyarakat Amerika tahun 2011. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah diaspora Indonesia negara-negara OECD dan Amerika Serikat tersebut hanya sedikit dan belum termasuk pada kelompok negara terkait dengan data diaspora yang dipublikasikan. Untuk mengetahui jumlah dan sebaran diaspora Indonesia semestinya dapat diperoleh dari kantor *Indonesia Diaspora Network-IDN*⁴ atau Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Data statistik resmi tentang diaspora Indonesia belum tersedia. Hal ini mungkin karena jaringan/wadah/ organisasi diaspora Indonesia di tingkat global baru terbentuk pada tahun 2012, bersamaan dengan penyelenggaraan kongres diaspora yang pertama di Amerika Serikat. Padahal dari catatan historis, diaspora Indonesia sudah ada sejak lama sejalan dengan perpindahan orang-orang Indonesia yang terjadi sebelum pra-kemerdekaan (periode kolonial). Salah satu contoh adalah pindahnya orang Jawa ke Suriname pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 untuk bekerja sebagai tenaga kuli kontrak di perkebunan tebu (Mardiani, 2014). Evolusi diaspora Indonesia juga terjadi pada tahap pasca kemerdekaan yang dilatarbelakangi oleh faktor politik dan keamanan, seperti perpindahan orang Maluku ke Belanda.

belakangan ini emigran Cina juga meliputi mereka yang memiliki multi ketrampilan.

⁴ IDN Global organisasi non-profit berbasis masyarakat diaspora yang sifatnya terbuka dan inklusif, serta melayani semua anggota tanpa memperhatikan latar belakang agama, etnis atau politik (www.diasporaindonesia.org/whatisidn.htm).

Menurut presiden IDN, jumlah diaspora Indonesia yang terdata ada sekitar tujuh (7) juta orang pada tahun 2015 (<http://www.cnnindonesia.com/internasional>, Agustus 2015). Dalam kurun waktu sekitar dua tahun (2013-2015), jumlah diaspora Indonesia meningkat sekitar 2,7 juta orang⁵. Suatu kenaikan yang cukup signifikan, mungkin dipengaruhi oleh kemajuan pesat bidang TIK yang memungkinkan diaspora Indonesia untuk mengetahui keberadaan IDN Global dan kemudian bergabung kedalam wadah diaspora ini.

Konsentrasi terbesar diaspora Indonesia ada di sekitar 18 negara, antara lain Malaysia, Singapura, RRC, Taiwan, Australia, Belanda, Saudi Arabia, dan Amerika Serikat (Nugraha 2014). Menurut *Indonesia Diaspora Network-IDN*, jumlah diaspora Indonesia yang bermukim di Amerika Serikat pada tahun 2014 mencapai 250 ribu (perspektifbaru.com, 2014). Angka ini masih lebih rendah dibanding diaspora Indonesia di Malaysia yang diperkirakan mencapai 1,1 juta jiwa, sebagian besar diantaranya pekerja migran (IDN Malaysia, 2013). Angka ini belum termasuk diaspora Indonesia yang bekerja di Malaysia secara ilegal dengan perkiraan jumlah antara satu (1) hingga 1,5 juta jiwa, dan mereka yang sudah menjadi warga negara Malaysia tetapi memiliki leluhur orang Indonesia. Banyaknya jumlah diaspora Indonesia di Malaysia yang didominasi pekerja migran kemungkinan besar karena sudah sejak dekade 1970-an negara Malaysia merupakan negara tujuan tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di sektor-sektor perkebunan, konstruksi, dan jasa rumah tangga. Sumber data lain menyebutkan bahwa diaspora Indonesia di Malaysia mencapai 2,5 juta, yang merupakan jumlah paling besar dibanding mereka yang tinggal di Saudi Arabia (1,5 juta), Belanda (lebih dari 400.000 jiwa, Singapura, Taiwan, Jepang, Amerika Serikat, dan Australia (Hariyadi, 2014 in asianews.it. Agustus 2014).

Di luar jumlah diaspora yang tercatat tersebut, masih ada jutaan diaspora Indonesia yang masih tersebar di sejumlah negara dan belum tercatat dalam data IDN. Sementara itu, buruh migran Indonesia (TKI) bukan

merupakan akar yang kuat untuk membangun komunitas diaspora, tetapi kemungkinan mereka bergabung dalam jaringan *Indonesian Diaspora Network* (IDN), terutama yang bekerja di luar sektor rumah tangga/domestik. Dengan demikian, terbentuknya wadah diaspora ini diharapkan dapat mewujudkan atau setidaknya memfasilitasi tersedianya data diaspora Indonesia, meliputi persebaran geografis dan karakteristiknya. Data ini sangat bermanfaat untuk mengetahui potensi diaspora yang dapat berkontribusi dalam pembangunan Indonesia.

MIGRASI DAN DIASPORA BERKEAHLIAN, SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PEMBANGUNAN DI NEGARA ASAL

Keterkaitan antara migrasi terampil dan pembangunan melalui jejaring diaspora telah menjadi salah satu fokus utama dalam berbagai kajian dan analisis di bidang migrasi. Hal ini sejalan dengan dinamika migrasi internasional kontemporer yang semakin banyak melibatkan migran berpendidikan dan berkeahlian tinggi, sebagai konsekuensi dari proses globalisasi yang semakin cepat dan meluas ke semua negara di dunia (Özden dkk, 2011; Docquier and Rapoport, 2012 dalam Siddiqui dan G Tejada, 2014). Ciri migrasi kontemporer dan terampil seperti ini merupakan aspek positif dalam upaya pembangunan, terlebih apabila migran terampil tersebut tergabung dalam komunitas diaspora.

IOM (2013); Agunias and K. Newland; (2012); Plaza dan D. Ratha; (2011) menganalisis migrasi terampil dalam konteksnya dengan upaya memaksimalkan kontribusi diaspora dalam pembangunan di negara asal dan tujuan. Berbagai kajian ini menggambarkan adanya perluasan paradigma dalam kajian dan analisis migrasi terampil. Jika sebelumnya migrasi internasional oleh tenaga terampil dan terdidik dihubungkan dengan fenomena/konsep *bain drain*, tetapi pada beberapa tahun terakhir berkembang istilah *brain gain*, *brain bank*, *brain trust*, dan *brain circulation*. Perluasan paradigma tersebut menggambarkan adanya perkembangan perhatian terhadap potensi diaspora berkeahlian/terampil sebagai pengungkit pembangunan di negara asal (Khadria, 1999 dalam Siddiqui dan G. Tejada; 2014, Kapurm 2001 dalam Nathan 2013, de Haas, 2010).

Kontribusi positif dari migrasi berkeahlian/ terampil bagi negara asal terjadi dalam berbagai macam bentuk, antara lain transfer keterampilan dan pengetahuan melalui jaringan diaspora, investasi bisnis, dan kewirausahaan (de Haas 2006; CODEV dkk, 2013; Agunias and K. Newland; 2012; Siddiqui dan Tejada,

⁵ Menurut Dino Patti Djalal, penggagas dan pendiri diaspora Indonesia, jumlah diaspora Indonesia yang datanya diperoleh dari 167 kedutaan besar dan perwakilan Republik Indonesia (RI) di luar negeri pada tahun 2013 diperkirakan sekitar 4,7 juta jiwa (IDN Malaysia, 2013). Data ini hanya warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki paspor dan visa berstatus aktif. Padahal diperkirakan ada sekitar 1,6 juta WNI yang berpaspor tapi visa sudah kadaluwarsa (Mussry, 2013). Di luar kelompok ini masih ada anak-anak keturunan WNI yang sudah menjadi warga negara asing (WNA) karena proses naturalisasi yang masih mempertahankan kebiasaan dan adat istiadat leluhur mereka.

2014). Sebagai contoh, diaspora Cina yang berpendidikan tinggi dan terampil telah mendatangkan keuntungan bagi negara asal di bidang investasi (lihat Gambe, 2000 dalam Lucas, 2001)⁶. Kontribusi diaspora yang tinggi ini berhubungan dengan kebijakan pemerintah Cina dalam memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada investasi asing untuk masuk ke negara ini, antara lain melalui upaya penyediaan tenaga kerja dalam jumlah banyak dengan upah rendah (Lever-Tracy et al., 1996 dalam Lucas, 2001). Seperti Cina, India juga merupakan negara yang sudah memperoleh banyak keuntungan dari migrasi terampil/ berkeahlian melalui jaringan diaspora maupun migran kembali. Migrasi bangsa India berpendidikan tinggi dan terampil telah terjadi sejak pertengahan tahun 1960-an. Pada umumnya mereka bermigrasi ke negara-negara di belahan dunia bagian barat, seperti Kanada dan Amerika Serikat. Pada dua dekade terakhir, migrasi tenaga kerja India terampil dan terdidik meluas ke negara-negara maju lainnya, misalnya Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Melalui jejaring diaspora, emigran India telah berkontribusi dalam pembangunan negara asal, yaitu melalui tranfer pengetahuan, ketrampilan teknis, dan pemanfaatan modal sosial diaspora (Codev dkk, 2013; Tejada dkk, 2014 dalam Siddiqui dan Tejada 2014). Siar (2013) juga mengemukakan bahwa diaspora India, Cina dan Filipina telah berkontribusi terhadap negara asalnya dalam bentuk sumber keahlian dalam hal ketrampilan, teknologi, pasar, sumber kapital, dan sebagai meningkatkan ketrampilan bahasa, pengetahuan, budaya. Selain itu, mereka juga berperan sebagai *contact person* untuk membangun hubungan bisnis atau kerjasama di bidang lainnya. Namun, keberhasilan dalam memanfaatkan intelektual, sumber ekonomi dan sosial dari diaspora sangat bergantung pada dukungan kebijakan dan program yang jelas dan berkelanjutan.

Untuk Indonesia, kontribusi diaspora masih terbatas pada aspek remitansi, belum sampai pada sumbangan kapital dan sumber daya finansial, teknis dan profesionalisme (Gita Wiryawan dalam the-markerter.com, 2013). Jumlah remitansi yang

diperoleh dari diaspora Indonesia sekitar 7 miliar dolar Amerika. Di bidang sosial, menurut Direktur Eksekutif Yayasan Diaspora Indonesia, *Indonesian Diaspora Foundation-IDF* yang merupakan bagian dari jejaring IDN telah membantu dalam hal pendidikan dan berbagai kegiatan sosial (Nugraha, 2014).

Masih rendahnya kontribusi diaspora Indonesia tersebut mungkin karena wadah/organisasi ini baru terbentuk secara kolektif pada bulan Juli 2012 bersamaan dengan penyelenggaraan kongres pertama diaspora Indonesia, yang kemudian secara resmi menjadi Organisasi diaspora dengan nama IDN-Global pada bulan Oktober 2013. Tujuan pembentukan IDN Global adalah untuk menggali potensi diaspora Indonesia dan upaya memberikan sumbangsih bagi negara Indonesia. Program utama IDN adalah pembangunan di bidang sosial dengan membentuk yayasan sosial, disamping juga membangun kelompok bisnis yang diberi nama *Indonesian Diaspora Business Council* (IDBC) untuk mempererat hubungan ekonomi antara diaspora dan tanah air, serta beberapa kelompok profesional network (misalnya *Indonesian Diaspora Brandmake*). Karena usianya yang masih sangat muda, maka kontribusi mereka terhadap pembangunan Indonesia masih belum bisa disejajarkan dengan diaspora di negara-negara lain, seperti India, Cina, dan Filipina. Selain itu, menurut salah seorang pejabat Kementerian Luar Negeri, perkembangan diaspora yang belum setara dengan diaspora di negara-negara lain antara lain karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang diaspora itu sendiri (www.cnnindonesia.com/internasional, Agustus 2015). Diaspora Indonesia cenderung masih terbentuk berdasar suku, agama, profesi, dan lain-lain.

Untuk meningkatkan kontribusi diaspora Indonesia diperlukan kerangka kebijakan pemerintah Indonesia dan lembaga legislatif yang komprehensif. Dalam konteks ini, upaya yang dilakukan bukan hanya memberi kemudahan terhadap lalu lintas keluar masuk diaspora secara fisik, misalnya dengan memberikan status legal dwi kewarganegaraan, tetapi juga kemudahan lain bagi diaspora untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan Indonesia. Hingga saat ini, pemberian kartu diaspora dan status dwi kewarganegaraan bagi diaspora Indonesia masih dalam kerangka perencanaan. Dengan memiliki status tersebut beberapa keuntungan bagi Indonesia akan diperoleh, antara lain (a) memiliki *database* tentang jumlah, persebaran, dan potensi diapora; (b) mendapatkan keuntungan ekonomi, sosial, kultural, dan politik dari keberadaan diapora.

⁶ Diaspora Cina terbentuk karena aliran emigran melalui kebijakan pengiriman mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan dan peneliti ke negara-negara maju untuk memperdalam teknologi maju (Xiang; 2005). Selain kebijakan pemerintah, alasan politik juga mewarnai pembentukan diaspora Cina terampil/ahli, salah satu diantaranya adalah adanya tindakan keras dari pemerintah terhadap mahasiswa pada tragedi Tiananmen. Korban tragedi yang pergi ke luar negeri mendapat dukungan dari beberapa negara maju, misalnya dengan memberikan perlindungan terhadap mereka, bahkan menyediakan beasiswa dan penawaran status warga negara/tinggal permanen di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia (Zweig dan Chen 1995 serta McNamara 1995, semuanya dikutip oleh Xiang 2005).

Berdasar pengalaman negara-negara lain, dukungan kebijakan pemerintah sangat membantu dalam memfasilitasi peran diaspora di negara asalnya. Salah satu yang dikenal luas adalah peran pemerintah Cina yang menetapkan kebijakan membuka peluang bagi investor asing untuk membangun dan mengembangkan bisnisnya di Cina dengan memanfaatkan jaringan diaspora dan menyediakan kebutuhan jumlah tenaga kerja berupah rendah (Lever-Tracy et al., 1996 dalam Lucas, 2001). Demikian pula India yang mendirikan kementerian yang bertanggung jawab untuk mengurus diaspora (*Ministry of Overseas Indian Affair*) sejak tahun 2004. Kebijakan ini antara lain mengeluarkan kartu identitas bagi diaspora berdarah India yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan (misalnya mendapatkan visa gratis, membuka rekening dan membeli properti, serta kemudahan lain). Kebijakan dwi kewarganegaraan ini secara tidak langsung dapat menguntungkan dalam memobilisasi sumberdaya (finansial, sosial, politik, dan lainnya) untuk negara asal/negara leluhur diaspora maupun negara tujuan (*host countries*) (*Global Migration Group*, tanpa tahun).

KESIMPULAN

Kajian literatur menggambarkan adanya peningkatan jumlah dan semakin banyak negara yang terlibat dalam migrasi internasional. Globalisasi migrasi internasional ini diharapkan menjadi potensi untuk perkembangan jejaring komunitas diaspora dan penguatan peran mereka. Dalam proses globalisasi, migrasi internasional merupakan keniscayaan yang tak bisa dihindari. Perkembangan pesat bidang teknologi transportasi dan komunikasi, serta transportasi membuat proses migrasi internasional bekerja dengan jangkauan yang luas. Globalisasi menciptakan peluang investasi dan mendorong kompetisi pasar dengan menciptakan dan menarik perhatian tenaga-tenaga ahli dan profesional dari negara-negara berkembang menuju negara-negara yang lebih maju.

Amerika Serikat dengan kebijakan migrasi progresifnya yang memberi kemudahan tenaga kerja asing untuk menjadi emigran, membuat negara ini menjadi destinasi bagi imigran dari berbagai negara di dunia. Migran internasional dari Indonesia merupakan salah satu diantara imigran di Amerika Serikat. Kebanyakan dari mereka memiliki pendidikan tinggi dan bekerja sebagai tenaga profesional. Kondisi ini berbeda dengan tenaga kerja migran Indonesia di Saudi Arabia yang umumnya berpendidikan rendah dan kurang terampil. Namun, dalam beberapa tahun terakhir terjadi kecenderungan pergeseran destinasi tenaga kerja migran Indonesia dari Saudi Arabia ke

negara-negara industri baru di Asia Timur. Hongkong dan Taiwan pada umumnya menjadi destinasi untuk tenaga TKI yang bekerja di sektor domestik; sedangkan Korea dan Jepang untuk TKI yang bekerja/magang di sektor industri. Pergeseran ini mengindikasikan bahwa Indonesia sudah mulai terlibat dalam globalisasi migrasi.

Dinamika migrasi internasional dalam volume maupun sebaran destinasi migrasi, merupakan potensi besar untuk perkembangan dan penguatan diaspora. Diaspora dan migrasi internasional adalah proses globalisasi dalam dimensi ekonomi, politik, sosial dan kultural. Meskipun diaspora tidak berhubungan langsung dengan globalisasi, tetapi menguatnya gejala diaspora di era global tidak bisa dipungkiri. Contoh nyata dari hal ini adalah terbentuknya diaspora Indonesia pada tahun 2012, yaitu ketika sarana komunikasi dan informasi telah berkembang dengan pesat sejalan dengan proses globalisasi. Padahal komunitas diaspora Indonesia sudah terjadi sejak lama, misalnya di Suriname dan Belanda. Sementara itu, bagi diaspora yang sudah terbentuk lama, globalisasi memperkuat eksistensi mereka. India dan Cina, misalnya merupakan bukti nyata adanya penguatan diaspora di era global, yang diindikasikan dari kontribusi mereka di negara asal, dimana peran tersebut tidak terlepas dari proses globalisasi, selain karena kebijakan pemerintah yang memfasilitasi peran diaspora tersebut.

Kebijakan pemerintah dalam memfasilitasi peran positif untuk kepentingan negara asal dapat dilakukan melalui berbagai bidang. Pengalaman di negara-negara yang berhasil memanfaatkan diasporanya untuk pembangunan ekonomi, politik, maupun sosial adalah dengan memberikan legalitas status kewarganegaraan. Dwi-kewarganegaraan bagi diaspora bukan hanya memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan transnasionalnya, tetapi negara juga dapat mengambil manfaat dari diasporanya, misalnya sebagai penghubung dalam perdagangan internasional, menarik investor asing, diplomasi politik dengan negara penerima, transfer pengetahuan dan ketrampilan, dan masih banyak lagi.

Dalam konteks diaspora Indonesia, mengingat data diaspora belum tercatat dengan baik dan komprehensif, maka organisasi IDN diharapkan dapat mewujudkan atau setidaknya memfasilitasi tersedianya data diaspora Indonesia, meliputi persebaran geografis dan karakteristiknya. Data ini sangat bermanfaat untuk mengetahui potensi kontribusi diaspora dalam pembangunan Indonesia yang dilakukan dari negara tempat tinggal mereka. Potensi diaspora ini harus

digali dan dikembangkan untuk kepentingan pembangunan bangsa dan negara, sepertihalnya India dan Cina yang sukses menggali potensi diaspora mereka untuk negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunias, D. R. dan Kathleen, N. 2012. "Engaging Asian Diaspora". *IOM-MPI Issue in Brief* No 7, 20 November 2012
- Badan Nasional Pengiriman dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia – BNP2TKI. 2014. *Statistik Pengiriman dan Penempatan TKI*. <http://www.bnp2tki.go.id>
- Batalova, J, 2014. *America's Largest Diaspora Populations*. <http://www.diasporaalliance.org> (diakses 5 Agustus 2014)
- Bhagwati. 2004. "International Flow of Humanities". Dalam *Defence of Globalization*, Chapter 3, hal 209-218. London: Oxford University Press.
- Castles, S; H. De Hass, dan M.J. Miller. 2014. *The Age of Migration: International Population movements in the modern world*. New York: The Guilford Press
- Chaika, Mathias dan H. De Haas. 2014. "The Globalization of Migration: Has the World Become More Migratory?". *International Migration Review*. Vol 48 (2)(Summer 2014): 283-323.
- Clifford, J. 1994. 'Diasporas', *Cultural Anthropology* 9 (3): 302-338
- CODEV-EPFL, IDSK, JNU and ILO. 2013. "Migration, scientific diasporas and development: Impact of skilled return migration on development in India". *Final research report*. http://infoscience.epfl.ch/record/188059/files/Migration_ScientificDiasporas_Development.pdf (diakses pada 6 Juli 2014)
- Darussalam. 2013. "Gita Wiryawan: Remitansi Diaspora Indonesia capai USD 7 Miliar. Agustus 2013". *the Marketters.com*, Agustus 2013. (diakses 15 November 2014)
- de Haas, H. 2006. *Engaging Diasporas. How government and development agencies can support diasporas involvement in the development of origin countries, A study for Oxfam Novib*. <http://www.heindehaas.com> (diakses 6 Juli 2014)
- , 2010. "Migration and Development: A theoretical perspective. *International Migration Review*, Vol 44 (1).
- Engbersen, G. (2012). Migration transitions in an era of liquid migration, in Okolski, M (ed). *European immigrations: trends, structures and policy implications*. Amsterdam University Press
- Garchitorena, Victoria. P. 2007. "Diaspora Philanthropy: the Philippine Experience". *Paper* dipersiapkan untuk the Philanthropic Initiative Inc & the Global Equity Initiative, Havard University, didukung oleh the William & Flora Hewlett Foundation, Mei 2007. www.cbd.int (diakses 28 Januari 2015)
- Global Migration Group-GMC. Tanpa Tahun. "Facilitating positive development impacts of diaspora engagement in skills transfers, investments and trade between countries of residence and origin". *GMC Issues Brief* no 1. <http://www.globalmigrationgroup.org> (diakses 28 Januari 2015)
- Hariyadi, Mathias. 2014. "Indonesian diaspora meets in Jakarta to boost unity and cooperation". www.asianews.it, 24 Agustus 2014 (diakses 14 November 2014)
- <http://www.asean.org/communities/asean-economic-community>. 2008. ASEAN Economic Community Blueprint (diakses 22 Juli 2014)
- <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150805190045-106-70329/kongres-diaspora-indonesia-digelar-12-14-agustus/>
- Indonesia Diaspora Network-IDN Malaysia, 2013. *Diaspora Indonesia: Konektivitas menjadi jiwa nasional*. <http://idn.kbrikualalumpur.org>. (diakses tgl 10 September 2014)
- International Migration Organisation-IOM. 2009. *International Meeting on Diaspora*. Mexico City 31 Agustus-1 September 2009
- , 2013. 'Diasporas and Development: Bridging Societies and States'. *International Dialogue on Migration*, No 22. Diaspora Ministerial Conference: International Conference Centre Geneva, 18-19 June 2013.
- IOM-Germany. Tanpa Tahun. *Reaching Out to Diaspora Group*. <http://www.migrant-servicecentres.org> (diakses 20 Agustus 2014)
- IOM dan MPI. 2013. *Enhancing the Moldovan Government's capacities in Diaspora engagement*
- Institute for Culture Diplomacy-ICD. 2012. **Chinese Diaspora Across the World: A General Overview**. <http://www.culturaldiplomacy.org> . Diakses 27 September 2014 -----, 2014. *The Chinese Diaspora*. <http://www.culturediplomacy.org>. Diakses 14 September 2014
- King, R. (2012). "Theories and typologies of migration: An overview and a primer". *Willy Brandt Series of Working Papers in International Migration and Ethnic Relations* 3/12. Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM): Malmö, Sweden.
- L. Anteby- Yemini et W. Berthomiere 2005. *Diaspora: A look Back on the Concept*. <http://bcrfj.revues.org/257>. (diakses 24 Oktober 2014)

- Li, Peter S. 2008. "World Migration in the Age of Globalization: Policy implications and challenges". *New Zealand Population Review*, 33/34: 1-22.
- , 2010. "Immigrant from China to Canada: Issues of supply and demands of human capital". *China Papers* No 2. Canada: Canadian International Council
- Lucas, R. E. B. 2001. "Diaspora dan Development: Highly skilled migrants from East Asia". *Laporan untuk World Bank*.
- Mardiani, D. 2014. "Menegok Jawa di Seberang Dunia". *Republika*, 27 September
- Martin, Philip. 2013. "The Global Challenge of Managing Migration". *Population Buletin* Vol 68, No 2. <http://www.prb.org/pdf13/global-migration.pdf>
- Migration Policy Institute-MPI. 2012. *Developing A Road Map for Engaging Diasporas in Development: A Handbook for Policymakers and Practitioners in Home and Host Countries*
- , 2014. "The Filipino Diaspora in United States". *MPI: RAD Diaspora People*, Juli 2014
- Mussry, J. 2013. Diaspora, Aset Masa Depan Bagi Indonesia. *the Markettters.com*, Juli 2013. Diakses 15 November 2014
- Nathan, Max. 2013. "The Wider Economic Impact of High-Skilled Migrants: A survey of the literature NIESR". *Discussion Paper* No 413.
- Nugraha, S. A. 2014. *Ayo Rangkul Diaspora Indonesia*. <http://swa.co.id/headline/ayorangkul-diaspora-sebagai-bagian-indonesia> (diakses Maret 2014)
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 2012. *Connecting with Emmigrants: A global profile of diasporas*. OECD Publishing <http://www.dx.doi.org>
- , 2014. *List of OECD Member Countries and Ratification of the Convention on the OECD*.
- Özden, Ç; C. Parsons, M. Schiff, T. Walmsley. 2011. *Where on earth is everybody?* "The evolution of global bilateral migration: 1960-2000. VOX, 06 Agustus 2011. <http://www.voxeu.org/article/where-earth-everybody-global-migration-1960-2000> (diakses 9 Oktober 2013)
- Plaza, S. and Ratha, D. (2011). "Harnessing Diaspora Resources for Africa, in: S. Plaza and D. Ratha (eds)". *Diaspora for Development in Africa*. Washington D.C.: World Bank, 1-54.
- Perspektifbaru.com. 2014. *Memperkenalkan Diaspora Indonesia*. <http://www.perspectivebaru.com/wawancara>. 24 Februari (diakses 27 Januari 2015)
- Safran, W. 1991. 'Diasporas in modern societies: Myths of homeland and return', *Diaspora* 1 (1): 83-99.
- Santoso, M.Imam. 2014. "Diaspora Migrasi Internasional dan Kewarganegaraan Ganda". *Paper* disampaikan pada Seminar Diaspora dan Dinamika Konsep Kewarganegaraan di Indonesia. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.
- Siar, S. V. 2013. "Engaging the Highly Skilled Diaspora in Home Country Development through Knowledge Exchange: Concept and Prospects". *Discussion Paper Series*, No 2013-8
- Siddiqui, Z dan G. Tejada. 2014. "Development and Highly Skilled Migrants: Perspectives from the Indian Diaspora and Returnees". *International Development Policy, Article and DEBATE* 5.2. [HTTP://POLDEV.REVUES.ORG/1720](http://POLDEV.REVUES.ORG/1720) (DIAKSES 9 OKTOBER 2014)
- United Nations, Population Division. 2013. "Trend in International Migrant Stock: the 2013 revision" *United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev2013*. www.unpopulation.org
- , 2014. *Population Facts*, No 2013/3 Rev.1, April 2014. www.unpopulation.org
- Van Hear, N. 1998. "Migrants and Hosts, Transnational and Stayers", dalam *New Diasporas: the Mass Exodus, Dispersal and Regrouping of Migrant Communities*. London: UCL Press
- Van Meijl, T. 2007. *Beyond Economics: Transnational labour migration in Asia and the Pasific*. www.iiias.nl (diakses 5 Agustus 2014)
- Wahlbeck, O. 2002, 'The concept of diaspora as an analytical tool in the study of refugee communities', *Journal of Ethnic and Migration Studies* 28 (2): 221-238.
- Wickramasekara, P. 2011. "International migration of labour: the missing link in globalization". *Migration Politiches Portal*. <http://heimatkunde.boell.de/2011/05/18/international-migration-labour-missing-link-globalization> (diakses 16 Juli 2015)
- Xiang, B. 2005. "Promoting Knowledge Exchange through Diaspora Networks: The Case of People's Republic of China". *Laporan untuk Asian Development Bank*. Oxford, UK: ERC Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS), University of Oxford.

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

DPSIR MODEL AS A TOOL TO ASSES LAND CONVERSION TARIFF POLICY IN YOGYAKARTA

(MODEL DPSIR SEBAGAI METODE PENILAIAN KEBIJAKAN KONVERSI LAHAN DI YOGYAKARTA)

Nina Novira¹, Syarifah Aini Dalimunthe², Aditya Pandu Wicaksono³,
Nur Indah Sari Dewi⁴ dan Triana Sefti Rahayu⁵

¹ State University of Medan, North Sumatera

² Research Center for Population, Indonesian Institute of Sciences

³ Pembangunan Nasional Veteran University, Yogyakarta

^{4,5} Gadjah Mada University

*Corresponding author: ninanovira@unimed.ac.id

Abstrak

Perubahan pemanfaatan lahan di pertanian ke non pertanian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah penyebab utama berkurangnya lahan pertanian produktif. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan permintaan akan lahan bertambah. Sulitnya memenuhi kebutuhan lahan untuk pembangunan di perkotaan semakin massif terjadi. Model DPSIR digunakan untuk dasar penilaian dampak terhadap kebijakan tariff yang sudah diimplementasikan untuk mengurangi laju konversi lahan. Berdasarkan analisis, pendorong utama terjadinya konversi lahan adalah migrasi. Kondisi tekanan terhadap lahan memiliki implikasi terhadap dimensi ekonomi, dimensi kelingkungan dan dimensi social. Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa degradasi lahan semakin terjadi yang pada akhirnya mengancam ketahanan pangan dan memunculkan polusi. Sebagai respon, pemerintah daerah menerbitkan PERDA No. 53 Year 2007 mengenai otorisasi pemanfaatan lahan di DIY. Artikel ini akan membahas bagaimana DPSIR model dimanfaatkan untuk menilai implementasi kebijakan tersebut.

Kata Kunci : DPSIR, Penilaian, Perubahan Pemanfaatan Lahan, Kebijakan Pemanfaatan Lahan

Abstract

Land use change from agricultural land to non-agricultural purposes in Yogyakarta Special Province (DIY) is the main factor leading to the decrease of agricultural land. The increasing population growth has led to a higher demand for land, which is contributing to the rapid land use changes. Land scarcity has led to a change in land utilization within the city and in the surrounding area. The DPSIR Model is used as the basis for the impact assessment analysis on the tariff policy implementation regarding to the controlling of the land use change. Driving force in this model is migration and the pressure is land use change. The state is divided into three categories, state of economic dimension, environmental dimension, and social dimension. These have caused impacts on land degradation, threats to food security, and pollution. As the response to this, the government introduced the policy PERDA No. 53 Year 2007 about authorizing land use in DIY. This paper is intended to explain how the DPSIR model is used to assess the policy implementation.

Keywords: DPSIR, Assessment, Land Use Change, Land Use Policy.

INTRODUCTION

Urbanization has pronounced implication on environmental, social, economic and political dimension. In relation to the urban population growth, DIY should have space and several facilities especially housing and basic infrastructure such as communication, transportation and other social facilities. Population growth has significant effect on urban extension. Land location has determined its value especially its price. The closer the distance of the land to the city centre, the price will be more expensive

(Randal, 1987). City has an effect to the hinterland in the form of economic, social and cultural activity.

Yogyakarta Special Region hereinafter abbreviated DIY, is chosen as the case study area because it represents one of the provinces in Indonesia which is unique and distinctive. One of the unique and privileges is that DIY is led by a king who became governor as head of government. DIY Province was famous for being the students and cultural city. DIY hosts one of the best universities in Indonesia. Literally student from all over Indonesia come to study in these universities. DIY's landscape is characterised by volcanic area in the north down to coastal area in the south. The best universities are located relatively in the north. The northern area has also a milder climate, the air temperature is fairly lower than in the southern part. This has led the northern area to be the more prestigious area. This area experienced a massive land use change especially for university building, student homes, and shops. Land use change issue in DIY is derived by population density. This was done by mainly converting rice fields. Percentage of paddy field is decreasing and the settlement is increasing significantly. Urban area of DIY is just as big as 15.5 km² in 1970. The area has expanded dramatically to 63.6 km² in 2000 (Marwasta, 2010). In 1990 the paddy field is 19.86% of the DIY area, but in 2006 the area of paddy field is only 14.74%. In 2006 the built-up area was increasing from 15.74% to 28.07% (LUPIS Indonesia, 2010).

Land use change potentially rising many problems such as reduction in groundwater availability, water quality degradation, increasing pollution in the city, and urban micro climate changes. In addition to the above problems, changes in land use are also not in accordance with the spatial structure that has been established by the government and posts treats to the course of sustainable development in DIY. Many people who want to change agricultural land into

settlement because agriculture did not give adequate income. The land price offered is tempting when compared to the income from agriculture. To reduce the rate of land use change, which tends to be more rapid, the government has issue some regulations. However this has never been assessed properly. This paper aims to (1) describe land use change in DIY and (2) assess two regulations that targets in controlling land use change in DIY. The growing population and economy have demanded the increasing construction of both social economy and housing complexes. Since there is limited space in the inner parts of the city, some functions have moved out to the periphery and the change of agricultural land use to non-agricultural land use has taken place concomitantly. If this phenomenon is not addressed promptly and properly, some detrimental impacts will appear.

The understanding of land use change in DIY is gained through observation, literature study, and expert interview. The assessment of the land conversion tariff policy is done by modifying DPSIR model. The Driving Force – Pressure – State – impact – Response (DPSIR) model is proposed by the European Environmental Agency and it is widely known and adopted by many European national and institutions (Guipponi, 2002), (Odermatt, 2004) DPSIR is originally developed for environmental impact assessment with the driving force of human activities and economic sector that gives pressure to the environment (Kristensen, 2004). In this case study, however, the DPSIR model is adapted for the use to assess land use policy implementation, putting the policy as the driving force to the problem.

THE STUDY AREA

The Yogyakarta Special Region (DIY) has one municipality and four regencies; Bantul, Sleman, Kulon Progo, and Gunung Kidul regency, and Yogyakarta Municipality. DIY has varied morphological condition from mountainous area to coastal area. DIY consists of various physiographical units i.e. Merapi Volcano, Southern Mountain, Kulonprogo Mountain, and Bantul Graben. Each of those physiographical units has certain potential and condition both physical condition and social condition. Physical condition deals with water availability, soil fertility, and natural hazard. Different physical condition emerge different land use type.

Sleman Regency is located in the northern part on the slopes of Merapi volcano, which is an active volcano, Sleman regency of the most economically productive, because it has a lot of colleges include Gadjah Mada

University. Kulon Progo Regency is located in the western part, Bantul regency located in the southern part, and Yogyakarta municipality located in the middle of Yogyakarta Special Region. DIY tends to develop more to the north. Sleman regency is more prosperous, resulting better infrastructure.

Yogyakarta municipality is the provincial capital, located in the southern part of the Sleman regency. Yogyakarta municipality is the economic center of Yogyakarta Special Region. It is an urban area and covered with almost 80% settlement with dense population. The morphology of this area is flat with good accessibility, facilities are also adequate, supporting advanced economies. Land use change issue in DIY is derived by population density. The sectors affected by land use change issue are agricultural, social-cultural, and economic sectors. In agricultural sector, land use change can be analysed from agriculture land or paddy field decrease converted to non-agriculture land or build up area for settlement. Percentage of paddy field is decreasing and the settlement is increasing significantly.

Bantul regency is located in the south with flat morphology. It is now starting to face more rapid land use change, due to the influence of the growth of the municipality of Yogyakarta. Another factor is the rapidly increasing land price in Sleman area. Bantul becomes an alternative since it is also located just at the south of Yogyakarta Municipality, not very far from the city centre. This has reduced the availability of land in Bantul. Land use change has increased along with the increasing Population growth. Livelihoods of the people is dominated by agricultural activities as paddy field is still quite wide and this region is very suitable for agricultural use of wetlands, due to land condition and water availability.

Kulonprogo regency is located in western part of DIY. The physiographic configuration is hilly in northern part and flat in the southern part. The water condition in this regency is from spring in northern part with dry land agricultural, whereas in southern part agricultural system is wet agricultural land or irrigated paddy field. The population growth is lower than Sleman regency, because there is not many migrants coming into this regency. It is also influenced by economic progress; economic progress in Kulon Progo regency is not as fast in Sleman regency. Livelihood of the people is also dominated by agriculture.

Gunung Kidul regency is located in eastern part of DIY – a physiographic configuration of Gunung Kidul regency is mountainously and limestone's – is much

less on average, due to unfavourable soil characteristics and limited irrigation especially on slopes. The hydrology characteristic is much less, so this regency always droughts in every dry season and needs water dropping from other regency. The population growth in Gunung Kidul regency is the lowest than the other regency in DIY. In this regency the total population is the lowest because people who came out or emigrants slightly more than the immigrants, because of economic problems. Physiographic conditions can affect the economic problems, so it needs the support of other regencies in terms of economy.

PREVIOUS STUDIES

Land use that breaks landscape plans tends to create problems, either social, environmental, or economic problems; therefore, policy to promote land utilization based on landscape plans is required. One method to do this is by applying land and building tax disincentive; therefore, a systematic and operational method in calculating land and building tax disincentive based on deviation of tax object utilization from landscape plans is required.

Several studies of land use tariff policy have been accomplished throughout Indonesia. One of the studies was conducted by (Sisiana, 2005). The research took place in Karawang one of West Java's rice field concentrations. Acceleration of development and fast population growth on Karawang where the land availability is limited causes field stress that push the change of land use from wetland to dry land. Real Property Tax (PBB) to State Government of Karawang is the main income sources, where the value strongly depends on fiscal potential, that stated by two determinants which are areas and its NJOP.

Another research in respect to land tax is conducted by (Purwanta, 2008). This research tries to analysis and to know whether the change of land use from wetland to residence estate causes of property NJOP difference. The expected benefits are input for PBB policy and input for develops a data base that can use together by many departments. Hypothesis that will be tested is the change of land use from wetland to residence estate expected causes of property NJOP difference. The 1998 digital topography map derived to be the 1998 digital land use map, then crossed over with the 2002 digital land use map, the product is the map of land use change from 1998 to 2002. Observation did to know the condition of land use on 2004, and the result plotted to the 2002 digital land use map, that produce the map of land use change from 2002 to 2004. From

level assessment analysis with degree of confident 95% known that statistically the average NJOP of residence estate and its market value is not the same, where NJOP of residence estate stated lower than its market value or under assessment.

RAPID LAND USE CHANGE IN DIY

DIY Rapid LUCC is triggered by rapid population growth and infrastructure improvement. Population growth deals with human activities, which can directly alter the physical environment. More population increases the demand for settlement and trigger economic activities as well. The growth in population is mainly influenced by incoming migration, either to study or to have a second home. DIY is blessed with so many good images, which in the end, attracts more people to come. The image of having good high education, low living cost, friendly local people, convenient, and many other have become magnet that pulls more and more people. This of course drives new settlement and infrastructure development. RPJMD DIY in year 2009-2013 stated that population growth in DIY in between year 2003-2007 has increasing with average 1.1% per year.

Infrastructures improvements may also be one of the reasons to migrate to DIY, which can also effect Land use change. Infrastructure factors are related to the road and transportation improvement, while people need good access and comfortable transportation for doing their activities. Average annual growth of motor vehicle in city is 13% per year (BAPPEDA DI Yogyakarta, 2009).

Starting from 2008, the public transportation has already operated “trans Jogja” using “buy the service system” (purchasing system of government services to private for operating the public transportation). This facility has already operated 48 pieces of bus Trans Jogja, 76 shelters which is completed by ticketing machine and computer network. Those will be increased based to the supporting society. The government is also improving combination method between bus, railway and flight transportation services. Thus, it is becoming easier to travel by bus, train and airplane. Even though traditional transportation such as pedi-cab and horse carriage is still being maintained by the government, but those urban heritages precisely become another attraction of DIY.

THE MODIFIED MODEL

The government has reacted to this by formulating a local government regulation in Regional Regulation

(PERDA) DIY Nr. 5 Year 1999 about Spatial Planning. This regulation determines the purpose of each parcel of land and the further spatial development should follow the plan. Unfortunately the implementation is not as smooth as it is supposed to be (Iqbal and Budhi, 2008). The lack of implementation has led to uncontrolled sprawl of housing development (Subanu, 2008).

Since 1999 Indonesia implement the Local Government Autonomy regulated in Law Nr. 22 Year 1999 and further revised in Law Nr. 32 Year 2004. This has caused a tremendous change in governance in Indonesia. With this law, the local governments have the power and are entitled to govern the territory. This also implies to the implementation of PERDA DIY Nr. 5 Year 1992, which is a policy taken at the provincial level. The Regency and Municipality have the authority to simply implement the policy or to publish further supporting regulation. In DIY, Sleman Regency and Yogyakarta Municipality have realized the rapid land conversion in the region and are concerned about the consequences that may occur. This has driven the government of Sleman Regency and Yogyakarta Municipality to publish Head of Regency Regulation (PERBUP) Sleman Nr. 8 Year 2009 and Mayor’s Regulation (PERWAL) Yogyakarta Nr.53 Year 2007 about Land Use Designation Permission.

A. The Land Conversion Tariff

Head of Regency Regulation (PERBUP) Sleman Nr. 8 Year 2009 and Mayor’s Regulation (PERWAL) Yogyakarta Nr.49 Year 2008 about Land Use Designation Permission regulate in detail the mechanism and tariff for converting a parcel of land in Sleman Regency and Yogyakarta Municipality.

- An area of minimum 100 m² for Yogyakarta Municipality and 600 m² must have a letter of permit to convert the use of land to another function.
- The land conversion consists of stages: from wet agricultural land (wet rice field) to dry agricultural land and from dry agricultural land to settlement or to business area.
- The conversion from wet agricultural land to business area must go through these stages
- The conversion tariff is calculated using the formula

$$CT = CI \times LP \times LA$$

- CT : Conversion tariff (Rp.)
 CI : Conversion index (%)
 LP : Land price, based on the price from the tax office (NJOP: Tax Object Price)
 LA : Area of land to be converted (m²)

Table I: Land Conversion Index In Yogyakarta Municipality (%)

Land area (m ²)	Dry land agriculture	Settlement	Business area
100 – 500	1.25	0.25	0.5
501 – 1,000	1.5	0.3	0.6
1,001 – 5,000	2	0.4	0.8
5,001 – 10,000	2.5	0.5	1
>10,000	3	0.6	1.2

Source: PERWAL No. 49 Year 2008

B. The implementation

The implementation of Regional Regulation (PERDA) DIY Nr. 5 Year 1999 about land use planning runs somehow not effective. The grand master plan as a product of this regulation is on the scale of 1:5,000, which is used as a reference to grant development permit, is not sufficiently detail to decide whether a parcel of land deserves a permit. The granting permit officials often use their own interpretation to grant a permit. Together with low enforcement, an ineffective regulation is the outcome (Subanu, 2008).

Land conversion tariff for Yogyakarta Municipality was published in 2007 and in 2009 for Sleman Regency. The implementation runs fairly strict. The conversion proposal coming to the permission office will then be evaluated, if permission is considered, an assessment team will visit the site to thoroughly assess the location and its association. If all the criteria is fulfilled the permission will be published. All of these processes must be followed and passed in order to convert land use. According to LUPIS Indonesia (2010) these regulations are rigorously obeyed. Unfortunately, this does not mean that land conversion problem is solved. The tariff gives chances for misapplication.

The DPSIR

Driver

The underlying driver in this study is the rapid land use change in DIY that has drawn the attention of the

policy makers driving them to formulate and publish regulations to slow down, if not stop, the land conversion. These regulations act as the proximate driver. From four Regencys and one Municipality, only Sleman Regency and Yogyakarta Municipality that have published supporting regulation for the Regional Regulation (PERDA) Nr. 5 Year 1999 about Spatial Planning Act published by the government of Yogyakarta Special Province (DIY). The supporting regulation only obliged land of minimum of 100 m² in Yogyakarta Municipality and 600 m² in Sleman Regency to obtain land conversion permit.

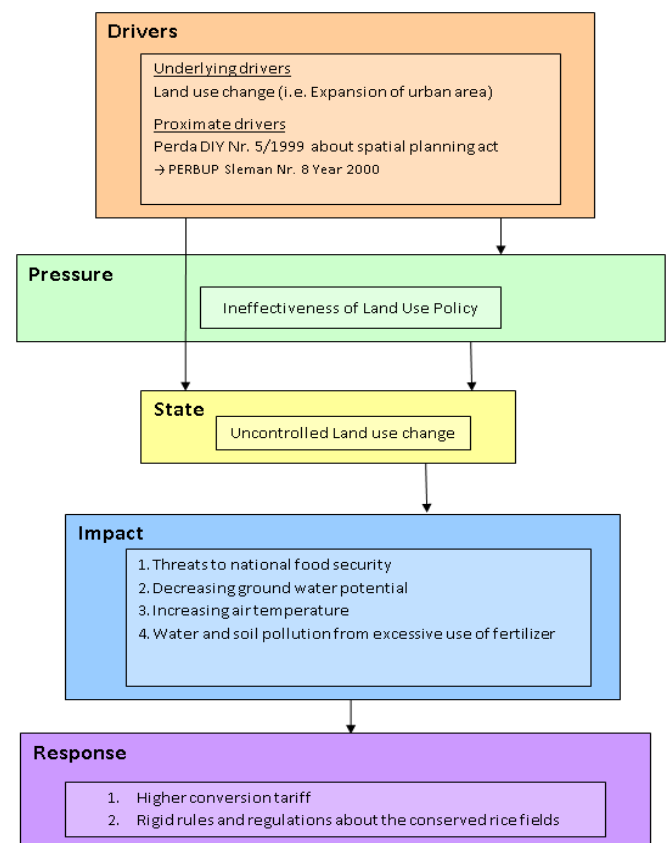


Fig. 1. The DPSIR Diagram of this study.

This means that land conversion for areas less than the above mentioned width does not need to acquire any permission. The amount of the land conversion tariff applied is also an issue. It is considered to be way too cheap when compared to the value the land could get after being converted. The calculation of the tariff is based on the land price set by the tax office (NJOP: Tax Object Price), which is usually very low in comparison to the market price of the land. This way, the tariff is not a hindrance for converting land use.

Pressure

The pressure in this study is the misapplication of the land conversion tariffs.

State

The land conversion tariff was introduced to hinder rapid land use change and further to control it. The chances of misapplication in the land conversion tariffs lead to uncontrolled land use change in a different form.

Impact

The uncontrolled land use change in DIY from agricultural land to other functions has posed threats to food security either local or national. With the assumption that rice need per capita per day is 0.3 kg, the need of rice is 101 kg per capita per year. With inhabitant in DIY 3,468,500 lives, the need of rice is tons/year while current production is 798.232 tons/year.

(Adji, Marwasta & Nurjani, 2007) has done a study on the impact of land use change to ground water in DIY, and the result is that land conversion has decreased water table in DIY of 40 cm/year. When the land is functioned as agricultural land, rain water infiltrates to the soil and further percolates freely to the groundwater. After it was converted to non-agricultural uses, such as settlement or other built-up areas, very less water could infiltrate the soil to recharge the groundwater. Land conversion has also suspected to be one of the reasons of increasing air temperature in DIY. A study in Citarum river basin by Agus et al in 2002 showed that urban land use has 2° C higher temperature than agricultural land use measured in three different areas with the same altitude (Agus, et al., 2002).

Response

In order to mitigate the impact of ineffective policy intended to control land conversion, response from the government is needed. This can be done by revising existing land conversion tariff. A focused group discussion was held to collect feedback from expert, representatives of government institution, and academician. Potential possible responses to improve the land conversion tariff are as following:

1. Smaller minimum area that requires a permit for land conversion

The minimum area that requires a permit for land conversion in Sleman Regency is 600 m². This is considered to be too wide. After the land conversion tariff is implemented, the big investors do stop their expansion of new housing estates and business

complex. But new smaller developer developing smaller housing estates are mushrooming. This becomes a new trend in Sleman Regency. Smaller minimum area that obliged to obtain a permit for land conversion is expected to hinder these small housing estates.

2. Higher land conversion tariff

The existing land conversion tariff is calculated based on the land price by the tax office for tax calculating purposes (NJOP). This price is far below the real market price of the land, resulting a very low conversion tariff. Conversion tariff policy introduced as an instrument to control land use change could not function properly. Higher conversion tariff is expected to have more impact to land conversion process. The mechanism proposed is to calculate the conversion tariff using NPOP instead of NJOP. NPOP the price set by considering potential value the land could get when converted to certain land use. This way is a parcel of land is to be converted to industry or business area, the NPOP would be very high.

3. Development of land conversion tariff in all Regencies in DIY

Currently, land conversion tariff policy existed only in Sleman Regency and Yogyakarta Municipality. Since the implementation of the policy, Sleman Regency, the Regency with very active and rapid land conversion, have shown a decreasing trend of new land conversion. But the developer is moving to Bantul Regency where such tariff does not exist. In order to hinder this, land conversion tariff must also be introduced in Bantul Regency as well as Kulon Progo and Gunung Kidul Regency.

CONCLUSION

Land conversion becomes one of major issue on development country. In the case of Yogyakarta province, implemented land tariff policy couldn't control this phenomenon. The calculation of the tariff is based on the land price set by the tax office (NJOP: Tax Object Price), which is usually very low in comparison to the market price of the land. This way, the tariff is not a hindrance for converting land use. Following action should be taken to overcome land use conversion: Smaller minimum area that requires a permit for land conversion, higher land conversion tariff, and development of land conversion tariff in all Regencies in DIY.

ACKNOWLEDGMENT

The authors would like to thank Prof. Dr. Junun Sartohadi of Gadjah Mada University as the Leader of the LUPIS Indonesia Team and Prof. Desmond McNeil of University of Oslo, Norway as the Supervisor.

REFERENCES

- Adji, T. N., Marwasta, D., & Nurjani, E. (2007). *Pemodelan recharge air tanah tahunan Kotamadya Yogyakarta*. Yogyakarta: Fakultas Geografi.
- Agus, F., Watung, R. L., Suganda, H., Tala'ohu, S. H., Wahyunto, Sutono, S. Kundarto, M. (2002). *Assesment of environmental Multifunction of paddy farming in Citarum river basin West Java, Indonesia. Multifunction and AgriicaturalLand Conversion*. Bogor: Puslitanak Departemen Pertanian.
- BAPPEDA DI Yogyakarta. (2009). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2009-2013*. Yogyakarta: BAPPEDA.
- Guipponi, C. (2002). *From the DPSIR reporting framework to a system for a dynamic and integrated decision making process*. European Policy and Tools for Sustainable Water Management. Venice: Italy.
- Iqbal, M., & Budhi, G. S. (2008). *Perspective of Agri-Environment Service Incentives in Indonesia, Developing Countries and OECD Members*. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 1-16.
- Kristensen, P. (2004). *The DPSIR framework. Comprehensive Assesment of the Vulnerability of Water Resources to Environmental Change in Africa River Basin*. Nairobi.
- LUPIS Indonesia. (2010). *Proposing Scenarios to Overcome Land Use Change in Yogyakarta*. Graduate and Post-Graduate Workshop. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Marwasta, D. (2010). *Urban Growth versus Smart Growth: Towards Yogyakarta Slow City*. (p. 10). Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Odermatt, S. (2004). *Evaluation of Mountain Case Studies by Means of Sustainability Variables: A DPSIR Model as an Evaluation Tool in the Context of the North-South Discussion*. Mountain Research and Development, 336-341.
- Purwanta, B. (2008). *Metode Penentuan Disinsentif Pajak Bumi Bangunan Berdasarkan Penyimpangan Pemanfaatan Objek pajak Terhadap Rencana Tata Ruang*. Bandung: Bandung Institute of Technology.
- Randal, A. (1987). *Resource economics: An economic approach to natural resource and environmental policy*. New York: John Wiley and Sons Inc.
- Sisiana, E. (2005). *The Implication of Land Use Change from Wetlan Into Residence Estate on Property NJOP in Karawang*. Bandung: Bandung Institute of Technology.
- Subanu, L. (2008). *Governing urban development in Dualisting Societies: A Case Study of The Urban Region of Yogyakarta, Indonesia*. In T. Kidokoro, N. Harata, L. P. Subanu, J. Jessen, A. Motte, & E. P. Seltzer (Eds.), *Sustainable City regions : Space, Place and Governance*. Japan: Springer.

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

**EKOLOGI POLITIK DAN DINAMIKA SOSIO-EKONOMI DI DATARAN TINGGI
KABUPATEN PEMALANG, JAWA TENGAH**

**(POLITICAL ECOLOGY AND SOCIO-ECONOMY DYNAMICS IN UPLAND
PEMALANG DISTRICT, CENTRAL JAVA)**

Nur Rosyid*)

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

Korespondensi Penulis: nur.rosyid@mail.ugm.ac.id

Abstract

This paper explain the role of state in ecological aspects in the forming of socio economic dynamics in upland Pemalang District, especially in migration dynamic, the expansion and constriction of labours, and their negotiation to the ecological changes. So far, many scholars set out the demographic problems by the issues of poverty, inequality resources, increase of population, labour surplus, and so on. This causal explanation was lack in question on what kind of possibilities force those problems happened. The research has been done in the upland of Watukumpul, Pemalang, Central Java, try to understand how the upland demographical dynamics situated by political-economic and ecological forces. This area is suitable because of vast spreading in changing of farming system: from rice and glagah cultivation to cash crop of Albasia through the reforestation programs and Green campaign. By using quantitative and qualitative method and political ecology approaches. I assume that the ecological changes are forced and situated by political economic state interventions through policies and environmental condition which both farmer and state negotiation be possible. The result show, there was a changing to develop the new rural economic (new plantation) and migration pattern as a part of farmer strategies concerning to the economic opportunities and state intervention through reforestation programs. These choices imply to the changing of farmer's daily routines and their household production.

Keyword: Demography, Political Ecology, Economic and Environmental Change, Farmer Strategies, Migration Pattern

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan peran Negara di sektor ekologi dalam membentuk dinamika sosial ekonomi dataran tinggi Kabupaten Pemalang, khususnya dinamika migrasi, penyempitan dan perluasan sektor pekerjaan, dan negosiasinya dengan perubahan ekologi. Selama ini, studi mengenai permasalahan kependudukan berangkat dari isu kemiskinan, ketimpangan sumber daya, lonjakan populasi, dan surplus tenaga kerja, cenderung menganalisis dari sisi hubungan kausalitas. Penjelasan kausalitas ini mempunyai kelemahan dalam menjawab apa yang memungkinkan kondisi tersebut dapat terjadi. Penelitian yang dilakukan di dataran tinggi Watukumpul, Pemalang, Jawa Tengah, mencoba memahami bagaimana dinamika kependudukan dataran tinggi disituasikan oleh kekuatan ekonomi politik dan kondisi ekologis. Permasalahan di daerah tersebut cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut karena ada praktik pengubahan jenis tanaman produksi dalam waktu yang relatif singkat: dari tanaman glagah dan padi ke tanaman Albasia yang cukup masif melalui program penanaman pohon dan kampanye penghijauan. Metode penelitian adalah kombinasi kuantitatif berdasarkan data sekunder dan kualitatif serta menggunakan pendekatan ekologi politik. Terdapat asumsi bahwa perubahan ekologi yang terjadi bukan dikarenakan rasionalitas penduduk setempat saja, melainkan ada intervensi politik-ekonomi negara melalui kebijakannya, serta kondisi lingkungan yang memungkinkan kedua itu bisa berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat beberapa perubahan strategi petani dalam mengembangkan produksi tanaman barunya dan pola-pola migrasi sebagai bagian dari siasat membaca peluang-peluang ekonomi. Pilihan ini berimplikasi terhadap perubahan rutinitas dan keseharian pola produksi di tingkat keluarga petani.

Kata Kunci: Kependudukan, Ekologi Politik, Perubahan Ekonomi dan Lingkungan, Strategi Petani, Pola Migrasi

STUDI DATARAN TINGGI DAN UPAYA-UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

Tema kependudukan yang hendak dibahas di dalam tulisan ini berangkat dari persoalan ekologi dan ekonomi-politik. Berbagai studi kependudukan pada umumnya berangkat dari perubahan kuantitas demografi yang kemudian diarahkan untuk mencari sebab-musabab (probabilitas kausal) terjadinya perubahan tersebut. Banyak pustaka demografi mengangkat masalah-masalah dampak migrasi (Singarimbun, 1996; Khoo, Platt, Sukamdi, 2015) akibat kondisi pedesaan, seperti kemiskinan dataran tinggi (Li [eds], 2002); rendahnya pemasukan (Manning, 2005) lonjakan populasi (Firman, 2015) maupun masalah krisis yang luas pada aspek lingkungan, ekonomi dan demografi (de Haan, 1999). Migrasi pun dipahami sebagai strategi mengatasi kemiskinan (lihat Khotari, 2002; Ellis, 2003). Contoh-contoh kajian tersebut terlalu menyederhanakan persoalan-persoalan kependudukan tanpa melihat bagaimana dampak dan penyebab tersebut disituasikan dan dikondisikan oleh kekuatan-kekuatan politik-ekonomi dan situasi ekologi-geografis.

Persoalan intervensi politik-ekonomi mengenai ekologi bisa berimbas ke permasalahan yang luas seperti isu-isu kependudukan. Artinya, dinamika kependudukan harus dibaca dan dipahami dari berbagai sudut dan konteks yang luas. Pokok persoalan yang hendak saya angkat dalam tulisan ini ialah studi dataran tinggi dan konteks perubahan ekologi dan sektor ekonomi akibat intervensi dari luar dan bagaimana masyarakat setempat bernegosiasi dan berstrategi terhadap intervensi tersebut.

Program-program peningkatan kesejahteraan (pembangunan) di pedesaan seringkali menyangkut perbincangan mengenai peningkatan produksi pertanian, termasuk tanaman pangan. Permasalahan kerentanan pangan misal, nampak krusial yang dapat kita lihat dari kasus malnutrisi atau kasus kematian akibat kelaparan yang pernah terjadi di Indonesia. Berdasarkan pemberitaan di harian Kompas, angka anak di bawah lima tahun tidak terpelihara di Indonesia, telah meningkat dari 1,8 juta pada tahun 2005 sampai ke angka 2,3 juta pada tahun 2006. Angka ini memperlihatkan persoalan pangan di Indonesia menjadi isu paling penting dan harus segera dicarikan solusinya¹.

Salah satu isu besar yang dicanangkan pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan nasional ialah peningkatan produksi tanaman pangan. Isu ini direspon oleh Kementerian Pertanian dengan dicanangkannya program P2BN (Peningkatan Produksi Beras Nasional). Program tersebut menarget surplus beras nasional pada tahun 2014 sebesar 10 juta ton². Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil inisiatif untuk mendukung program tersebut dengan menetapkan sasaran produksi padi sebanyak 10.534.958 ton. Jumlah ini akan ditarget dengan luas lahan 1.797.671 ha dan produktivitas sebanyak 58,60 kwintal per hektar³. Rencana tersebut dijalankan melalui berbagai upaya, antara lain: meningkatkan produktivitas, melakukan perluasan dan pengelolaan lahan, menurunkan konsumsi beras, menyempurnakan manajemen, dan dukungan kebijakan dan regulasi dari kementerian maupun lembaga lainnya⁴. Berdasarkan laporan Jhantami, upaya peningkatan produksi tanaman pangan, khususnya beras, menemui beragam kendala. Produksi beras pada tahun 1990-an yang mencapai 3,52% dari dekade sebelumnya, terus mengalami penurunan sebesar 1,04 % per tahun. Tidak adanya peningkatan signifikan ini, dikarenakan tingkat produktivitas hanya mencapai 0,05 % per tahun⁵.

Penurunan ini, berdasarkan penelitian Surono, mulai terjadi secara tajam semenjak krisis ekonomi tahun 2007⁶. Pada tahun tersebut, penurunan angka produktivitas beras mencapai 3,4% dan di tahun 2008 mencapai 4,6 %. Tidakkah jumlah tersebut menjadi permasalahan krusial dalam ketahanan pangan nasional kita? Surono berasumsi hal ini disebabkan oleh gejala alam, yakni gejala El Nino yang menyerang Indonesia waktu itu. Pengaruh lainnya yaitu: dampak penggunaan pestisida atau obat-obatan tanaman, fluktuasi iklim dan bencana alam, dan kemerosotan basis sumber daya alam.

² Lihat <http://ditjen.deptan.go.id/index.php/lokasi/452-target-surplus-beras-10-juta-ton-optimis-tercapai-pada-2014>, diunduh pada tanggal 14 Juni 2012 pukul 01.25 WIB.

³ Lihat http://www.jatengprov.go.id/?document_srl=26783, diunduh pada tanggal 14 Juni 2012 pukul 01.28 WIB.

⁴ ditjen.deptan.go.id, ibid

⁵ Lihat Swastika dkk, dalam Jhantami, *Putting Food First: Toward community-based food security system in Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press. 2008. hlm: 29

⁶ Lihat Surono, "48 anak kekurangan gizi di Jawa Tengah meninggal dunia; Indonesian Nutrition Network [online]; diakses dari: <http://www.gizi.net/cgi-bin/berita/fullnews.cgi?newsid1126761128,15743>; diunduh pada tanggal 14 Juni 2012 pukul 02:53

¹ Lihat harian Kompas, "Malnutrisi, Sebuah Keteledoran Bangsa". 7 Oktober 2006

Akan tetapi, Jhamtani tidak sepenuhnya setuju dengan melihat aspek ekologi di atas sebagai faktor yang mempengaruhi penurunan. Dalam studinya mengenai sekuritas dan insekuritas kebijakan tanaman pangan di Indonesia, dia memberikan kerangka kontekstualisasi permasalahan, meliputi: manajemen sumber daya alam, pembangunan desa, dan perdagangan. Ia berpendapat,

*“A discussion on food security (or insecurity) in Indonesia would be meaningless without analysis on the situation of rice, the most important and most commonly eaten staple food. Rice is consumed by 90% of the population and such rice production, distribution, and consumption is a complex issue in with socio-economic and political dimensions. Most cases of food insecurity, particularly in the past, was indicated by rice availability and consumption, and responded to through providing food aid in the form of rice”*⁷.

Pernyataan ini mengindikasikan, persoalan tanaman pangan bukan melulu masalah ekologis, tetapi juga merujuk pada permasalahan ekonomi politik.

Menariknya, dari angka 10 juta ton tersebut, Jawa Tengah menyuplai cadangan Beras Nasional sebesar 57%. Padahal faktanya, Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi paling signifikan, didapati kasus alih fungsi lahan yang cukup masif. Selama tahun 2005, terdapat 13.449 kasus, khususnya di daerah gersang dan terdeforestasi. Artinya, penurunan produksi tanaman pangan di Jawa Tengah di sebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian. Pemerintah mengindikasikan alih fungsi ini disebabkan karena ekspansi pembangunan gedung, perumahan, maupun bangunan fisik lain⁸.

Saya berasumsi, penurunan produksi tanaman pangan di Jawa Tengah, tidak selamanya disebabkan oleh ekspansi pembangunan fisik. Jika didalam laporan di atas disebutkan, alih fungsi ini terjadi terutama di daerah gersang dan terdeforestasi, maka dataran tinggi merupakan wilayah yang perlu disorot lebih lanjut. Apalagi selama ini, dataran tinggi seringkali

mengalami praktik-praktik peminggiran. Sebagaimana disebutkan oleh Tania Li, masyarakat dataran tinggi justru telah terbentuk sebagai wilayah yang tersisih melalui perjalanan sejarah keterlibatan politik, ekonomi, dan sosial dengan daerah dataran rendah, yang sudah lama dan masih terus berlangsung⁹. Poffenberger sepakat dengan pandangan ini. Menurutnya, “karena alasan praktis dan politis, penduduk di dataran tinggi di Asia Tenggara masih tidak banyak mendapatkan perhatian”¹⁰. Ketersisihan ini pada akhirnya menyebabkan masyarakat pegunungan dan masyarakat pedalaman, identik dengan masyarakat terisolir. Padahal menurut Colombijn¹¹, pusat-pusat konsentrasi penduduk Indonesia pada masa prakolonial bukanlah di daerah pesisir, melainkan di daerah pedalaman, khususnya di lembah-lembah dan dataran tinggi pegunungan.

Oleh karena itu, dataran tinggi perlu mendapat perhatian lebih lanjut sebagai bagian dari studi dinamika kependudukan, kontestasi ekologi, dan wilayah studi ekonomi-politik. Dengan demikian, paradigma ekologi-politik, sangat relevan dipakai dalam studi ini.

EKOLOGI POLITIK SEBAGAI PENDEKATAN

Pendekatan Ekologi-Politik berkembang dalam cabang Antropologi Ekologi¹². Pendekatan ini sebagai salah satu paradigma dalam Antropologi Ekologi, mulai berkembang sejak permasalahan degradasi lingkungan akibat deforestasi di berbagai wilayah dunia semakin meningkat. Pendekatan ini dikembangkan oleh beberapa pakar lingkungan seperti Peterson (2000), Bryant (1992), Baikie dan Brookfield (1987), Abe-Ken-Ichi (2003). Pendekatan Ekologi Politik, oleh Peterson, merupakan salah satu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan (Ekologi Budaya) dengan Politik Ekonomi dan dinamika antara lingkungan dengan manusia: antara kelompok bermacam-macam di dalam masyarakat dalam skala dari individu-lokal kepada transnasional secara keseluruhan¹³.

⁹ Tania Li, *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2002

¹⁰ Poffenberger 1990, hlm: xxi, dalam Tania Li. 2002. *Ibid*, hlm:xv

¹¹ Tania Li, dikutip dari Anthony Reid. 1988. *Ibid*, hlm

¹² Benyamin Orlove mendefinisikan disiplin Antropologi Ekologi sebagai studi tentang relasi dinamika kependudukan, organisasi sosial, pola-pola kultural manusia, dan lingkungan dimana mereka tinggal. Lihat Benyamin Orlove. “Ecological Anthropology” dalam *Annual Review of Anthropology IX*. Tahun 1980. hlm: 235-6

¹³ Peterson. 2002, dalam Herman Hidayat, John Haba, & Robert Siburian (eds) (2011). *Politik Ekologi: Pengelolaan Taman*

⁷ Jhamtani, *ibid*:28

⁸ Mengenai alih fungsi lahan sawah bisa dilihat di <http://www.pekalongankab.go.id/fasilitas-web/artikel/pertanian/2220-target-surplus-beras-10-juta-terkendala-alih-fungsi-lahan-pertanian.html>, diunduh pada tanggal 14 juni 2012 pukul 02.40 WIB

Asumsi dari pendekatan ini, berdasarkan pandangan Naess, pemberlakuan manusia dilihat sebagai nilai paling penting dalam melihat degradasi lingkungan¹⁴. Paradigma ini lahir dari kritik terhadap studi ahli lingkungan yang melihat kerusakan alam akibat ulah penduduk setempat sehingga mereka harus bertanggung jawab terhadap kerusakan itu¹⁵; maupun akibat dari aktivitas ekonomi yang semakin bebas, meningkatnya investasi secara global, sehingga mereka dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab menangani persoalan ini¹⁶.

Konsep di atas, dipersempit oleh Sinead Bailey dalam bukunya, *Third World Political Ecology* pada tahun 1997. Melalui buku itu, dia mencoba memberikan arah bagaimana pandangan Pett dan Watts di atas, digunakan dalam memahami proses-proses perubahan ekologi di Dunia Ketiga. Menurutnya, seorang ekolog politik harus melihat perubahan lingkungan Dunia Ketiga dan konflik dalam terma problem lingkungan (permasalahan ekologi), konsep pembangunan berkelanjutan, karakteristik sosial ekonomi, aktor-aktor (negara dan pasar), serta wilayah khusus¹⁷. Bailey sudah memberikan arah, bagaimana perubahan lingkungan secara politis tersebut dapat dipahami. Menurutnya, pendekatan ini berawal dari penjelasan bagaimana perubahan lingkungan tersebut bisa berlangsung. Selanjutnya, perubahan itu direlasikan dengan proses-proses politik ekonomi¹⁸.

Kerangka tersebut saya gunakan untuk memahami fenomena kependudukan kaitannya dengan perubahan ekologi, negosiasi, dan strategi petani terhadap intervensi dari luar. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Watukumpul, Pemalang selama pertengahan bulan Januari hingga pertengahan Februari 2012. Penelitian ini merupakan program Jurusan Antropologi UGM untuk memahami pertumbuhan ekonomi baru di wilayah dataran tinggi Jawa: Dieng, Pekalongan, dan Pemalang. Tema yang diangkat dalam penelitian ini adalah "Producing Wealth and Poverty in Indonesia's New Rurals

Economics" kerjasama Jurusan Antropologi Universitas Gadjah Mada dengan University of Toronto, Kanada¹⁹.

INTRODUKSI TANAMAN ALBASIA DI WATUKUMPUL DAN KONVERSI LAHAN

Watukumpul merupakan daerah yang berbantuan. Hampir di tiap ruas petak rumah, terdapat batu-batu besar yang mencuat. Secara demografis, penduduk desa Watukumpul berjumlah 4.994 jiwa: terdiri dari 2.475 jiwa laki-laki dan 2.519 jiwa perempuan. Sedangkan kepadatannya mencapai 884 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk Desa Watukumpul pada tahun 2011 sebesar 1,01 %. Jumlah tersebut terdistribusi berdasarkan umur: 643 jiwa (0-5 tahun), 1.338 jiwa (6-20 tahun), 2.659 jiwa (21-60), dan 354 jiwa (60 tahun keatas).

Kondisi topografi wilayah Watukumpul terdiri dari daerah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 450-800 meter di atas permukaan air laut. Wilayah desa Watukumpul merupakan daerah yang berbukit-bukit, baik yang memiliki kemiringan landai dan curam. Jenis tanah di Wilayah Desa Watukumpul terdiri dari tanah regosol batu-batuan pasir dan intermedier dan tanah latosol yang terdiri dari batu bekuan pasir²⁰.

Masyarakat Watukumpul mengembangkan strategi pertanian sawah tadah hujan; menanam glagah (*Saccharum spontaneum*), nilam (*Pogostemon sp.*), dan cengkih (*Syzygium aromaticum*). Bahkan ada petani yang menanam palawija di wilayah Hutan Negara. Tanaman produktif terakhir yang dikembangkan di sana adalah albasia (*Albizia falcataria*). Beragamnya strategi yang dikembangkan ini, dapat dipahami dalam konteks sejarahnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Tania Murray Li, Pola perubahan ekologi berjalan bersama-sama dengan interaksi masyarakat terhadap lingkungannya. Proses ini tidak dapat dipahami dengan baik kecuali dalam hubungannya dengan sejarah kontak (langsung atau tidak) antara masa kolonial, pemerintah Orde Baru, orang-orang kota, pedagang, dan penduduk yang bermigrasi²¹.

Nasional Era Otta (edisi ke-1, cetakan ke-1). Jakarta: LIPI Press dan Yayasan Obor Indonesia. 2011, hlm: 8

¹⁴ Naess (1987) dalam Peet, Richard, Paul Robbins, dan Michael J. Watts. *Global Political Ecology*. London and New York: Routledge. 1996, hlm: 23-24

¹⁵ Lihat juga Grossman. *The Political Ecology of Bananas: Contract Farming, Peasants, and Agrarian Change in Eastern Caribbean*. University of North Carolina Press. tahun 1997

¹⁶ Lihat Richard Peet dan Watt. Ibid: 24

¹⁷ Lihat Sinead Bailey "Introduction", dalam *Third World Political Ecology*. 1997 hal: 1

¹⁸ Bailey, ibid: 27-28

¹⁹ Program ini diprakarsai oleh Dr. Pujo Semedi Hargo Yuwono dari Antropologi UGM bekerjasama dengan Prof. Tania Murray Li dari University of Toronto. Informasi lebih mengenai program kerjasama penelitian ini dapat diakses di www.ruraleconomics.fib.ugm.ac.id

²⁰ Data demografis Watukumpul diambil dari buku Laporan Penyelenggaraan Desa Watukumpul yang disusun pada tahun 2011. Saya menggunakan data ini atas seijin Sekretaris Desa setempat.

²¹ Ibid :xxii

Proses introduksi tanaman albasia dan pinus di Watukumpul dilakukan dengan memasukkan pertimbangan-pertimbangan teologis dimana nilai-nilai agama menjadi bagian dari advokasi. Eri, salah seorang pegiat Kebun Bibit Rakyat, menjelaskan, orang-orang Watukumpul harus disadarkan untuk menanam pohon. *“Mengurus makhluk yang bernyawa itu merupakan urusan berat kepada Tuhan, manusia tidak boleh seenaknya. Berat lho itu mas, beda kalau suruh buat jembatan atau mbenahi jalan, lho ini urusannya sama Yang Kuasa, kalau sampai mati akhirat mau gimana...?”* terangnya²². Seorang kepala desa dalam sosialisasi berbarengan dengan Musrenbang Desa menekankan pembicaraannya, *“Silahkan pohon itu nanti ditanam, pohon itu ibarat anak kecil, kalau tidak kita sayangi, tidak kita rawat, besok kita tidak akan menikmati hasilnya”*. Introduksi penanaman pohon sebagai agenda dunia dalam menangani pemanasan global, tidak dilakukan dengan kerangka pemikiran akademis. Alasan dan tujuan penanaman pohon albasia tersebut diintroduksi sesuai nalar masyarakat setempat. Secara politis, introduksi semacam ini menjadi strategi mempercepat penerimaan masyarakat setempat terhadap tanaman baru.

Introduksi tanaman produktif di Watukumpul dimulai melalui penanaman pohon pinus dan glagah. Berdasarkan data lapangan, pada tahun 2010 penduduk setempat mendapatkan bantuan pohon pinus dari dinas provinsi sebanyak 10.000 batang, dimana tiap KK mendapatkan 25 batang. Selain itu, desa Watukumpul lewat program KBR tahun 2010 mendapatkan pinus sebanyak 2000 batang dari 60.000 batang yang diproduksi. Bibit-bibit tersebut diberikan secara cuma-cuma kepada penduduk setempat dengan jumlah 50 batang/KK. Jumlah ini untuk ditanam di lahan penduduk cukup besar.

Berdasarkan penelitian Nugroho Priyono²³, Penanaman pinus di Jawa yang dimulai pada tahun 1970-an dimaksudkan untuk mereboisasi hutan gundul, selain disamping sebagai pemasok kebutuhan bakan baku kayu untuk industri kertas. Kualitas kayu pinus dinilai sangat cocok karena serat dan warnanya yang bagus. Selain pohon pinus, warga setempat juga mengembangkan pertanian glagah untuk mendukung keberlanjutan industri sapu yang berkembang sejak tahun 1990-an. Ada juga pohon nilam yang ditanam

untuk industri suling minyak. Pernah suatu ketika pak J bercerita kalau pernah punya lahan glagah 3,5 hektar. Dia menanam nilam ini karena melihat pangsa pasar begitu menjanjikan, yang biasanya 250 ribu per liternya. Akan tetapi pernah mencapai 1,25 juta rupiah. Melihat hal ini, ia menebang separuh glagahnya dan menggantinya dengan nilam. Dia juga bercerita kalau nilam waktu menjanjikan itu, pernah ada seorang juragan yang punya uang Rp 25.000.000. Meskipun hanya meminjam, uang sebesar itu dipakai untuk bisnis nilam. Biasanya dia membeli dari petani seharga biasa. Akan tetapi terus ditimbun menunggu harga tinggi. Sehingga sewaktu harga mencapai 1,2 juta itu dia bisa untung 500%-nya. Sehingga dia bisa mengembalikan lebih dari uang yang ia pinjam²⁴.

Gambaran sebagaimana dikemukakan di atas memperlihatkan dua hal penting mengenai bagaimana masyarakat ‘membaca’ peluang-peluang baru. Pertama, pergantian tanaman yang dilakukan oleh penduduk setempat tidak dilakukan secara menyeluruh, tetapi hanya sebagian dan perlu percobaan. Pilihan ini tentu saja muncul atas intervensi wali masyarakat (pemerintah melalui Dinas Kehutanan dan program KBR (Kebun Bibit Rakyat) maupun NGO seperti BCL (Banowati Cinta Lingkungan) sebagai program dominan pengembangan ekologi beberapa tahun terakhir. Kedua, perubahan tanaman ini dipengaruhi oleh kondisi pangsa pasar: prospektif atau tidak. Masyarakat mendasarkan keputusannya atas pertimbangan seberapa besar permintaan pasar yang terlihat pada besar kecilnya harga.

Hal yang sama juga terjadi dengan penanaman albasia. Berdasarkan keterangan seorang pengelola hutan rakyat, jenis pohon ini belum bisa ditentukan kapan awalnya berkembang di sini. Saya mengira, introduksi albasia dibawa oleh pedagang pedagang sapu atau pedagang luar. Kemudian di tahun 2010 didirikan empat tempat KBR (Kebun Bibit Rakyat) di empat desa sebagai program pembibitan secara mandiri. Empat desa tersebut meliputi: Watukumpul, Majakerta, Medayu dan Tundagan. Pelaksanaannya dibantu oleh Bank BRI. Pendirian KBR ini, berdasarkan keterangan salah satu elit setempat, yakni “untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar bisa membuat bibit sendiri”. Menurutny, selama ini masyarakat masih membeli bibit albasia dari pedagang-pedagang keliling yang berasal dari daerah lain.

Ada berbagai informasi mengenai pembagian bibit albasia di Watukumpul ini. Pertama program KBR

²² Catatan lapangan tanggal 28 Januari 2012

²³ Lihat Priyono, C. Nugroho. “Hutan Pinus dan Hasil Air” pdf format, 2002. Diunduh dari www.scribd.com/doc/770715/Hutan-pinus-dan-hasil-air pada tanggal 10 april 2012 pukul 03.00 WIB.

²⁴ Catatan lapangan tanggal 29 Januari 2012

pada tahun 2010 dan 2011, melalui program ini, masyarakat mendapatkan jatah bibit gratis rata-rata 100 batang. Semuanya berjumlah 106 petani yang mendapatkan. Akan tetapi ada beberapa yang mendapat lebih, yakni 150, 200, dan bahkan 300. Ada 5 orang yang mendapat jatah 300. Selain itu ada dua orang yang mendapatkan 250 batang. Semua bibit yang dibagikan tidak mencapai 20.000, akan tetapi ketika saya rekap, semuanya hanya 18.600 batang. 400 batang rusak.

Selain KBR, ada program dari BRI bernama 'Peduli Kasih'. Program yang berjalan pada tahun 2011 ini berbentuk pemberian bibit albasia gratis kepada petani sebanyak 3.000 batang. Penanaman albasia ini juga disediakan biaya perawatan. Artinya petani mendapat uang dari keikutsertaannya dalam penanaman tersebut. Instansi kecamatan lain juga ikut membantu bantuan bibit pohon sejumlah 7.500 batang seperti dari Dinas Pertanian, Perhutani, dan kecamatan ditambah Koramil.

Menggemanya isu penanaman pohon di daerah Watukumpul tidak lepas dari banyak faktor yang ikut berpengaruh. Perlu di catat, gema tanam albasia tidak hanya atas pertimbangan otonom petani melihat prospek pasar. Penanaman ini pada mulanya digunakan untuk menanggulangi seringnya longsor di daerah tersebut²⁵. Pemerintah setempat merespon kasus tersebut dengan program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL). Program ini dijalankan dengan pengajuan penduduk setempat bekerja sama dengan pemerintah desa, dimana lahan-lahan atau lereng yang kritis disarankan untuk ditanami albasia²⁶. Bibit-bibit tersebut diberikan secara cuma-cuma dan boleh di panen jika layak tebang: sistem 'tebang pilih'. Maksudnya, penduduk yang menebang satu pohon, diwajibkan untuk menggantinya dengan lima atau sepuluh bibit baru²⁷. Tidak hanya itu

saja, melalui penanaman pohon ini, jelas pemerintah mempunyai kepentingan dalam menanggapi isu perubahan iklim dan perdagangan karbon. Dalam perspektif pemerintah, sistem ini memungkinkan upaya reforestasi hutan terus berlangsung dan tetap terjaga. Dengan demikian, intervensi terhadap preferensi masyarakat terhadap peluang-peluang ekonomi berangkat dari kondisi-kondisi ekologis seperti ini.

Di samping itu, masifnya penanaman albasia juga tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Hutan Pinus. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nugroho Priyono di atas, penanaman pinus pada mulanya dimaksudkan sebagai pemasok kayu. Saya melihat ternyata rencana ini tidak dijalankan dengan semestinya. Pinus di sekitar Watukumpul tidak lagi diproduksi sebagai pemasok kebutuhan kayu, tetapi diambil getahnya. Apalagi semakin tua pohon itu, semakin banyak getah yang dihasilkan. Sehingga kebutuhan kayu pasar harus segera dipenuhi dari jenis pohon yang lain. Berdasarkan keterangan yang saya dapatkan dari SKAU (Surat Keterangan Asal-Usul)²⁸, "*Sekarang pinus kalau apa-apa harus ada ijin, atau menebang dalam kapasitas besar maupun kecil*". Padahal kebutuhan kayu dunia semakin besar. Sedangkan, hutan-hutan produktif di Jawa hanya sedikit dari total keseluruhan hutan yang dikelola. Hutan produksi terbatas 23.398.154 hektar dan hutan produksi tetap 35.925.314 hektar. Dengan demikian hutan lindung yang luasnya 32.221.389 hektar hanya 23% dari luas kawasan hutan²⁹. Artinya, kemungkinan perluasan produksi kayu tidak dapat diandalkan dari luasan areal hutan negara yang tersedia. Untuk itulah tanaman albasia mempunyai peran ganda dalam menjawab persoalan tersebut, selain fungsinya sebagai pereduksi emisi carbon. Pilihan ini cukup logis secara ekonomis, karena masa pertumbuhannya yang relatif cepat. Albasia sudah bisa dipanen dalam jangka 4-5 tahun, tetapi terkadang petani memanennya berumur 2-3 tahun.

Albasia bagi petani setempat menjadi pilihan yang lebih menjajikan daripada jenis tanaman lain, seperti padi maupun glagah. Saya mendapatkan informasi

²⁵ Kasus longsor adalah satu bencana alam yang sering terjadi di daerah Watukumpul. Ada informasi kalau longsor ini pernah menimbulkan banyak korban, bahkan satu dusun pernah dipindah. Pada saat penelitian berlangsung, hampir tiap hari beberapa titik lereng terjadi longsor kecil yang mengganggu jalan.

²⁶ Lihat juga Roy Ellen, *ibid*: xxi-xxii. Dia menjelaskan kalau masing-masing bentuk produksi di pedesaan seperti peladangan berpindah, produksi tanaman yang langsung dijual, hasil perkebunan, aturan kontrak perusahaan pertanian, pekerja upahan dalam industri hasil hutan, semuanya ini, "dipengaruhi oleh akses pasar yang makin meningkat, introduksi teknologi baru, yang kadang-kadang disponsori oleh pemerintah, tetapi di pedalaman paling sering diadopsi atas dasar inisiatif setempat".

²⁷ Banyaknya bibit yang harus diganti ini ternyata bermacam-macam. Kasus di desa Bongas, petani yang menebang alba pemberian program Gerhan, diwajibkan mengganti dengan 10

bibit baru. Sedangkan di desa Wisnu dan sekitar kecamatan, petani diwajibkan untuk menggantinya dengan 5 bibit baru.

²⁸ SKAU ini merupakan semacam firma yang dimiliki pemilik penggajian kayu bekerjasama dengan kehutanan, khususnya HPH untuk menangani kontrol penebangan kayu. Setiap sekali ijin pengangkutan, dikenakan biaya Rp 25.000/mobil/sehari. Di Watukumpul, terdapat 4 cabang SKAU.

²⁹ Diunduh dari <http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/1622> pada tanggal 14 April 2012

menarik mengenai penjelasan seorang petani terhadap sepetak sawah di pinggiran hutan pinus. Suatu hari saya dengan pak J jalan-jalan ke sawah. Di depan, terlihat sepetak sawah dengan bekas potongan-potongan batang padi. Katanya, padi itu baru dipanen beberapa hari yang lalu. Luasnya sekitar 50x50 meter. Lahan seluas ini hanya mampu ditanami satu kilo, bahkan hanya mampu menghasilkan satu kuintal gabah. Akan tetapi kalau ditanami dengan albasia, ketika kutanyakan, lahan seluas itu bisa ditanami sekitar 20 batang. Kira-kira untung mana pak? “Sama aja”, jawabnya. Dia pun menjelaskan maksudnya sembari memberikan perhitungannya terhadap dua pilihan. Kalau ditanami padi, dalam jangka empat bulan mampu menghasilkan Rp 300.000/karung ($\pm$ 50 Kg) dengan catatan itu musim panen. Sedangkan albasia baru akan bisa dipanen setelah berumur tiga tahun. Dengan harga per batangnya sekitar dua ratus ribu rupiah. Kalau ditimbang mungkin akan begini, dengan melihat waktu yang sama, artinya tiga tahun, maka hasil padi sama dengan $Rp\ 300.000 \times 4 \times 3 = Rp\ 3.600.000$. Sedangkan kalau albasia hasilnya $Rp\ 200.000 \times 20 = Rp\ 4.000.000$. Hitungan seperti ini masih kasar. Hasil tersebut belum dikurangi untuk modal pupuk dan tenaga intensif sejak penanaman hingga panen. Sedangkan, kalau dia menanam pohon, dia tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga selama perawatan. Bahkan, dia dapat memanfaatkan rumput yang tumbuh di bawahnya untuk pakan ternak³⁰.

Masifnya penanaman tersebut juga didorong oleh meningkatnya pendidikan di dataran tinggi. Penduduk sekitar Watukumpul beberapa tahun belakangan, mulai sadar akan pendidikan bagi anaknya. Bahkan sekarang mulai muncul kesadaran orang tua untuk wajib menyekolahkan anaknya. Rasa ‘malu’ menjadi pertimbangan bagi mereka, jika anak tidak bisa merasakan bangku sekolah. ‘Malu’ juga dirasakan seorang anak tersebut jika ia setelah sekolah, menjadi orang terdidik, harus kembali mengolah lahan sawah tadah hujan orang tuanya. Sebagaimana disebutkan oleh Nicolaas Warouw dalam studinya mengenai pekerja di Tangerang³¹, introduksi terhadap gagasan tentang pembangunan pada gilirannya telah

memberikan beban pada anak-anak desa berupa sebuah citra mengenai dirinya yang menjadi bagian dari keterbelakangan kawasan pedesaan. Wacana pembangunan dalam banyak buku teks sekolah lebih banyak mengabadikan gambar jalan-jalan beraspal, gedung pencakar langit, kota yang tertata baik, pesawat terbang, dan pabrik beserta cerobong asapnya sebagai simbolisasi industrialisasi di Indonesia.

Beberapa orang yang berprofesi karena latar pendidikan, seperti PNS maupun guru, memilih untuk menanam sawahnya dengan albasia. Saya menemukan kasus, banyak orang tua yang tidak ingin mengantisipasi masa depan anak-anak mereka untuk tetap mendapatkan kehidupannya dari pertanian. Sehingga masuk akal jika mereka menginvestasikan keuntungannya untuk keperluan pendidikan dan gaya hidup perkotaan.

Faktor terakhir yang ikut mempercepat proses masuknya tanaman albasia adalah lewat organisasi pemuda setempat yang bernama BCL (Banowati Cinta Lingkungan). Organisasi ini bergerak di bidang konservasi lingkungan, yang lahir sebagai respon terhadap maraknya penggundulan hutan di gunung Banowati. Salah satu kegiatannya adalah kemah alam dan penanaman pohon. Keterlibatan LSM lokal ini cukup berpengaruh terhadap pengenalan kesadaran akan “indahya lingkungan yang hijau”. Kesadaran yang dikerangkai dalam bingkai konservasi hutan maupun penanaman tanaman keras.

Informasi-informasi tersebut semakin memperlihatkan adanya kontestasi kepentingan dalam pengelolaan ekologi di dataran tinggi. Kontestasi ini pada gilirannya turut mempengaruhi pembacaan petani maupun aktor lainnya dalam menentukan pilihan, orientasi, dan strategi pemanfaatan suatu peluang tertentu.

DAMPAK PENANAMAN ALBASIA TERHADAP SEKTOR AGRARIA PEDESAAN

Sebelum menelusuri dampak pergantian tanaman terhadap produksi pangan di Watukumpul, perlu diketahui terlebih dahulu seberapa banyak bantuan bibit pohon yang disumbangkan. Di bawah ini data jumlah pohon yang sempat dibagikan kepada masyarakat Desa Watukumpul selama dua tahun terakhir. Selain itu juga seberapa luas lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

³⁰ Catatan lapangan tanggal 30 Januari 2012

³¹ Makalah Disampaikan pada Seminar “Menentukan Lokasi Perjuangan Sosial Melalui Reformasi Pendidikan di Indonesia (Refleksi Kritis Gagasan ‘Field of Struggles’ Pierre Bordieu), 24 Maret 2008, diselenggarakan oleh Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik – Universitas Gadjah Mada. Paper ini merupakan penulisan ulang atas makalah penulis yang berjudul “Tercerabutnya Peserta Didik dari Dunianya: Sebuah Pengalaman atas Penyeragaman Kurikulum Sekolah” disampaikan pada Lokakarya Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional pada 13-15 Mei 2007 di Cisarua, Bogor.

Tabel 1. Jumlah Bantuan Bibit Pohon Selama Dua Tahun (2011-2012)

No.	Tahun	Tanaman	Asal	Jumlah	Jatah per KK
1	2010	Albasia	Provinsi	10.000	± 25
		Pinus, Surian, Kalitus	KBR I	60.000	± 50
2	2011	Albasia	KBR II	60.000	± 100-300
			BRI	3.000	± 25
			Instansi Kecamatan	7.500	
			Jumlah	41.100	± 200-400

Sumber: Data diperoleh dari KBR Watukumpul dan wawancara

Tabel tersebut terdapat informasi mengenai seberapa besar bantuan yang diberikan beberapa instansi setempat terhadap masyarakat petani. Ternyata, selama tahun 2010-2011, seorang petani atau KK, mendapat bantuan bibit pohon sebanyak 200-500 batang. Setidaknya, rata-rata setiap petani mendapat jatah 300 batang selama dua tahun.

Secara sekilas, jumlah ini tidak terlalu banyak. Akan tetapi sangat signifikan bagi masyarakat setempat. Berdasarkan keterangan salah satu informan, penanaman bibit albasia harus dilakukan dengan jarak 3x3 meter. Sehingga, setidaknya penanaman bibit pohon sejumlah 300 batang tiap keluarga akan membutuhkan lahan seluas 2.700 meter².

Tabel 2. Tingkat kepemilikan lahan di Watukumpul tahun 2012

Tingkat kepemilikan lahan ³²	Jumlah petani
1 : petani besar (> 1,0 hkt)	149 KK
2 : petani menengah (0,50-0,99 hkt)	473 KK
3 : petani kecil (0,25-0,49)	1.543 KK
4 : petani gurem (0,10-0,24)	1.338 KK
Jumlah	3.503 KK

Tabel 3. Kepemilikan tanah berdasarkan jenis lahan tahun 2012

No.	Jenis Lahan	Jumlah pemilik
1	Sawah	1.847 KK
2	Lahan Kering (Tegal)	662 KK
3	Sawah + Tegal	1.034 KK
	Jumlah	3.503 KK

Distribusi tanah berdasarkan tingkat kepemilikan dan jenis lahan di atas, kalau digabungkan, maka setidaknya jumlah lahan yang diperlukan untuk penanaman pohon albasia, seluas ± 2.000-3.000 meter². Dalam penafsiran saya, terjadinya konversi lahan tanah pertanian untuk tanaman pohon lebih banyak terjadi pada petani kecil dan gurem. Pada dua kelas petani ini, mereka harus melakukan konversi

tanah sawah maupun tanah keringnya untuk penanaman albasia. Jelas, jumlah tersebut sangat besar dan cukup signifikan dalam melihat proses-proses konversi lahan padi maupun lahan kering yang sebelumnya ditanami glagol dan nilam, menjadi lahan tanaman albasia.

Dampak penanaman albasia tidak hanya sampai di sini saja. Ada informasi yang menarik dari data demografi desa setempat yang memperlihatkan beragamnya sektor pekerjaan masyarakat pada saat penelitian ini dilakukan, yakni tahun 2011. Berikut ragam persebaran jenis pekerjaan yang ada di Watukumpul.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan³³

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani		
	Pemilik tanah	625	17,84 %
	Penggarap lahan	165	4,71 %
	Penggarap penyekap	664	18,95 %
	Buruh tani	637	18,18 %
2	Nelayan	-	
3	Pengusaha sedang/besar	-	
4	Pengrajin./industri kecil	36	1,02 %
5	Buruh		
	Industri	131	3,73 %
	Bangunan	495	14,13 %
	Pertambangan	-	
	Perkebunan	-	
6	Pedagang	477	13,61 %
7	Pengangkutan	48	1,37 %
8	PNS	93	2,65 %
9	Polri	3	0,08 %
10	Pensiunan	86	2,45 %
	Jumlah	3.503	100 %

Sumber : monografi Desa Watukumpul tahun 2012

Data di atas merupakan berbagai macam pekerjaan yang digeluti oleh warga desa Watukumpul pada tahun 2011. Tabel tersebut memperlihatkan beberapa informasi. Pertama, ternyata jumlah pemilik tanah di desa Watukumpul hanya sedikit, yakni 625 warga usia produktif dari 3.503 jiwa. Artinya warga yang masih mengolah lahan dan memperkerjakan buruh untuk pertanian sawah, hanya sekitar 17,84 %. Sedangkan di sektor buruh penyekap dan buruh tani masing-masing melebihi pemilik tanah, yaitu 18,95 % dan 18,18 %.

³³ Sumber dari Monografi Desa Watukumpul tahun 2011

³²Kriteria ini dipinjam dari konsep distribusi kepemilikan tanah dari Amri Marzali, mengenai "Strategi Peisan Cikalang dalam Menghadap Kemiskinan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2003

Kedua, warga yang bekerja di sektor *non-farm* maupun *off-farm*³⁴, seperti: bangunan; industri; maupun perdagangan, terlihat cukup besar, 17,86 %. Informasi dari tabel tersebut adalah telah terjadi pengurangan jumlah warga yang bekerja di sektor pertanian, khususnya menggarap sawah atau tegal. Dengan demikian, maka penanaman albasia, atau program tanam pohon yang selama ini dijalankan berdampak pada dua hal, yakni konversi lahan dan orientasi jenis pekerjaan.

Berdasarkan keterangan dan hasil observasi, saya melihat mulai ada pengaruh yang cukup signifikan terhadap pola keseharian petani. Masuknya tanaman baru ini, membuat waktu luang mereka menjadi semakin panjang. Di sini waktu luang merupakan hal yang juga perlu diperhatikan lebih lanjut. Kalau sebelumnya, ketika penanaman padi masih besar, petani mempunyai tradisi ‘migrasi singkat’. Migrasi yang saya maksud di sini adalah migrasi dilakukan ketika se usai masa tanam sampai masa panen, sekitar 2-3 bulan. Dalam rentang waktu ini, kaum laki-laki memilih untuk pergi ke kota atau daerah lain untuk mencari pekerjaan, entah di bangunan, sopir, atau toko, dll. Sedangkan pengurusan sawahnya diserahkan kepada perempuan. Jika waktu 2-3 bulan saja membuat mereka harus mencari pekerjaan di kota, lantas bagaimana dengan tanaman albasia? Apa signifikansinya terhadap transformasi pedesaan dataran tinggi? Sub bab berikut akan dijelaskan lebih jauh

NEGOSIASI PETANI DAN ORIENTASI KERJA: DISKUSI DALAM KONTEKS KEPENDUDUKAN

Pendekatan Ekologi Politik telah memberikan banyak pemahaman baru mengenai situasi kependudukan dan ekologi di dataran tinggi Jawa, khususnya Watukumpul. Digunakannya pendekatan ini dikarenakan ada asumsi bahwa perubahan lingkungan tidak lepas dari peran politik-ekonomi negara; pengetahuan, strategi, dan keputusan penduduk setempat; serta pasar dan kapitalisme global. Sebagaimana Tania Li menjelaskan³⁵, proyek-proyek kebudayaan, ekonomi, dan politik, yang diikuti oleh masyarakat pedalaman--yaitu hal-hal yang mereka sendiri memang berusaha untuk mencapainya--

terbentuk melalui hubungannya dengan berbagai agenda hegemoni, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada hegemoni ini karena tidak ada satu bentuk hegemoni yang benar-benar dominan. Pada dasarnya masyarakat memiliki pemikiran dan alternatifnya sendiri. Ketiga faktor tersebut tidak berada dalam hubungan linear dimana lingkungan baru adalah hasilnya. Di sana ada proses dialektis cukup rumit antar ketiganya dalam waktu lama dan masing-masing mempunyai kuasa yang relatif sama berdasarkan posisi dan kelasnya.

Permasalahan mengenai kurang berkembangnya pertanian di daerah tropis, yang dalam pandangan Borgstrom (1973), disebabkan karena kurangnya ‘modal alami’ yang tersedia dari hasil eksploitasi jangka pendek. Hasil panen suatu tanaman pada saat tertentu, seharusnya sebagian besar dianggarkan untuk pembiayaan pengelolaan tanaman musim selanjutnya. Dalam tahun-tahun belakangan, telah mulai disadari oleh petani setempat, dengan lahirnya metode tumpang sari dan atau agrosilvikultur³⁶. Modal ini bisa diperoleh dengan mudah jika tanaman yang diproduksi dibutuhkan oleh pasar. Artinya petani harus menanam suatu tanaman tertentu yang lebih propektif terhadap pasar untuk memperbesar perolehan uang. Saya melihat, tanaman albasia menawarkan itu kepada penduduk setempat. Sehingga introduksi albasia mendorong perubahan ini menjadi lebih cepat.

Proses introduksi tanaman albasia di Watukumpul tidak dijalankan dengan paksaan, tetapi dengan pendekatan kultural. Bentuk introduksi ini terlihat melalui analogi pohon albasia dengan anak kecil yang bakal membahagiakan pemiliknya di kemudian hari. Bentuk lainnya adalah penekanan albasia sebagai makhluk bernyawa “*bakal ada urusannya dengan Tuhan*”, dalam bahasa informan. Selain itu, faktor perkembangan di dataran tinggi juga ikut merubah cara pandang masyarakat kaitannya dengan status dan pemahaman mengenai dunia pasar global.

Proses awal masifnya penanaman pohon di Watukumpul, dilakukan di tebing-tebing kritis dan daerah lahan kering. Proses ini terus berkembang ke areal persawahan, seperti yang terlihat di sepanjang jalan dari Watukumpul sampai ujung kecamatan, seperti desa Tundagan, Gapura, Pagilaran, maupun Bodas. Daerah tersebut berada di perbatasan dengan

³⁴ Mengenai konsep pembagian jenis pekerjaan ini, lihat Masri Singarimbun, “Penduduk dan Perubahan”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996. Kategori (1) merupakan pekerjaan pertanian, (2) pekerjaan luar pertanian (masih ada kaitannya dengan kegiatan pertanian), dan (3) pekerjaan bukan pertanian (tidak ada hubungannya dengan pertanian).

³⁵ Lihat Tania Li, *ibid.* 2002: 5.

³⁶ Agrosilvikultur adalah sistem agroforestri yang mengkombinasikan komponen kehutanan (atau tanaman berkayu/*woody plants*) dengan komponen pertanian (atau tanaman non-kayu). Tanaman berkayu dimaksudkan yang berdaur panjang (*tree crops*) dan tanaman non-kayu dari jenis tanaman semusim (*annual crops*).

wilayah Perhutani terdapat lautan albasia yang hampir siap panen. Begitu juga dengan daerah pinggir jalan, terdapat pohon-pohon albasia ditanam memenuhi petak sawah maupun hanya ditanam di pinggiran sawah. Dalam waktu tidak relatif lama, daerah Watukumpul sudah terlihat hijau seperti pematang hutan albasia.



Foto: Wilayah pertanian Watukumpul yang telah mengalami pergantian tanaman

Foto di atas memberikan gambaran seperti apa yang saya maksudkan di atas. Foto ini diambil dari pinggir jalan Watukumpul-Majalangu. Di bagian atas terlihat hutan negara berkomoditas pinus, berdampingan dengan hutan kelola yang dikembangkan oleh LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) setempat. Di bagian bawah terlihat sawah berdekatan dengan kebun albasia dipadu dengan tanaman jagung dan pisang. Ekologi baru ini merupakan hasil dari interaksi dan modifikasi manusia secara selektif selama beberapa generasi dengan sengaja atau tidak. Dalam pandangan saya, ekspansi albasia ini akan terus berlanjut mengingat kampanye penanaman pohon sebagai bagian dari reduksi pemanasan global dan isu degradasi lingkungan lingkungan masih cukup ramai belakangan ini.

Perubahan ekologi melalui introduksi albasia tersebut telah mendorong adanya differensiasi sosial-ekonomi terutama sektor pekerjaan di pedesaan dataran tinggi Pemalang. Sektor *non-farm* maupun sektor *off-farm* mulai banyak berkembang di pedesaan, sedangkan sektor *farm* sendiri mengalami penurunan, terutama pertanian dengan pengelolaan intensif seperti persawahan. Sektor *non-farm* yang berkembang adalah pengolahan kayu, sektor peternakan kambing, dan pengolahan sapu dari glagah yang ditumpangsarikan dengan albasia. Sedangkan sektor *off-farm* yang berkembang adalah pertukangan, buruh bangunan, dan perdagangan. Sektor-sektor ini membutuhkan mobilitas ke berbagai daerah.

Perubahan komoditas dalam situasi ekologis watukumpul tersebut membawa implikasi yang signifikan terhadap pola migrasi penduduk dataran tinggi, di luar rendahnya pemasukan dari pertanian (Manning, 2005) atau kemiskinan (Khotari, 2002; Ellis, 2003) akibat meningkatnya populasi pedesaan (Firman, 2015) maupun daya tarik perkotaan (Warouw, 1996; 2007) dan meningkatnya akses untuk memperoleh pekerjaan jangka panjang (Khoo, Platt, & Sukamdi, 2015). Rentang waktu yang diciptakan oleh model pertanian sawah hanya berlangsung ketika masa bera dan antara masa tanam dengan masa panen. Sedangkan, penanaman albasia dengan masa panen yang lama, membuat petani memiliki waktu luang yang relatif lebih lama. Sehingga, adanya waktu luang yang panjang ini, membuat mereka harus menyusun strategi untuk mengakses pekerjaan lain. Secara otomatis, peluang yang tersedia ialah di sektor *non-farm* dan *off-farm*.

Kasus petani di Watukumpul semasa pertanian sawah, mereka memanfaatkan waktu luang dua sampai tiga bulan untuk bekerja di kota sekitarnya, seperti: Pekalongan, Yogyakarta, Solo, bahkan sampai Jakarta. Seusai habis masa tunggu panen ini, mereka akan pulang dan kembali bekerja di Sawah. Cara ini sebagai strategi petani setempat mengatasi lahan terbatas dan hasil panen yang tidak mencukupi untuk konsumsi rumah tangga sampai masa tanam berikutnya.

Strategi yang berbeda dikembangkan petani Watukumpul ketika waktu luang dalam penanaman Albasia menjadi dua sampai empat tahun. Kesempatan ini membuka peluang untuk bermigrasi ke daerah yang jauh dengan peluang tabungan (*saving*) yang lebih besar dari penghasilan di perantauan. Kasus petani-petani Watukumpul memilih untuk bermigrasi ke luar Jawa, seperti: Kalimantan Timur dan Barat, Batam, Papua, Sumatera, dan beberapa tempat di Malaysia. Dengan demikian, telah terjadi adanya perluasan migrasi orang-orang dataran tinggi ke dataran rendah, ke kota, sampai ke luar pulau.

Dorongan migrasi ini juga ditentukan adanya nilai 'prestise' yang di bawa oleh orang-orang yang sebelumnya pernah ke kota. Mereka kemudian pulang dan bercerita sambil memperlihatkan keberhasilannya bekerja di sana. Motor baru, mobil, HP, dan sebagainya adalah simbol bagi keberhasilan itu. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Nico Warouw, besarnya arus migrasi ke perkotaan disebabkan karena desa semakin kehilangan daya tariknya akibat ditinggal oleh generasi mudanya, tenaga kerja potensial. Mereka yang sedemikian terobsesi terhadap kemajuan perkotaan beserta dengan

kehidupan dan gaya hidup yang dianggap menjadi representasi modernitas³⁷.

Nilai ‘prestise’ muncul karena adanya tingkat *saving* yang tinggi dibandingkan pendapatan yang diperoleh di desa. Tingkat *saving* yang lebih tinggi ini menjadi pertimbangan baru bagi petani. Orientasi ini tidak saja merubah lahan pertanian menjadi lahan kayu keras, tetapi turut mentransformasi status petani menjadi buruh atau tenaga kerja. Sebagaimana disebutkan Manning³⁸, tingginya angka keterlibatan penduduk Jawa pada sektor pertanian hanya menghasilkan pendapatan yang rendah bagi tiap pelakunya. Akan tetapi Manning berpendapat, sektor pertanian di pedesaan Jawa mengalami kejenuhan dalam menampung tambahan angkatan kerja baru setiap tahun. Sementara, sektor non-pertanian pedesaan belum mampu menyerap tenaga kerja baru dalam pendapatan yang memadai, yang dalam bahasa Manning sebagai ekonomi tingkat rendah (*low level economy*).

Upah yang diperoleh dari pekerjaan-pekerjaan di desa nilainya hanya sedikit. Meskipun mereka mulai diperbolehnya mengolah tanah Perhutani (hutan produksi), tetap saja aksesnya masih terbatas. Akses mengelola hutan yang dibuka Perhutani dengan tujuan sebagai bentuk ‘kerjasama’ dengan penduduk setempat untuk mengelola hutan³⁹. Diperbolehkannya petani menanam palawija, diharapkan petani tidak akan menebangi pinusnya karena dibawahnya ada tanamannya sendiri. Akses masyarakat untuk meningkatkan kapasitas pendapatan tetap terbatas. Lahan-lahan yang bisa diolah petani hanya wilayah yang berdekatan dengan sawah atau kampung. Tentu saja luasan lahan tersebut bisa tidak terlalu luas untuk

sejumlah keluarga di Desa Watukumpul maupun sekitarnya. Di samping itu, berdasarkan kasus petani setempat, sektor pertanian tidak mengalami kejenuhan dan menampung angkatan kerja baru sebagaimana disebutkan Manning. Pengalaman petani setempat ketika mengolah lahan, justru kesusahan untuk mencari tenaga kerja. Minimnya ketersediaan tenaga-kerja disebabkan karena banyaknya pemuda merantau atau melanjutkan pendidikan di kota⁴⁰.

Berbicara mengenai akses petani terhadap lahan di dataran tinggi, akses tersebut tidak menyempit atau berkurang disebabkan adanya lonjakan angka kelahiran (faktor demografi). Dalam konteks ini, menyempitnya akses tersebut terjadi melalui kebijakan dan gerakan konservasi yang mendorong petani menanam tanaman kayu. Menyempitnya akses petani terhadap lahan pertanian produksi pangan, mendorong mereka untuk mengakses sumber-sumber ekonomi non-pertanian di luar daerahnya sendiri. Hal ini cukup berpengaruh terhadap semakin meningkatnya arus urbanisasi dan atau migrasi dari dataran tinggi ke rendah, dari desa ke kota, atau dari Jawa ke Luar Jawa. Dengan demikian, ada satu catatan penting, setiap pengembangan sumber ekonomi memunculkan beragam peluang yang setiap orang bebas untuk memilih. Akan tetapi, pilihan untuk memilih salah satu peluang bisa terjadi karena dikondisikan dan dibatasi melalui intervensi dari luar. Oleh karena itu, penyempitan akses petani terhadap lahan tidak sesederhana berkurangnya kepemilikan tanah, tetapi pengkondisian alih-fungsi lahan dari tanaman pangan ke tanaman keras.

KESIMPULAN

Studi ini memberi gambaran yang lebih luas dalam kajian dinamika kependudukan sejalan dengan dinamika kebijakan pengelolaan dataran tinggi dan perekonomian masyarakat setempat. Dinamika akses petani di dataran tinggi terhadap tanah sebagai bagian paling penting dalam membangun tempat tinggal, ekonomi, hingga persoalan lain yang lebih luas. Dinamika akses terhadap tanah ini tidak hanya semakin menyempit atau berkurang disebabkan lonjakan angka kelahiran (faktor demografi) dari tahun ke tahun. Dalam konteks kajian di dataran tinggi Pemalang, menyempitnya akses tersebut terjadi melalui kebijakan dan gerakan konservasi yang mendorong petani menanam tanaman kayu.

³⁷ Nicolaas Warouw, Makalah Disampaikan pada Seminar “Menentukan Lokasi Perjuangan Sosial Melalui Reformasi Pendidikan di Indonesia (Refleksi Kritis Gagasan ‘Field of Struggles’ Pierre Bordieu), 24 Maret 2008, diselenggarakan oleh Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik – Universitas Gadjah Mada. Paper ini merupakan penulisan ulang atas makalah penulis yang berjudul “Tercerabutnya Peserta Didik dari Dunianya: Sebuah Pengalaman atas Penyeragaman Kurikulum Sekolah” disampaikan pada Lokakarya Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional pada 13-15 Mei 2007 di Cisarua, Bogor.

³⁸ 1987: 78-82 dalam Warouw, *Pemogokan Buruh: Studi Kasus pada Suatu Komunitas Buruh Industri di kabupaten Tangerang, Jawa Barat*. Skripsi jurusan Antropologi UGM. 1996:30 Lihat juga Manning, 2005. *Migration in World History*. New York and London: Routledge

³⁹ Mengenai pembatasan akses masyarakat terhadap hutan di Indonesia dapat dilihat Herman Hidayat, et.al, *Politik Ekologi: Pengelolaan Taman Nasional Era Otda*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2002

⁴⁰ Berkurangnya jumlah tenaga kerja di pedesaan semenjak pemerintahan Orde Baru, sebagaimana disebutkan oleh Nicolaas Warouw, didorong pertumbuhan industri manufaktur di perkotaan yang sifatnya *labour-intensive*.

Menyempitnya akses petani terhadap lahan pertanian produksi pangan, mendorong mereka untuk mengakses sumber-sumber ekonomi non-pertanian di luar daerahnya sendiri. Hal ini cukup berpengaruh terhadap semakin meningkatnya arus urbanisasi dan atau migrasi dari dataran tinggi ke rendah, dari desa ke kota, atau dari Jawa ke Luar Jawa. Dengan demikian, ada satu catatan penting, setiap pengembangan sumber ekonomi memunculkan beragam peluang yang setiap orang bebas untuk memilih. Akan tetapi, pilihan untuk memilih salah satu peluang bisa terjadi karena dikondisikan dan dibatasi melalui intervensi dari luar. Oleh karena itu, penyempitan akses petani terhadap lahan tidak sesederhana berkurangnya kepemilikan tanah, tetapi pengkondisian alih-fungsi lahan dari tanaman pangan ke tanaman keras.

Suatu pertimbangan serius lain dari studi ini ialah introduksi albasia telah membawa perubahan terhadap produksi tanaman pangan di dataran tinggi. Saya berpendapat, produksi beras di dataran tinggi Watukumpul akan berkurang akibat adanya perluasan wilayah tanam pohon albasia sebagaimana beberapa perhitungan dari pak J di atas. Tentu saja permasalahan ini ikut berdampak terhadap isu swasembada beras Jawa Tengah yang dicanangkan gubernur dengan target surplus dua juta ton di tahun 2014. Melihat kondisi pertanian di dataran tinggi begitu ‘suram’, target yang dicanangkan pemerintah provinsi Jawa Tengah menjadi terkesan naif. Dengan demikian, pemerintah harus segera mengantisipasi atau merumuskan ulang kebijakan peningkatan swasembada pangan, konservasi ekologi, peningkatan sumber daya manusia, maupun pengelolaan migrasi dan tenaga kerja terintegrasi.

Pada Akhirnya, persoalan dinamika kependudukan menjadi sangat kompleks dan berkelindan. Untuk itu, tidak mudah untuk mereduksi fakta-fakta di lapangan ke dalam ‘medan’ studi yang bisa dikontrol secara sederhana. Misalnya, persoalan kependudukan hanya dipahami dalam kerangka kependudukan saja, begitu juga dengan dinamika sosial-budaya yang lain. Pengalaman di Watukumpul menunjukkan dinamika kependudukan bersinggungan dengan faktor ekologis, bentuk kebijakan ekonomi program penanaman pohon yang bersinggungan dengan program swasembada beras dengan areal sasaran yang berbarengan. Di sisi lain, kita perlu melihat kemampuan petani menanggapi intervensi dan perubahan ekologis tersebut. Pentingnya sisi ekologi terlihat dari jenis tanaman yang dikembangkan oleh petani ikut menentukan dan mencerminkan bagaimana strategi masyarakat dan model orientasi kerja. Ditanamnya albasia dan pohon jagung maupun beras, memungkinkan salah seorang

dari sebuah keluarga bisa merantau tanpa harus kehilangan pemasukan dari sektor pertanian atau perkebunan. Kayuan-kayuan mempunyai nilai tabungan (*saving*) yang cukup besar untuk masa depan, sedangkan tanaman jagung atau padi digunakan untuk kepentingan subsistensi sehari-hari yang ditopang dengan pendapatan dari pekerjaan di perantaraan.

Dengan demikian, persoalan pangan harus ditempatkan sebagai persoalan dampak signifikan terhadap persoalan migrasi dan ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan semakin kompleksnya persoalan mengenai kehidupan di dataran tinggi Jawa. Untuk itu, ke depan kita harus mencoba untuk melihat dinamika kependudukan bukan dari aspek demografis saja, melainkan dari beragam sisi. Sebab, perubahan sosial dapat terjadi dari dan dalam berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2002. “Studi Mobilitas Penduduk: Antara Masa Lalu dan Masa Depan”. Dalam Tukiran, dkk. *Mobilitas Penduduk Indonesia: Tinjauan Lintas Disiplin*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada
- Ahimsa Putra, Heddy Shri. 1994. *Antropologi Ekologi: Beberapa Teori dan Perkembangannya. Masyarakat Indonesia*. LIPI Jakarta Tahun XX, No. 4
- Borgstrom, Georg. 1973. *The Food and The People Dilemma: The Man-Environment Systems in the Late Twentieth Century*. Massachusetts: Duxbury
- Bryant, Raimon L. dan Sinead Bailey. 1997. *Third Worlds Political Ecology*. London and New York: Routledge
- Ellis, Frank. 2003. “A Livelihoods Approach to Migration and Poverty Reduction”, Naskah disampaikan oleh Department of International Development (DFID), hl: 1-21
- Firman, Tommy. 2015. “Demographic Patterns of Indonesia’a Urbanization, 2000-2010: Continuity and Change at the Macro Level”. Makalah diseminarkan dalam tema Pembangunan, Migrasi dan Kebijakan di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Forsyth, Timothy. 2003. *Critical political ideologi: the politics of environmental science*. London and New York: Routledge
- Geertz, Clifford. 1983. *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, terjemahan Sayogyo. Jakarta: Bharata Karya Aksara

- de Haan, Arjan. 1999. "Livelihoods and poverty: The Role of Migration. A Critical Review of the Migration Literature", *Journal of Development Studies* 36(2): 1-47
- Hardesty, Donald L. 1977. *Ecological Anthropology*. Canada: John Wiley & Sons.
- Harian Kompas. 2006. "Malnutrisi, keteledoran sebuah bangsa"; 7 Oktober
- Harris, Marvin. 2008. "The Cultural Ecology of Indian's Sacred Cattle" dalam Michael Dove dan Carpenter, *Environmental Anthropology: A historical Reader*. Australia. Blackwell Publising. hl:138-153
- Hidayat, Herman, John Haba, & Robert Siburian (eds). 2011. *Politik Ekologi: Pengelolaan Taman Nasional Era Otda*. Jakarta: LIPI Press dan Yayasan Obor Indonesia
- Jhamtani, Hira. 2008. "Putting Food First: Toward community-based food security system in Indonesia". Yogyakarta.: Insist Press
- Khoo, Choon Yen; Mara Platt, Sukamdi. 2015. *Pola dan Dampak Migrasi Pekerja di Kecamatan Sampung, Ponorogo*. Ringkasan hasil penelitian kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan National University of Singapore
- Khotari, Uma. 2002. "Migration and Chronic Poverty", Naskah disampaikan dalam presentasi Chronic Poverty Research Centre, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, *Working Paper* No. 16 (Maret)
- Li, Tania (eds). 2002. *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Li, Tania. 2007. Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resouce Politics and the Tribal Slot. Dalam Michael Dove dan Carpenter, *Environmental Anthropology: A historical Reader*. Australia. Blackwell Publising. hl:339-362
- Manning, Patrick. 2005. *Migration in World History*. New York and London: Routledge
- Marzali, Amri. 2003. *Strategi Peisan Cikalong dalam Menghadapi Kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Mubyarto. 1993. *Sejarah Penelitian Pedesaan: Dua Puluh Tahun Penelitian Pedesaan*. Yogyakarta: P3PK UGM dan Aditya Media
- Orlove, Benjamin S. 1980. *Ecological Anthropology* dalam *Annual Review of Anthropology*. IX, 235-37
- Peet, Richard, Paul Robbins, dan Michael J. Watts . 1996. *Global Political Ecology*. London and New York: Routledge.
- Potter, Lesley. "New transmigration 'paradigm' in Indonesia: Examples from Kalimantan", dalam *Asia Pacific Viewpoint*, Vol. 53, No. 3, December 2012, hl: 272-287
- Priyono, C. Nugroho. 2002. "Hutan Pinus dan Hasil Air" (online) <http://www.scribd.com/doc/770715/Hutan-pinus-dan-hasil-air> (10 April 2012)
- Semedi, Pujo. 2006. Petungkriyono: Mitos Wilayah Terisolir. Dalam Ahimsa-Putra, Heddy Shri. *Esai-Esai Antropologi: Teori, Metodologi, dan Etnografi*. Yogyakarta: Jurusan Antropologi Budaya UGM bekerjasama dengan Kepel Press
- Singarimbun, Masri, dkk. 1996. *Penduduk dan Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sirait, Martua. 2009. *Indigenous Peoples and Oil Palm Plantation Expansion in West Kalimantan Indonesia*. Universiteit van Amsterdam bekerja sama dengan Cordaid Memisa
- Sumartana, et.al. 1996. *Kisah dari Kampung Halaman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Surono, S. 2007. "48 anak kekurangan gizi di Jawa Tengah meninggal dunia; *Indonesian Nutrition Network [online]*; diakses dari: <http://www.gizi.net/cgibin/berita/fullnews.cgi?newsid1126761128,15743>; (14 Juni 2012)
- Warouw, J. Nicolaas. 1996. *Pemogokan Buruh: Studi Kasus pada Suatu Komunitas Buruh Industri di kabupaten Tangerang, Jawa Barat*. Skripsi jurusan Antropologi UGM. 1996
- . 2007. *Tercerabutnya Peserta Didik dari Dunianya: Sebuah Pengalaman atas Penyeragaman Kurikulum Sekolah*. Makalah disampaikan pada Lokakarya Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional pada 13-15 Mei di Cisarua, Bogor.

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

MEMAHAMI ADAPTASI PENDUDUK TERHADAP PERUBAHAN IKLIM UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH DI PULAU-PULAU KECIL BELITUNG DAN BINTAN

(UNDERSTANDING CLIMATE CHANGE ADAPTATION ON WATER FULFILLMENT FOR SMALL ISLANDS POPULATION IN BELITUNG AND BINTAN)

Laksmi Rachmawati

Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Korespondensi Penulis: laksmi_rachma@yahoo.com

Abstract

Freshwater is an essential need for human being thus a sufficient supply of it is required. Naturally, small islands are vulnerable. The occurrence of climate change the vulnerability of these islands increase. Changes on temperature and precipitation can alter the hydrological cycle and will directly affect the water supply in small islands. This paper examines various adaptation efforts implemented by local population and government in small islands situated in Belitung and Bintan. Using quantitative method (survey to 400 respondents) and qualitative method (interview and focus group discussion), the research found that the adaptation has already taken place. The responsive/reactive and anticipatory adaptation are managed by government and local people who live in these small islands. Some of the adaptation actions are widening water storage, buying, searching for new water resources, desalination of salt water, rain water harvesting and improvement of water distribution. In addition, local mangrove management in Selat Nasik acts as adaptation functions for barriers of salt water intrusion. However, water governance has not been prioritized although it is proven to be necessary to support adaptive capacity for fresh water fulfillment

Keywords: *Fresh Water Fulfillment, Small Islands, Adaptation, Responsive/Reactive, Anticipatory, Adaptive Capacity, Water Governance*

Abstrak

Pemenuhan kebutuhan air merupakan masalah pokok, mengingat air merupakan kebutuhan dasar manusia. Pulau-pulau kecil merupakan wilayah yang secara alamiah rentan, dengan adanya perubahan iklim kerentanan pulau-pulau kecil akan meningkat. Perubahan temperatur dan pola curah hujan akibat perubahan iklim akan mempengaruhi siklus hidrologi yang pada akhirnya berdampak pada pasokan air bersih di pulau-pulau kecil. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji upaya adaptasi yang telah dilakukan oleh penduduk dan pemerintah di pulau-pulau kecil yang ada di Belitung dan Bintan. Penelitian dilakukan dengan mempergunakan metode kuantitatif (survei pada 400 responden) dan metode kualitatif (wawancara dan diskusi kelompok terfokus). Hasil studi di pulau-pulau kecil yang ada di Bintan dan Belitung menunjukkan telah ada upaya adaptasi yang bersifat responsif/reaktif dan antisipatif yang dilakukan oleh pemerintah maupun penduduk lokal. Beberapa upaya adaptasi yang telah dilakukan diantaranya dengan memperbesar tampungan sumber air, membeli, mencari sumber air baru, desalinisasi air, pemanenan air hujan maupun melakukan distribusi air yang lebih baik. Selain itu salah satu kegiatan menjaga ekosistem mangrove di Selat Nasik merupakan kegiatan adaptasi perubahan iklim yang dapat menjaga sumber air dari intrusi air laut. Namun demikian, pengelolaan air (*water governance*) belum menjadi prioritas padahal hal ini penting untuk meningkatkan kapasitas adaptasi penduduk terkait pemenuhan kebutuhan air bersih di pulau-pulau kecil.

Kata Kunci: Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih, Pulau-Pulau Kecil, Adaptasi, Responsif/Reaktif, Antisipatif, Kapasitas Adaptasi, Pengelolaan Air (*Water Governance*)

PENDAHULUAN

Pemenuhan air bersih sebagai kebutuhan dasar manusia, merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh penduduk terutama mereka yang tinggal di pulau-pulau kecil. Secara alamiah, pulau-pulau kecil¹ memiliki banyak keterbatasan dalam ukuran, aksesibilitas, sumber daya yang terbatas dan kerentanan yang tinggi terhadap kejadian-kejadian bencana (Hess, 1990 ; Tompkins dkk, 2005) . Studi yang dilakukan oleh Falkland (1992 dan 1993) telah menunjukkan bagaimana kondisi fisik dan geografi pulau kecil menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan terkait dengan pemenuhan kebutuhan air bersih penduduknya. Keterbatasan sumber daya secara langsung berpengaruh pada pasokan air bersih yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk, namun kondisi fisik ini bukan merupakan satu-satunya faktor yang berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan air bersih di pulau kecil. Pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan permintaan air, pengelolaan dan pemanfaatan air bersih serta pemahaman terhadap nilai-nilai budaya terkait air (Kuruppu, 2009) juga merupakan hal yang harus diperhatikan untuk dapat memenuhi kebutuhan air bersih penduduk di pulau-pulau kecil.

Perubahan iklim menjadi satu fenomena signifikan yang tidak dapat dihindari karena terkait dengan meningkatnya risiko yang harus dihadapi terutama oleh penduduk di pulau-pulau kecil. Perubahan temperatur dan curah hujan akan merubah sistem hidrologi yang secara langsung berdampak pada stok air yang dapat dimanfaatkan (Bergkamp dkk, 2003). Selain itu, peningkatan risiko kejadian ekstrem juga akan terjadi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi (Adger dkk, 2003). Dalam laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ke 5 (The Fifth Assessment Report) pada bagian pulau kecil, Nurse dkk (2014) memperlihatkan bagaimana peningkatan risiko dan kerentanan terjadi karena peningkatan frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi yang akan berpengaruh signifikan pada (1) morfologi pulau, (2) ekosistem dan sumberdaya alam², (3) *livelihood*

penduduk dan (4) perumahan dan infrastruktur. Selain karena perubahan temperatur dan curah hujan, risiko peningkatan intrusi air laut juga makin meningkat. Tidak hanya pulau-pulau atol³ yang secara ekstrem mengalami kesulitan air (White dkk, 2007), namun pulau-pulau kecil lain pun rentan terhadap kesulitan air bersih.

Studi-studi terkait pemenuhan kebutuhan air bersih di pulau-pulau kecil telah banyak dilakukan di Kepulauan Pasifik yang sejak awal tahun 90an mengkaji permasalahan kelangkaan air (*water stress* dan *water scarcity*) dan dampaknya ke penduduk (Falkland, 1992; Falkland, 1993; White dkk, 2004; White dkk, 2007; White dan Falkland, 2010). Lain halnya dengan Indonesia, dengan jumlah pulau kecil sekitar 17.500 pulau, belum banyak studi yang mengkaji secara khusus dampak perubahan iklim pada pemenuhan kebutuhan air bersih untuk pulau-pulau kecil di Indonesia. Studi terkait pemenuhan kebutuhan air bersih dan perubahan iklim di Indonesia masih sangat jarang sehingga artikel ini diharapkan mampu membuka mata bahwa secara sosial masalah pemenuhan kebutuhan air di pulau-pulau kecil di Indonesia telah terjadi dan perlu mendapat perhatian, terutama terkait bagaimana adaptasi perubahan iklim yang telah dan perlu dilakukan. Satu studi yang pernah dilakukan diantaranya di Spermonde, Sulawesi Selatan (Schwerdtner Manez⁴ dkk, 2012). Dalam studinya, Schwerdtner Manez dkk (2012) menunjukkan bahwa penduduk Spermonde telah mengalami kelangkaan air dikarenakan secara fisik kondisi pulau-pulau yang kebanyakan merupakan pulau atol memang sulit untuk menyimpan air sebagai cadangan *groundwater*. Selain itu perubahan curah hujan juga turut berperan mempengaruhi ketersediaan air tawar di pulau-pulau kecil di Spermonde. Di sebagian pulau yang diteliti oleh Schwerdtner Manez dkk (2012), adaptasi yang dilakukan adalah dengan membeli air dari Kota Makassar, hal ini berarti ketergantungan penduduk pulau kecil pada daratan makin meningkat.

¹Dalam UU no 27 tahun 2007 dan UU no 1 tahun 2014, pulau kecil didefinisikan sebagai pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan ekosistemnya.

²Sumberdaya air masuk dalam bagian ini

³Pulau atoll secara morfologi sulit untuk menyimpan air, sehingga relatif sumber air tanah menjadi sangat terbatas

⁴Studi di Spermonde dilakukan di Pulau Badi, Barrang Caddi, Bone Tambun dan Saugi

Tulisan ini mencoba mengkaji bagaimana pemenuhan kebutuhan air bersih di pulau-pulau kecil, adaptasi⁵ yang telah dilakukan oleh penduduk maupun pemerintah untuk menghadapi kesulitan air karena dampak variabilitas dan perubahan iklim di Belitung (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) dan Bintan (Provinsi Kepulauan Riau). Artikel ini akan melihat pemenuhan kebutuhan air bersih tidak hanya dari aspek fisik saja, namun lebih menekankan pada kondisi sosial masyarakat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan air bersih. Hal ini berdasarkan pada argumen bahwa untuk memenuhi kebutuhan air bersih tidak hanya bergantung pada kondisi fisik sumber air namun lebih penting memahami perilaku penduduk maupun kelembagaan lokal untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Data yang digunakan bersumber dari bagian studi “Pengarusutamaan Adaptasi dalam Peningkatan Resiliensi Pulau-pulau Kecil”⁶. Data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif dan kualitatif di pulau-pulau kecil yang berada di Kabupaten Bintan (Provinsi Kepulauan Riau) dan Kabupaten Belitung (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang didistribusikan pada 200 rumah tangga di masing-masing lokasi⁷. Pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan diskusi kelompok terfokus yang dilakukan pada masyarakat dan *stakeholder* pemerintah terkait.

PENTINGNYA ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN AIR BERSIH

Perubahan kondisi lingkungan baik karena perubahan iklim maupun karena faktor lain, maka menjadi sebuah keharusan untuk melakukan adaptasi terkait dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih di pulau-pulau kecil. Definisi tentang adaptasi perubahan iklim secara umum menjelaskan bahwa kegiatan adaptasi terhadap perubahan iklim adalah bagaimana individu atau kelompok mempertahankan tingkat kesejahteraan

penghidupan pada kondisi lingkungan yang berubah dengan melakukan dua hal yaitu mengurangi kerentanan atau dengan meningkatkan kapasitas adaptasi (IPCC, 2001; Gallopin, 2006). Untuk konteks Indonesia, Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) yang dikeluarkan oleh Bappenas pada Februari 2014 menyebutkan bahwa adaptasi merupakan upaya untuk meningkatkan ketahanan (resiliensi) suatu sistem terhadap dampak perubahan iklim⁸. Untuk mewujudkan resiliensi diperlukan sinergi antara pusat dan daerah dalam merencanakan kegiatan adaptasi. Selain itu, pemahaman bahwa kegiatan adaptasi adalah hubungan timbal balik antara kondisi sosial dan kondisi ekologis menjadi syarat penting untuk tercapainya resiliensi.

Mengacu pada tipologi adaptasi yang dikembangkan oleh Smit dkk (1999)⁹ terdapat dua jenis kegiatan adaptasi yang dapat langsung terkait dengan adaptasi yaitu yang bersifat mandiri (*autonomous-responsif/reaktif*) dan yang direncanakan (*planned – antisipatif*). Adaptasi mandiri karena bersifat otonom dan responsif dapat dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah sebagai respons atas kondisi yang dialami. Adaptasi mandiri sebenarnya dapat berlangsung tanpa dikaitkan dengan perubahan iklim, yaitu sepanjang ada usaha-usaha mengubah keadaan dan kebiasaan pengelolaan air menjadi lebih baik, seperti menghindari krisis air, kekeringan, dan banjir. Selain itu, sebagai sebuah respons, adaptasi mandiri tidak memerlukan adanya kajian kerentanan yang terkadang berisi kajian tentang proyeksi keadaan iklim dan kondisi stok air (KLH-GTZ-WWF, 2010) Lain halnya dengan adaptasi yang terencana dan bersifat antisipatif. Kegiatan adaptasi tipe ini biasanya akan memerlukan kajian kerentanan dan juga studi terkait skenario perubahan iklim sebagai dasar saintifik untuk menentukan opsi adaptasi yang diperlukan.

⁵Adaptasi didalam artikel ini termasuk kegiatan yang bersifat response/ coping

⁶ Studi ini merupakan salah satu kegiatan PN-9 Perubahan Iklim yang berada dibawah koordinasi Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI (2014).

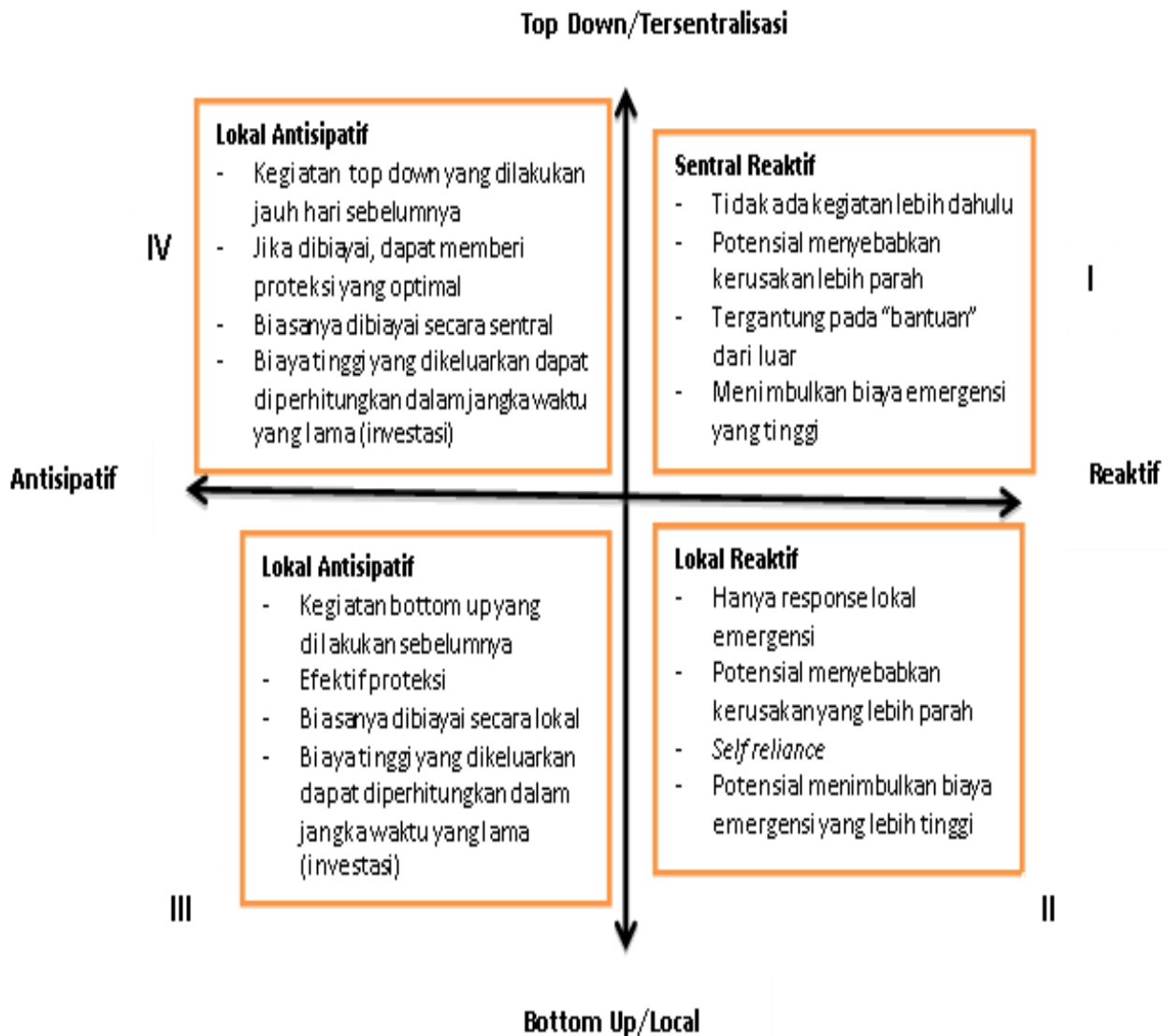
⁷Total kuesioner menjadi 400 buah untuk dua lokasi penelitian

⁸Adaptasi perubahan iklim di Indonesia diarahkan sebagai: (1) Upaya penyesuaian dalam bentuk strategi, kebijakan, pengelolaan/manajemen, teknologi dan sikap agar dampak (negatif) perubahan iklim dapat dikurangi seminimal mungkin, dan bahkan jika memungkinkan dapat memanfaatkan dan memaksimalkan dampak positifnya.(2) Upaya mengurangi dampak (akibat) yang disebabkan oleh perubahan iklim, baik langsung maupun tidak langsung, baik kontinu maupun diskontinu dan permanen serta dampak menurut tingkatnya (RAN API, 2014 p.13)

⁹Tipologi adaptasi perubahan iklim dipaparkan berdasarkan atribut diantaranya tujuan, waktu dan jangkauan spasial, fungsi, bentukdan performance (Smit dkk, 1999)

Tompkins dkk (2008) dengan mempertimbangkan tipologi adaptasi mengembangkan empat opsi pengelolaan kawasan pesisir yang dapat dikembangkan sebagai strategi dalam adaptasi perubahan iklim untuk wilayah pesisir. Dasar dari pembagian empat strategi ini lebih menitikberatkan pada proses pengambilan keputusan untuk kegiatan

adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah (bersifat *top down*) dan lokal/ masyarakat (bersifat *bottom up*); dan apakah kegiatan adaptasi tersebut terencana/antisipatif atau reaktif/responsif. Kombinasi keempat strategi tersebut dijelaskan dalam empat kuadran dalam gambar 1 berikut.



Gambar 1. Empat Opsi Pengelolaan Pesisir di Masa Mendatang sebagai bagian Strategi untuk Adaptasi Perubahan Iklim Sumber: Tompkins dkk (2008)

Strategi empat kuadran yang dikembangkan Tompkins dkk (2008) akan dipergunakan untuk memahami adaptasi yang sudah dilakukan terkait dengan pemenuhan kebutuhan air di pulau-pulau kecil yang ada di Belitung dan Bintan.

DESKRIPSI DEMOGRAFI, KONDISI IKLIM DAN KERENTANAN DI BINTAN DAN BELITUNG

Lokasi penelitian di Kabupaten Belitung terdiri dari empat desa yaitu tiga desa di Kecamatan Selat Nasik

(Desa Suak Gual, Desa Petaling dan Desa Selat Nasik yang semuanya terletak di Pulau Mendanau) dan satu desa di Kecamatan Seliu (Desa Seliu).

Sedangkan untuk Kabupaten Bintan terdiri dari dua desa yang berada di dua kecamatan yaitu Desa Air

Glubi (Kecamatan Bintan Pesisir) dan Desa Mantang Lama (Kecamatan Mantang). Secara detil, informasi terkait kondisi demografi dan sumber air secara umum dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Deskripsi Demografi, Kondisi Iklim dan Sumber Air di Bintan dan Belitung

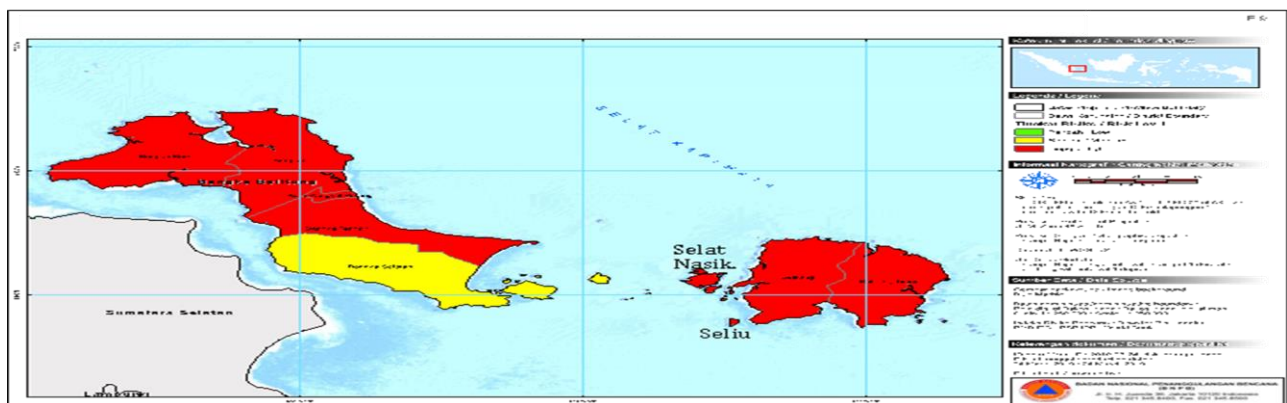
Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jumlah Penduduk (2012)	Jumlah KK	Jumlah Sampel	Stasiun cuaca terdekat	Sumber air
Bintan	Bintan Pesisir Mantang	Air Glubi	905	253	52	Stasiun Kijang-Tanjung Pinang ¹⁰	Sumur sendiri, Sumur bersama, penampungan air bersama/ kolam
		Mantang	848	Tt*	148 ¹¹		
		Lama					
Belitung	Selat Nasik	Selat Nasik	2.467	779	90	Stasiun Tanjung Pandan ¹²	Sumur sendiri, sumur bersama
		Ptaling	555	180	30		
		Suak Gual	871	257	40		
	Membalong	Pulau Seliu	1.132	351	40		

Sumber: Kecamatan dalam Angka BPS Belitung dan Bintan beberapa penerbitan dan Hasil penelitian lapangan

*Tt : Tidak tersedia data

Berdasarkan kategori zona iklim, Kepulauan Riau termasuk dalam kategori zona iklim ekuatorial. Sedangkan untuk Kepulauan Bangka Belitung memiliki dua zona iklim yaitu zona ekuatorial untuk Pulau Belitung dan zona Monsunal untuk Kepulauan Bangka. Sesuai dengan zona musim ekuatorial relatif curah hujan cukup tinggi, namun baik Bintan maupun Belitung mengalami kejadian kekeringan pada musim-

musim tertentu. Untuk Bintan, biasanya musim kering terjadi pada awal tahun, sekitar Bulan Januari-Maret. Sedangkan untuk Belitung, Bulan Agustus adalah bulan yang paling kering. Peta-peta berikut ini memperlihatkan bahwa berdasarkan BNPB, Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bintan merupakan kabupaten yang memiliki risiko kekeringan yang tinggi.



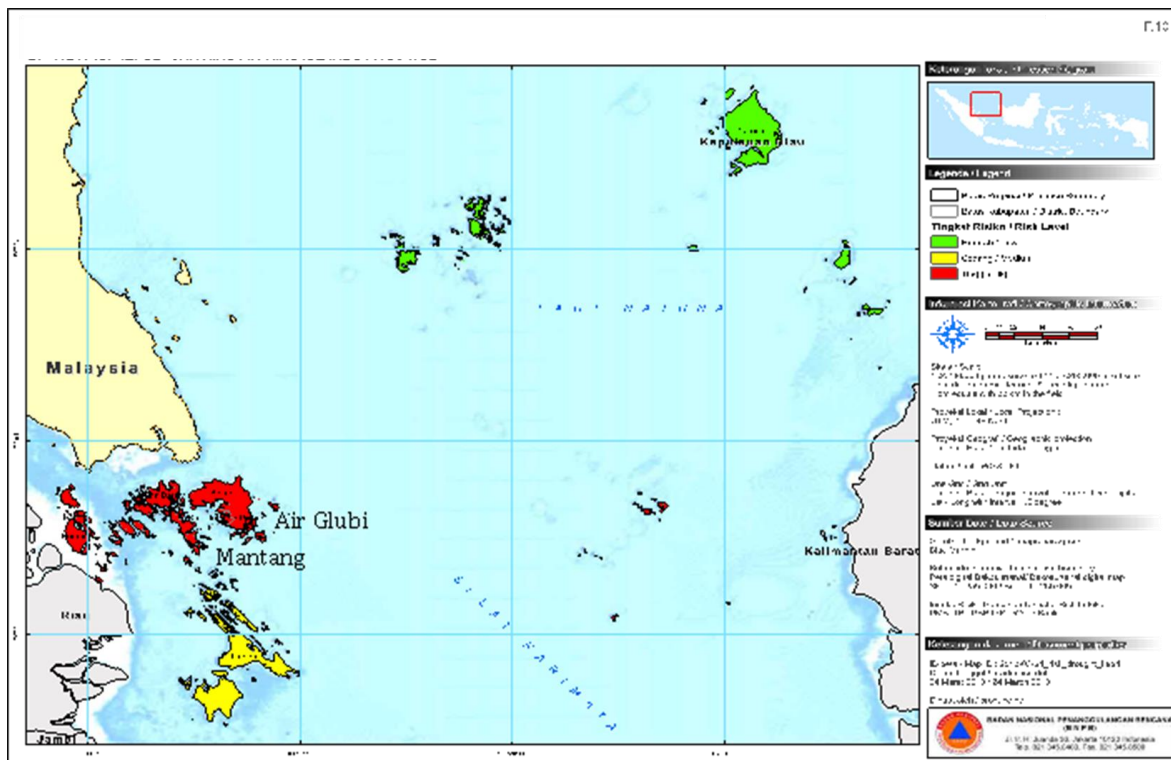
Sumber: Geospasial BNPB

Gambar 2. Peta Indeks Resiko Bencana Kekeringan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

¹⁰ Terdapat 6 stasiun cuaca di Kepulauan Riau yaitu Stasiun Hang Nadim Batam, Stasiun Kijang Tanjung Pinang, Stasiun Tarempa Anambas, Stasiun Ranai Natuna, Stasiun Dabo Singkep dan Stasiun Tanjung Balai Karimun.

¹¹ Jumlah responden di Desa Mantang jauh lebih banyak daripada di Desa Air Glubi karena Desa Mantang memiliki beberapa pulau-pulau kecil yang terpisah, sehingga penambahan sampel dilakukan untuk dapat mewakili beberapa lokasi terpisah tersebut.

¹² Terdapat dua stasiun cuaca yaitu Tanjung Pandan di Pulau Belitung dan stasiun Pangkal Pinang di Pulau Bangka



Sumber: Geospasial BNPB

Gambar 3.

Peta Indeks Resiko Bencaa Kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau Sumber Pemenuhan Air Bersih di Pulau-Pulau Kecil di Bintan dan Belitung

Di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung, secara umum penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan mendapat akses untuk berlangganan air dari PDAM (PDAM Tirta Kepri-Tanjung Pinang dan PDAM Tanjung Pandan). PDAM Tanjung Pandan, memanfaatkan lahan eks tambang (kolong)¹⁰ sebagai sumber air baku untuk didistribusikan pada masyarakat. Sedangkan untuk PDAM Tanjung Pinang memanfaatkan air dari waduk¹¹ untuk sumber air baku. Sumber-sumber air ini sangat tergantung pada curah hujan, sehingga perubahan curah hujan sangat mempengaruhi persediaan air. Persediaan air yang ada di sumber-sumber air tersebut secara normal tidak dapat mencukupi kebutuhan penduduk di Kota Tanjung Pandan dan Kota Tanjung Pinang. Menurut informasi dari masing-masing PDAM cakupan pelanggan baru mencapai 18 persen untuk PDAM Tanjung Pandan dan sekitar 40 persen untuk PDAM Tirta Kepri Tanjung Pinang. Bahkan, pada waktu

curah hujan berkurang, terkadang sumber air yang ada menjadi kering sehingga pasokan untuk pelanggan PDAM menjadi terhenti. Terkadang PDAM harus menerapkan sistem giliran untuk pelanggannya¹².

Selain memanfaatkan sambungan dari PDAM, banyak juga rumah tangga yang memakai air dari sumur (sumur sendiri maupun sumur bersama). Di Belitung, tidak semua sumur yang digali dapat menghasilkan air. Selain itu, sumur yang mengeluarkan air terkadang kualitasnya tidak seperti yang diharapkan karena tidak dapat dipergunakan sebagai sumber air minum karena kualitas air disebut sebagai *aik teraja* atau air merah.

Karena keterbatasan sumber air, maka sumber air tersebut tetap dipergunakan oleh masyarakat. Untuk beberapa rumah tangga selain untuk keperluan MCK, terkadang air ini masih dikonsumsi untuk air minum. Namun untuk wilayah perkotaan kebanyakan rumah tangga membeli air galon untuk mencukupi kebutuhan air minum. Demikian pula untuk rumah tangga yang ada di Kota Tanjung Pinang, kualitas air sumur

¹⁰Beberapa lokasi kolong diantaranya Air Serkuk dan Dukong

¹¹Waduk yang sudah dipakai sejak lama adalah waduk Sungai Pulau. Sejak beberapa tahun terakhir sedang ditambah Waduk Sungai Gesek sebagai tambahan lokasi untuk menambah daya tampung air baku PDAM Tirta Kepri.

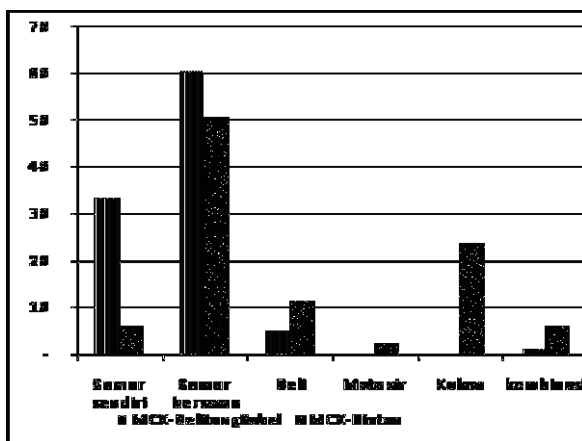
¹²Pengelola PDAM Tanjung Pinang menyebutnya sebagai istilah "air jam-jam", karena bergilir dialirkan pada pelanggan.

beragam dari yang putih bening sampai yang kekuning-kuningan, namun kuantitasnya tetap terbatas.

Pulau-pulau kecil lokasi penelitian tidak memiliki sambungan dari PDAM, sehingga untuk pulau-pulau yang ada di Bintan dan di Belitung sumber air penduduk untuk air minum dan MCK yang utama adalah sumur bersama seperti terlihat pada grafik 1 dan grafik 2 dibawah ini. Untuk pemenuhan kebutuhan MCK di Belitung, persentase terbesar adalah sumur bersama (60 persen). Selain itu untuk sumur sendiri sebesar 33 persen. Untuk 5 persen responden lainnya mengaku harus membayar untuk memenuhi kebutuhan MCK¹³. Kondisi yang hampir sama dapat ditemukan di Bintan, ditemukan 50 persen penduduk menggunakan sumur bersama. Namun 24 persen

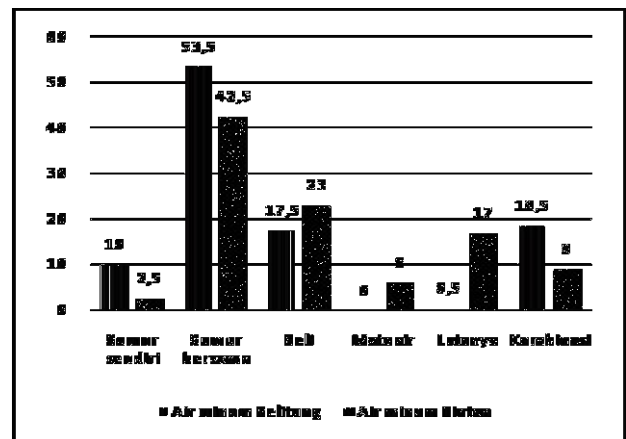
persen untuk Bintan dan 17,5 persen untuk Belitung) membeli bukan menjadi sumber dominan untuk pemenuhan kebutuhan air.

Sumber air yang bersifat komunal merupakan sumber air utama. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis pulau yang tidak memungkinkan masing-masing rumah tangga untuk memiliki sumur sendiri-sendiri. Terkadang rumah tangga yang berusaha untuk menggali sumur tidak mendapatkan air. Untuk kasus Belitung, beberapa rumah tangga mencoba menggali sumur dan mendapatkan air *teraja*’ sehingga akhirnya tetap memakai sumur bersama karena kualitas air yang lebih baik. Contoh lain di Desa Suak Gual (Kecamatan Selat Nasik, Belitung) masih terdapat sebuah sumur tua yang dimanfaatkan oleh warga untuk minum



Grafik 1.

Sumber air untuk MCK di Lokasi Penelitian (n=400)



Grafik 2.

Sumber air untuk minum di lokasi Penelitian

Sumber: Survei Pengarusutamaan Adaptasi dalam Peningkatan Resiliensi Pulau-pulau Kecil, Kerjasama PPK LIPI dan Geotek LIPI 2014

responden di Bintan, mengaku juga memanfaatkan air kolam. Kolam ini merupakan kolam eks tambang yang dimanfaatkan untuk tampungan air. Pola konsumsi masyarakat akan air, tidak berubah secara drastis seperti di wilayah Spermonde yang merupakan kawasan atol. Hasil temuan Schwerdtner Manez dkk (2012) menyebutkan di wilayah yang diteliti di Spermonde telah ditemukan perubahan pola konsumsi air dari pemanfaatan sumur menjadi membeli air dari Makassar. Sedangkan untuk Belitung dan Bintan, hasil survei menunjukkan bahwa walau relatif signifikan (23

maupun untuk MCK. Walau sekarang yang mengambil air di sumur tersebut tidak sebanyak dulu, karena sudah dibangunnya beberapa sumur baru disekitarnya, namun tetap saja banyak warga yang memanfaatkan sumur ini.

DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH DI BINTAN DAN BELITUNG

Kondisi yang hampir sama dengan yang terjadi di Spermonde juga terjadi di pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Riau maupun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan tingkat keparahan yang berbeda. Sebagai bagian dari kepulauan yang ada

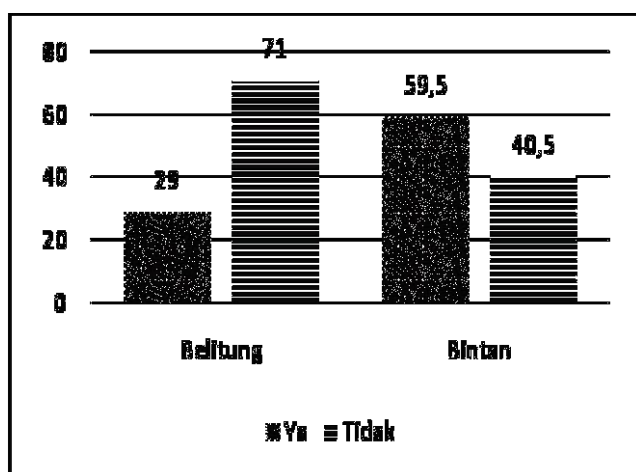
¹³Membayar dalam artian mengupah orang untuk mengangkut air atau membeli air jergen

di Indonesia, secara spesifik di beberapa wilayah kepulauan memiliki curah hujan sebenarnya cukup tinggi, hujan relatif dapat ditemui sepanjang tahun namun antara musim hujan dan musim kemarau tidak dapat dipisahkan secara jelas seperti iklim yang terjadi di daratan. Hujan bisa saja datang setiap seminggu atau dua minggu sekali, sehingga sumur akan kembali terisi oleh air hujan. Kondisi pola hujan seperti ini yang membuat ketersediaan air di pulau-pulau kecil ini dapat dipastikan selalu tercukupi, dimana semua penduduk yang tinggal tergantung pada kondisi ini.

Bila kondisi normal, relatif persediaan air dapat mencukupi untuk kebutuhan sepanjang tahun. Namun kejadian kekeringan sebagai salah satu indikator kejadian variabilitas dan perubahan iklim telah dapat ditemui di Provinsi Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Di Kepulauan Riau, kejadian ekstrem kekeringan terjadi pada awal tahun 2014 di Kepri. Pada saat itu hujan tidak turun selama 45 hari (pertengahan Bulan Januari sampai akhir Februari

2014). Kejadian ini merupakan kekeringan terpanjang yang pernah dialami di Provinsi Kepulauan Riau. Sebelumnya, beberapa kasus kekeringan pernah terjadi yaitu pada tahun 1988/1989, 2005 dan 2011. Pada tahun 1988/1989 dan 2005 kekeringan yang melanda tidak separah pada tahun 2011. Tahun 2011, hujan juga tidak turun selama 30 hari (pada Bulan Januari-Februari 2011). Di Bangka Belitung, walau kejadiannya belum pada level ekstrem seperti kejadian di Kepulauan Riau, namun hampir setiap tahun mengalami kekeringan yang biasanya terjadi pada Bulan Agustus, dan dari tahun ke tahun kejadian kekeringan semakin lama.

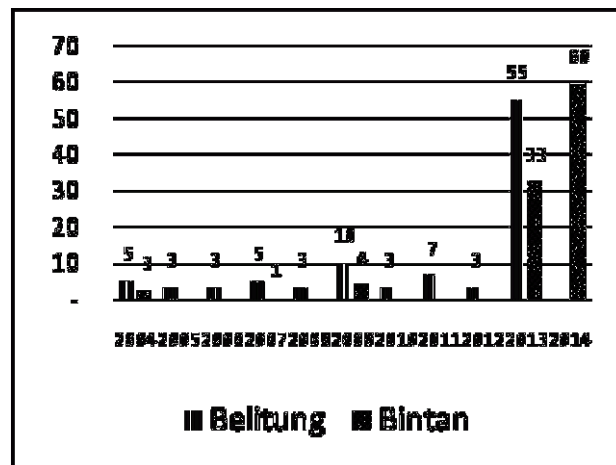
Dari pengalaman responden terhadap kejadian kekeringan dalam survei menunjukkan pola yang berbeda. Di Belitung, dalam sepuluh tahun terakhir, sebagian besar mengaku tidak mengalami kekeringan (71 persen). Sebaliknya di Bintan, hampir 60 persen rumah tangga mengalami kekeringan. Informasi yang lebih detil dapat dilihat pada grafik 3 berikut.



Grafik 3.

Pengalaman Menghadapi kekeringan dalam 10 Tahun Terakhir (%; n=400)

Sumber: Survei Pengarusutamaan Adaptasi dalam Peningkatan Resiliensi Pulau-pulau Kecil, Kerjasama PPK LIPI dan Geotek LIPI 2014



Grafik 4.

Tahun Kejadian Kekeringan dalam 10 Tahun Terakhir (%; n =400)

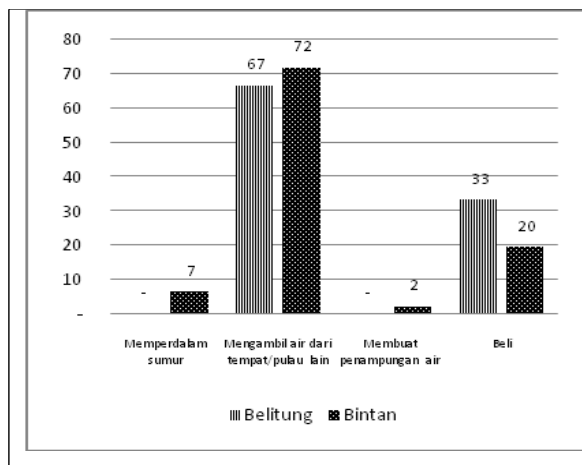
Pada grafik 4. Diatas terlihat bahwa 29 persen responden di Belitung mengalami kekeringan hampir setiap tahun dalam sepuluh tahun terakhir pada Bulan Agustus. Kejadian kekeringan yang paling parah

dialami pada tahun 2013¹⁴. Pada Bulan Agustus tercatat curah hujan memang selalu lebih sedikit dari bulan-bulan lainnya. Selain itu jumlah hari hujan juga lebih sedikit dibandingkan bulan lainnya. Kondisi ini

¹⁴Untuk tahun 2014, responden belum mengaku mengalami kekeringan karena survei dilakukan pada Bulan Juni 2014.

sudah sering terjadi sehingga tidak heran masyarakat mengakui hampir setiap tahun mereka mengalami kekeringan pada Bulan Agustus. Namun intensitas kekeringan yang dialami di Belitung tidak separah yang terjadi di Bintan.

Di Kepulauan Riau, pada beberapa tahun menunjukkan terjadinya anomali cuaca yaitu pada tahun 1988/1989, 2005, 2011 dan 2014¹⁵. Menurut Kepala Stasiun Meteorologi Kota Tanjung Pinang kejadian kekeringan tahun 2014 merupakan kejadian yang paling parah dialami di Kepulauan Riau dan hampir ditemui di semua wilayah provinsi ini kecuali wilayah Natuna dan Lingga¹⁶. Namun, dari hasil wawancara mendalam dan survei pada penduduk yang tinggal di Desa Mantang dan Desa Air Glubi, mereka mengaku kejadian kekeringan sudah dimulai pada Bulan Desember 2013 sampai awal Maret 2014. Hal ini terlihat dari hasil survei pada grafik 4 diatas.

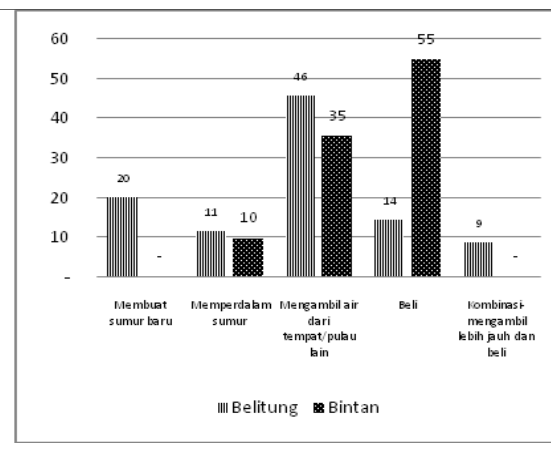


Grafik 5.
Response untuk Pemenuhan Kebutuhan
MCK

ADAPTASI YANG DILAKUKAN UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH

Secara umum masyarakat telah melakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sedangkan dari sisi pemerintah, kejadian kekeringan di Kepulauan Riau beberapa waktu yang lalu belum menjadi pertimbangan untuk melakukan adaptasi yang terencana (*planned*) sebagai upaya untuk mengantisipasi kondisi di masa mendatang dengan probabilitas kekeringan yang makin tinggi.

Untuk masyarakat, beberapa kegiatan adaptasi untuk pemenuhan kebutuhan MCK dan pemenuhan kebutuhan air minum merupakan kegiatan yang hampir sama seperti memperdalam sumur, mengambil air dari tempat/pulau lain dan membeli. Untuk kebutuhan MCK terdapat 2 persen responden yang membuat penampungan air untuk MCK. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan air minum 20 persen responden di Belitung memilih untuk membuat sumur baru dan 9 persen lainnya melakukan upaya kombinasi mengambil di tempat lain dan membeli.



Grafik 6
Response untuk Pemenuhan Air Minum

Sumber: Survei Pengarusutamaan Adaptasi dalam Peningkatan Resiliensi Pulau-pulau Kecil, Kerjasama PPK LIPI dan Geotek LIPI 2014

¹⁵Pernyataan Kepala Stasiun Meteorologi Kota Tanjung Pinang yang dimuat di Batam Pos tanggal 4 maret 2014, diakses online tanggal 10 november 2014.

¹⁶Kedua wilayah mengalami hujan lokal pada pertengahan Bulan Februari.

Secara lebih detil, berikut beberapa kegiatan adaptasi yang telah dilakukan penduduk di Bintan dan Belitung

a. Mengambil air dari sumber air lain/ pulau lain

Sebagai response yang paling mudah untuk mengatasi kesulitan air adalah dengan mengambil air dari tempat lain atau bahkan di pulau lain. Metode adaptasi seperti ini juga dapat ditemui di pulau-pulau kecil lain seperti di Kepulauan Spermonde. Hal ini dapat dilakukan di kawasan pulau-pulau kecil di Indonesia, karena seperti kasus di negara-negara Kepulauan Pasifik, air masih dikelola sebagai sumber daya yang bersifat *common pool resource*, yang didefinisikan sebagai sumber daya yang memiliki karakteristik ketidakjelasan sistem kepemilikan (*property rights*) dan tanggungjawab untuk menjaga kelestariannya (White, 2007). Demikian pula untuk wilayah Belitung dan Bintan.

Untuk Belitung maupun Bintan, penduduk yang mengalami kesulitan air bersih dapat pergi ke pulau lain atau ke sumber air lain di pulaunya (sumur/ kolam bersama) untuk mengambil air sesuai kebutuhan tanpa harus membayar kompensasi pengambilan air. Air dapat diambil oleh masing-masing keluarga sekuat mereka mengambil, karena biasanya harus diangkut jerigen/ ember dengan dipanggul atau dibawa dengan perahu. Terkadang hanya membutuhkan untuk mengantri apabila terjadi kekeringan.

Mayoritas responden di kedua lokasi penelitian harus mengambil air dari sumber lain/pulau lain untuk memenuhi kebutuhan air baik untuk keperluan MCK maupun air minum. Namun persentase yang melakukan respons ini lebih besar untuk keperluan MCK, yaitu sebesar 67 persen di Belitung dan 72 persen di Bintan. Untuk keperluan air minum, persentasenya tidak sebesar untuk pemenuhan kebutuhan MCK, hal ini disebabkan karena mayoritas respon yang ada di Bintan membeli air (55 persen).

Untuk Desa Air Glubi dan Desa Mantang juga ditemukan kasus yang mengambil air dari pulau lain dengan menggunakan sampan berdayung. Untuk mengambil air di pulau lain tidak diperlukan biaya karena pulau yang memiliki sumber air tawar berada relatif dekat dengan pulau tempat tinggal mereka. Pulau tempat mengambil air biasanya adalah pulau tidak berpenghuni sehingga debit air yang tersedia di

sumur tersebut masih dapat mencukupi jika penduduk lain datang mengambil air. Terkadang dalam satu keluarga dilakukan pembagian tugas untuk mengambil air. Saat suami sedang melaut, para istri yang akan mengambil air. Namun bila suami sedang tidak melaut, biasanya para laki-laki yang mengambil air.

b. Membeli

Upaya yang juga banyak dilakukan oleh penduduk adalah membeli air. Secara umum air galon adalah air yang biasa dikonsumsi dengan membeli. Baik air galon yang bermerek maupun air isi ulang, alasan mengkonsumsi air galon lebih pada kepraktisan karena tidak perlu memasaknya. Namun disisi lain jumlah rupiah yang harus dikeluarkan juga tidak sedikit. Selain itu, kondisi pulau-pulau kecil membuat adanya tambahan biaya transport untuk mengangkut air galon dari pulau besar ke pulau kecil. Dari hasil penelitian lapangan, di Kecamatan Selat Nasik (Pulau Mendanau) terdapat satu depot air isi ulang, yang mengambil air baku dari sumur yang ada di belakang depot air ini. Secara higienes tidak terlalu jelas kualitas dari produksi air ini, namun secara kuantitas – produksi air isi ulang ini dapat membantu masyarakat.

Membeli air disini bukan hanya berarti membeli air galon untuk konsumsi air minum. Namun juga membayar orang lain sebagai jasa untuk mengangkut air sampai ke rumah. Biasanya air yang diangkut seperti ini selain dipergunakan untuk keperluan MCK juga untuk keperluan air minum. Sebagai contoh di Desa Air Glubi. Saat musim kering, biasanya penduduk akan meminta bantuan dari aparat desa yang biasa megoperasikan motor angkut untuk mengambil air di kolam bekas tambang yang terletak di tengah pulau. Biasanya mereka akan mengganti ongkos bensin secara sukarela.

c. Menambah daya tampung sumber air yang sudah ada

Pada tingkat masyarakat respon ini terkait dengan upaya untuk menambah stok air di sumber air yang sudah dipakai yaitu dengan jalan memperdalam sumur. Seperti yang dilakukan oleh sekitar 10 persen responden untuk memenuhi kebutuhan air minum baik di Bintan maupun di Belitung. Sedangkan untuk kebutuhan MCK hanya 7 persen responden di Bintan

yang melakukan. Walaupun dilakukan, opsi ini bukan opsi yang populer. Di beberapa kasus, terkadang memperdalam sumur tidak mendapatkan hasil yang diharapkan.

Untuk kasus Pulau Seliu, terdapat satu sumber air utama di pulau tersebut yang dengan bantuan pemerintah diperdalam dan diperbesar kapasitas tampungnya. Pelaksanaan kegiatan (pada tahun 2014) masih belum selesai, beberapa agenda yang direncanakan adalah mendistribusikan air langsung ke rumah penduduk dan membangun sistem pengelolaan distribusi air.

Untuk tingkat kabupaten-di wilayah perkotaan, opsi ini pernah dilakukan oleh PDAM Tirta Kepri, Tanjung Pinang. PDAM menyebutkan bahwa pada tahun 2011, Waduk Sungai Pulau diperluas dengan menambah luas dan kedalaman waduk. Hal ini merupakan strategi jangka pendek untuk menambah stok air baku. Namun hal ini tidak dapat dilakukan di PDAM Tanjung Pandan Belitung karena pengerukan waduk akan berdampak pada menurunnya kualitas air karena tanah di sekitar kolong yang mengandung timah. Direktur PDAM Tanjung Pandan menyebutkan bahwa hal ini merupakan dilema untuk PDAM. Upaya untuk menambah persediaan air baku tidak memungkinkan dengan menambah kapasitas kolong. Yang mungkin dilakukan hanya mencari sumber air baku baru.

d. Mencari sumber air baru

Pada tingkat masyarakat upaya untuk mencari sumber air baru dilakukan dengan membuat sumur sebagai sumber air minum. Hal ini terlihat dari hasil survei (grafik 5.7), 20 persen dari responden membuat sumur baru di Belitung. Namun untuk pemenuhan kebutuhan air untuk MCK, respon seperti ini tidak dilakukan.

Pada sisi pemerintah, seperti di Bintan dilakukan upaya untuk mencari sumber air baru untuk sumber air baku PDAM di wilayah perkotaan. Selain membuat waduk baru (Waduk Sei Gesek), pemerintah Kabupaten Bintan juga mencari sumber air bawah tanah dengan membuat sumur bor sebanyak 5 buah pada tahun 2012. Namun hasil air yang diharapkan tidak didapat. Air yang keluar keruh dan hitam sehingga tidak layak untuk konsumsi air minum. Setelah dikuras selama beberapa bulan, dua sumur

yang menghasilkan air cukup bening namun debit yang dihasilkan sangat kecil sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar untuk mengoperasionalkannya. Untuk Belitung, PDAM juga mencoba untuk mencari sumber air baku yang berasal dari mata air di Batu Mentas. Namun hal ini belum dapat terealisasi, masih dalam taraf studi.

e. Mempermudah distribusi air

Kesulitan pemenuhan air yang terjadi di Desa Air Glubi diatasi dengan cara mengambil air di kolam eks tambang yang terletak di tengah pulau. Dengan kondisi pulau yang kecil dan permukiman masyarakat yang ada di pinggir pulau, maka mereka mengalami kesulitan transportasi untuk mengangkut air. Oleh karenanya, Pemerintah Desa Air Glubi mencoba mengusahakan angkutan untuk mengambil air dan mendistribusikannya ke rumah penduduk. Motor ini dilengkapi dengan bak penampung dan mesin diesel untuk menyedot/mendistribusikan air. Biasanya penduduk yang membutuhkan air akan mengontak operator motor ini untuk diambilkan air. Sebagai penggantinya, mereka membayar uang pengganti bahan bakar.

Untuk mengatasi kesulitan air, telah dicoba untuk membuat sumber-sumber air baru diantaranya difasilitasi oleh PNPM (di Belitung PNPM Pisew dan PNPM perdesaan di Bintan). Dari hasil wawancara mendalam dengan beberapa narasumber dan hasil observasi di lokasi sumber air ditemukan dua sistem distribusi air yang berjalan baik di dua lokasi yang berbeda.

Di Desa Mantang Riau-Bintan, PNPM merevitalisasi sumber air yang biasanya dimanfaatkan. Kolam eks galian tambang ini diperlebar dan diperdalam sehingga memiliki daya tampung yang lebih besar untuk keperluan penduduk desa. Selain itu, PNPM juga memfasilitasi distribusi air ke rumah-rumah penduduk dengan melengkapi sistem distribusi dengan pompa air, tandon air, pipa dan meteran untuk sampai ke rumah-rumah penduduk. Sistem ini seperti sistem yang berlaku di PDAM. Untuk itu setiap rumah tangga yang berlangganan diwajibkan untuk membayar sesuai dengan pemakaian. Selain itu sebagai pelanggan mereka juga harus membayar jasa pelanggan (abonemen). Untuk mengatur sistem ini, ditunjuk

seorang koordinator dalam kasus Desa Mantang seorang tokoh masyarakat yang disegani merupakan koordinator yang dipilih. Sistem dibangun cukup transparan sehingga masyarakat dapat memantau pemasukan dan pengeluaran uang yang dibayarkan. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir biaya pemakaian air per kubik turun dari Rp. 6.000 menjadi Rp. 5.000. Hal ini tentu saja meringankan beban masyarakat untuk pengeluaran air. Dari uang hasil pembayaran pelanggan telah dapat dimanfaatkan untuk menambah tandon air.

Sistem yang berbeda dapat ditemui di Desa Suak Gual-Selat Nasik, PNPM juga memfasilitasi pembuatan sumur sampai distribusi air ke rumah-rumah. Pada awalnya, pengeluaran untuk listrik dibebankan pada para pemakai sumber air tersebut dengan sistem pembayaran secara sukarela. Sistem ini juga dilakukan termasuk untuk biaya servis pompa atau pembelian pompa baru saat pipanya rusak.

f. Desalinisasi air

Di beberapa lokasi ditemukan alat untuk desalinisasi air, yang biasanya merupakan proyek langsung lewat APBN. Alat untuk desalinisasi dengan skala besar berada di Kota Tanjung Pinang, namun sampai saat ini- alat yang sudah dipasang sejak tahun lalu belum dimanfaatkan karena permasalahan teknis aliran listrik yang dibutuhkan untuk mengoperasikan alat tersebut dan masalah mekanisme pengaturan operasionalnya. Begitu juga untuk alat desalinisasi dengan kapasitas kecil yang ada di Desa Mantang, belum secara resmi beroperasi.

g. Pemanenan air hujan (tradisional)

Pemanenan air hujan belum banyak dilakukan di Bintan maupun Belitung. Dari observasi lapangan, hanya sedikit rumah tangga yang melakukan upaya untuk memanen air hujan langsung dari atap. Sebagai contoh beberapa rumah tangga di Pulau Rengit Belitung, memanen air hujan dengan langsung mengalirkan air dari atap, dengan melakukan penyaringan sebelum masuk ke dalam tong-tong plastik. Biasanya air hujan dipakai sebagai sumber air minum karena air sumur di rumah ini merah.

h. Menjaga ekosistem hutan mangrove di Selat Nasik

Penduduk yang tinggal di Kecamatan Selat Nasik dengan pulau Mendanau sebagai sentra permukiman masyarakat, telah mencoba membuat kesepakatan untuk selalu tetap menjaga kelestarian lingkungan pulau tersebut. Terkait dengan air, beberapa inisiatif lokal yang signifikan adalah adanya (1) upaya untuk menjaga kawasan hutan di sekitar Lembong Dalam. Daerah ini merupakan sumber air bersih untuk penduduk di Desa Ptaling, bahkan apabila musim kering, sumber air ini menjadi sumber air untuk dua desa lainnya. (2) Menjaga Mangrove yang ada di sekeliling Pulau Mendanau. Mangrove yang ada cukup lebat sebagai penahan angin dan ombak besar. Selain itu juga menjaga keberadaan sumber air. Kesadaran penduduk akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan bagi kehidupan mereka terlihat pula dari upaya untuk menghentikan penambangan di Selat Nasik pada tahun 2008. Pada saat itu, bupati memberikan izin penambangan pada swasta. Namun masyarakat menolak mengingat ekosistem pulau yang sangat terbatas.

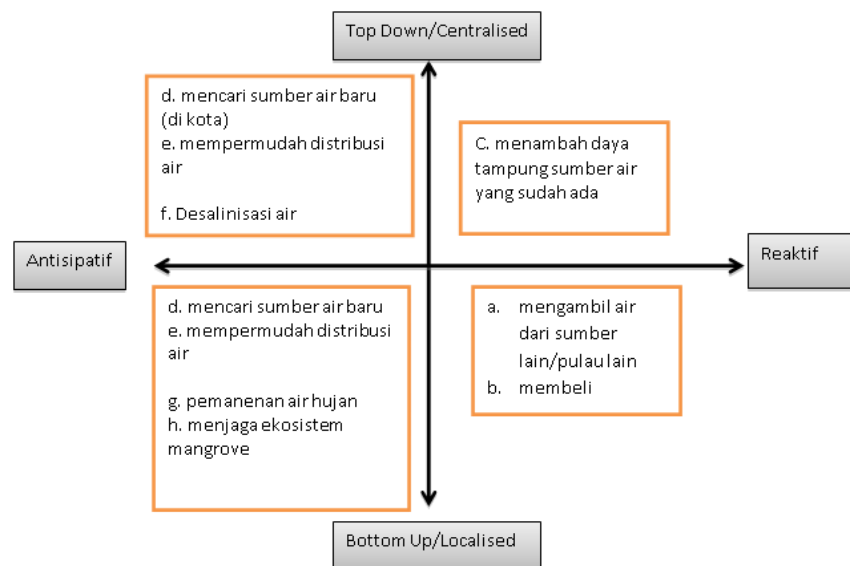
MEMAHAMI ADAPTASI PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH DI PULAU KECIL

Dengan mempergunakan kuadran yang dikembangkan oleh Tompkins dkk (2008), terlihat persebaran kegiatan adaptasi yang telah dilakukan yakni secara reaktif masyarakat lebih menitikberatkan pada kegiatan yang dianggap bisa membantu dalam jangka pendek yaitu membeli (air minum) dan mengambil dari sumber lain/ pulau lain. Terkadang juga mengupah untuk mengambil air dari sumber lain/pulau lain. Dari sisi pemerintah, kegiatan adaptasi yang bersifat reaktif didominasi dengan upaya untuk menambah stok air dengan memperdalam/ memperluas sumber air.

Untuk adaptasi yang bersifat antisipatif juga masih didominasi dengan kegiatan yang bersifat fisik untuk meningkatkan pasokan air bersih, baik dari sisi pemerintah maupun lokal. Mencari sumber air baru menjadi salah satu kegiatan adaptasi yang paling populer. Namun demikian, kondisi ini akan menjadi sulit untuk kasus pulau kecil, karena keterbatasan kondisi pulau-pulau kecil. Selain itu, untuk kasus

Belitung, tidak semua sumur baru yang dibuat dapat menghasilkan air dengan kualitas baik. Kebanyakan

air yang ada di sumur-sumur di Belitung adalah air yang berwarna kemerahan (*ai teraja*’).



Gambar 4.

Pemetaan Kegiatan Adaptasi di Bintan dan Belitung dengan Empat Kuadran Tompkins

Kegiatan yang bersifat fisik lainnya yang dilakukan adalah dengan melakukan desalinisasi air laut yang dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan peralatan untuk desalinasi air merupakan investasi yang cukup mahal. Selama ini, kebanyakan pembangunan peralatan ini mempergunakan dana APBN yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Beberapa kasus di pulau-pulau kecil yang ada di Sulawesi dan Kalimantan, peralatan untuk desalinisasi tidak dapat bertahan lama, karena kurangnya sistem perawatan dan sistem transfer teknologi pada pengelola lokal (Rachmawati dan Purwaningsih, 2014). Desalinisasi air memang merupakan alternatif masa depan untuk memenuhi kebutuhan air bersih penduduk, namun demikian perlu untuk dipikirkan transfer teknologi yang efektif dan murah bagi masyarakat lokal sehingga alternatif pemanfaatan teknologi ini dapat tetap berlanjut dan lestari.

Pada tingkat masyarakat, ditemui beberapa rumah tangga yang melakukan pemanenan air hujan (*Rain water harvesting*). Kegiatan ini lebih dilakukan secara individual oleh rumah tangga yang memiliki sumur

dengan air merah. Belum ada upaya untuk mengangkat kegiatan ini pada tingkat yang lebih luas. Padahal, kegiatan pemanenan air hujan merupakan salah satu kegiatan adaptasi yang banyak direkomendasikan di berbagai tempat untuk mengatasi permasalahan air (UNEP, 2009; Boelee, 2013). Di beberapa tempat kegiatan pemanenan air hujan dilakukan pada tingkat komunal sehingga bak penampung yang dipergunakan dalam skala besar dan rumah tangga-rumah tangga yang tinggal di sekitar sumber air dapat memanfaatkannya. Pemanenan air hujan memiliki potensi yang cukup besar dikembangkan untuk masa mendatang. Namun modifikasi teknologi termasuk untuk tempat penyimpanan air menjadi penting, mengingat perubahan temperatur dan curah hujan yang makin terasa di masa datang.

Khusus di Selat Nasik, terdapat kawasan mangrove yang masih lebat dan terjaga. Terdapat aturan lokal yang disepakati bersama untuk menjaga kelestarian hutan mangrove yang ada. Secara ekologis, mangrove dapat berperan untuk menjaga intrusi air laut, selain itu juga sebagai penahan gelombang atau badai. Terkait dengan perubahan iklim, mangrove memiliki peran

ganda untuk kepentingan mitigasi dan adaptasi sekaligus. Untuk mitigasi, mangrove mampu untuk mengurangi emisi karbon. Sedangkan untuk adaptasi, mangrove berperan penting untuk menjaga air bersih dari intrusi air laut. Peran masyarakat lokal dalam menjaga ekosistem mangrove secara langsung berdampak pada keberlangsungan pasokan air bersih untuk penduduk di Pulau Mendanau, Selat Nasik. Walaupun kondisi kekeringan, mereka masih memiliki sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penduduk Selat Nasik.

Distribusi air menjadi satu hal penting yang tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan air (*water governance*). Menurut Tompkins dan Adger (2004) *water governance* mengampil peran yang krusial untuk mewujudkan efektif adaptasi. Dalam bukunya Hill (2013) menyebutkan bahwa dalam konteks perubahan iklim dimana terjadi perubahan secara biofisik, *water governance* menjadi esensial karena mengatur variabilitas pasokan air, distribusi, pengaturan infrastruktur, aturan-aturan dan berperan sebagai administrator dari sistem yang dibangun ini. Pengaturan seperti yang dilakukan di Mantang merupakan salah satu contoh dari pengelolaan air yang bersifat lokal untuk memenuhi kebutuhan lokal. Pembentukan badan pengelola yang secara profesional mengatur masalah teknis dan administrasi menjamin distribusi air yang adil untuk semua penduduk yang ada di Dusun Mantang Riau. Peran kepemimpinan dan sistem pengelolaan yang bersifat adaptif menjadi input yang memperkuat sistem pengelolaan air yang dibangun.

Di sisi lain, sistem pengaturan air di sumur lama Desa Suak Gual, mungkin menjadi model pengelolaan air yang paling sederhana. Namun demikian, sistem ini menjadi rentan apabila ada pengambil air yang tidak menuruti aturan main yang berlaku karena aturan tersebut tidak tertulis dan tanpa adanya badan pengelola dan pengawas pemanfaatan sumber air. Penentuan tarif lebih diutamakan untuk menutup biaya operasional seperti untuk listrik pompa air maupun biaya administrasi pengurus. Namun kesadaran bahwa pengelolaan air adalah untuk kepentingan bersama maka biaya ditekan seminimal mungkin agar masyarakat tidak merasa berat untuk membayarnya.

KESIMPULAN

Adaptasi pemenuhan kebutuhan air bersih di pulau-pulau kecil yang diteliti masih menitikberatkan pada adaptasi responsif/reaktif. Adaptasi yang bersifat antisipatif telah mulai menjadi perhatian, namun masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan terkait dengan kondisi fisik pulau-pulau kecil seperti teknologi yang lebih efektif untuk penduduk pulau-pulau kecil maupun pembiayaan yang sesuai dengan kondisi pulau kecil. Upaya menghubungkan pasokan air bersih dengan ekosistem, dalam hal ini mangrove, adalah satu hal penting mengingat peran mangrove untuk menahan intrusi air laut dan menahan gelombang atau badai. Peran penjaga dari mangrove tidak hanya secara fisik namun juga untuk keberlangsungan sumber air.

Selain itu untuk memahami pemenuhan kebutuhan air bersih di pulau-pulau kecil tidak hanya melihat kondisi fisik dari sumber daya air yang dimanfaatkan, namun pengelolaan air (*water governance*) untuk kepentingan penduduk pulau-pulau kecil harus menjadi perhatian utama mengingat kondisi pulau-pulau kecil yang akan makin rentan dengan adanya perubahan iklim. Pengelolaan air yang adaptif merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas adaptasi penduduk terhadap perubahan iklim yang dapat mengurangi kerentanan penduduk terhadap pemenuhan kebutuhan air di pulau-pulau kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adger, Neil W. Dkk. 2003. "Adaptation to Climate Change in the Developing World". *Progress in Development Studies*. 3,3 pp179-195
- Bergkamp, Ger. Orlando, Brett dan Burton, Ian. 2003. *Change. Adaptation of Water Management to Climate Change*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK
- Boelee, Eline dkk. 2013. "Options for water storage and rainwater harvesting to improve health and resilience against climate change in Africa" *Regional Environmental Change* 13: 509-519
- Falkland, Anthony C. 1992. *Small Tropical Islands: Water Resources of Paradise Lost*. International Hydrological Programme and Man and Biosphere Programme – UNESCO

- Falkland, Anthony C. 1993. *Hydrology and water management on small tropical islands. Hydrology of Warm Humid Region*. Proceedings of the Yokohama Symposium July 1993. IAHS Publ. No 216.
- Hill, Margot. 2013. *Climate Change and Water Governance: Adaptive Capacity in Chile and Switzerland*. Springer
- Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), GTZ, WWF. 2010. *Kajian Risiko dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sektor Sumber Daya Air*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Kuruppu, Natasha. 2009. "Adapting water resources to climate change in Kiribati: the importance of cultural values and meanings". *Environmental Science and Policy* 12:799-809.
- Nurse, Leonard A. dkk. 2014. "Small Island". dalam *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Part B: Regional Aspects Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (Barros, VR dkk) Cambridge University Press. Pp 1613-1654
- Rachmawati, L dan Purwaningsih, SS. 2014. "Indikator Sosial untuk Memahami Pengarusutamaan Adaptasi untuk Peningkatan Resiliensi Pulau-pulau Kecil" dalam Heru Santoso (ed) *Membangun Strategi Adaptasi Perubahan Iklim*. Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI
- Scherdtner Manez, Kathleen dkk. 2012. "Water Scarcity in the Spermonde Archipelago, Sulawesi, Indonesia: Past, Present and Future". *Environmental Science and Policy* 23: 74-84.
- Tompkins EL. dkk. 2005. *Surviving Climate Change in Small Islands- a guidebook*, UK: Tyndall Centre for Climate Change Research,.
- Tompkins EL, Adger WN. 2004. "Does adaptive management of natural resources enhance resilience to climate change?" *EcolSoc* 9(2):10
- Tompkins E.L; Few, Roger dan Brown, Katrina. 2008. "Scenario-based stakeholder engagement: Incorporating stakeholders preferences into coastal planning for climate change". *Journal of Environmental Management* 88: 1580-1592.
- UNEP dan SEI. 2009. *Rainwater Harvesting: A lifeline for human well-being*. A report prepared for UNEP by Stockholm Environment Institute.
- White, Ian dkk. 2004. *Sustainable Development of Water Resources in Small Island Nations of The Pacific*, Proceedings of the 2nd Asia Pacific association of hydrology and water resources Conference, Singapore, 5-8 July 2004. s.l. : s.n., pp. 345-356.
- White, Ian dkk. 2007. "Challenges in freshwater management in low coral atolls". *Journal of Cleaner Production* 15:1522-1528.
- White, Ian dan Falkland, A.C. 2010. "Management of Freshwater Lenses on Small Pacific Islands" *Hydrogeology Journal*. 18:227-246.

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

PENCIPTAAN MATA PENCAHARIAN ALTERNATIF: STRATEGI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT (STUDI KASUS KOTA BATAM DAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN)

ALTERNATIVE INCOME GENERATING ACTIVITIES: A STRATEGY FOR POVERTY ALLEVIATION AND MARINE RESOURCES PROTECTION (CASE STUDY FROM THE CITY OF BATAM AND PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DISTRICT)

Mita Noveria* dan Meirina Ayumi Malamassam**

Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Korespondensi Penulis: *) mita_noveria@yahoo.com **) ayumi.malamassam@gmail.com

Abstract

One attempt to alleviate poverty of fishermen is, among others, by creating alternative income generating activities to facilitate additional income. The activities are implemented through diversification of household income's sources. This enables fishermen to carry out jobs other than fisheries, which is also an effective effort to conserve marine resources. The reason is because alternative income generating activities could reduce the high dependency of fishery households on marine resources. This paper aims to assess alternative income-generating activities implemented through the Coral Reef Rehabilitation and Management Program (Coremap). It is based on two Coremap study sites, ie. the City of Batam in the Province of Riau Islands and the district of Pangkajene Islands (Pangkep) in the Province of South Sulawesi. This paper based on qualitative data, particularly on the supporting and challenging factors in implementing income-generating activities. The result of data analysis shows that the alternative income generated activities offered by the program tend to neglect the work habits of the targeted groups. For example, the activities requested target population to work collectively in a group. However, in reality, they are not accustomed to such manner. Moreover, the initiated income generated activities took quite long time to harvest, while the target population normally carried out quick yielding jobs.

Keywords: *Poverty Alleviation, Income-Generating Activities, The City of Batam, The District of Pangkajene Islands*

Abstrak

Salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan di kalangan nelayan adalah menciptakan kegiatan ekonomi alternatif yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Kegiatan ini antara lain diwujudkan melalui diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga. Ini memungkinkan para nelayan melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar bidang perikanan tangkap, sekaligus merupakan suatu upaya untuk memelihara kelestarian sumber daya laut. Mata pencaharian alternatif dapat mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya laut dan pesisir. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji upaya penciptaan mata pencaharian alternatif yang dilakukan melalui program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coremap*). Data yang digunakan adalah data kualitatif, bersumber dari penelitian di dua lokasi, yaitu Kota Batam (Kepulauan Riau) dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) di Sulawesi Selatan. Hasil analisis data memperlihatkan bahwa upaya penciptaan alternatif pekerjaan cenderung kurang mempertimbangkan kondisi/kebiasaan kerja yang selama ini dilaksanakan oleh kelompok target. Sebagai contoh, pekerjaan alternatif yang ditawarkan dalam COREMAP dilakukan secara berkelompok, namun sayangnya bekerja dalam kelompok belum menjadi kebiasaan penduduk setempat. Selain itu, pekerjaan alternatif yang ditawarkan dalam program ini umumnya memerlukan waktu yang relatif lama untuk memperoleh hasilnya, padahal penduduk masih terbiasa memperoleh penghasilan dengan cara cepat.

Kata Kunci: *Pengurangan Kemiskinan, Mata Pencaharian Alternatif, Kota Batam, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi persoalan yang serius di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini terbukti dengan dimasukkannya isu kemiskinan sebagai salah satu target *Millenium Development Goals* (MDGs)¹, khususnya penurunan jumlah penduduk miskin. Jika mengacu pada target MDGs, pemerintah harus menurunkan proporsi penduduk miskin dari 15,10 persen pada tahun 1990² (www.bps.go.id) menjadi 7,55 persen pada tahun 2015. Berdasarkan data yang menunjukkan bahwa sampai bulan Maret 2013 proporsi penduduk miskin Indonesia adalah 11,37 persen³, maka upaya yang lebih keras perlu dilakukan untuk mencapai sebagian target dari tujuan pertama MDGs tersebut.

Pasca kesepakatan MDGs tahun 2015, isu kemiskinan masih mendapat perhatian dalam pembangunan, khususnya di negara-negara berkembang. Hal ini terbukti dengan dicantumkannya kemiskinan sebagai salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu tujuan 1: “menghentikan segala bentuk kemiskinan di setiap tempat – *end poverty in all its forms everywhere*” (United Nations, 2015). Kenyataan tersebut memperlihatkan seriusnya pemerintah berbagai negara di dunia dalam menangani persoalan kemiskinan, kemungkinan karena dapat menimbulkan berbagai implikasi negatif terhadap penduduk.

Upaya-upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin sesungguhnya telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga-lembaga non-pemerintah. Beberapa program sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah, dalam arti pemerintah menyediakan dana dan pendampingan teknis, sedangkan yang lainnya dilakukan dengan bantuan dari pihak-pihak selain pemerintah. Salah satu contoh program penanggulangan kemiskinan adalah IDT

(Inpres Desa Tertinggal) yang dilaksanakan pada masa Orde Baru berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Setelah itu, juga diselenggarakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pada tahun 1998 dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di tahun 1999 (<http://www.pnpm-perdesaan.or.id>). Dua program terakhir dilaksanakan oleh institusi pemerintah yang berbeda, yaitu PPK oleh Departemen Dalam Negeri dan P2KP oleh Departemen Pekerjaan Umum. Beberapa kementerian/lembaga teknis lainnya juga melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, seperti KUBE (Kelompok Usaha Bersama) oleh Departemen Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) oleh Departemen Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2007 pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang tidak hanya untuk mengurangi kemiskinan tetapi juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.

Semua program penanggulangan kemiskinan memiliki berbagai kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat targetnya. Kegiatan yang bersifat langsung adalah pemberian bantuan untuk usaha ekonomi produktif berupa (tambahan) modal usaha dan pendampingan teknis dalam pelaksanaan kegiatan, serta bantuan untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat penerima bantuan. Sementara itu, kegiatan yang tidak langsung antara lain pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menghilangkan keterisolasian daerah (<http://www.pnpm-perdesaan.or.id>). Hal ini bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi produktif, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan upaya yang komprehensif tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kondisi ekonomi masyarakat.

Program untuk mengurangi penduduk miskin juga dilaksanakan dengan target khusus, yaitu penduduk miskin perempuan yang tinggal di perdesaan. Program tersebut diselenggarakan oleh pemerintah, melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dikenal dengan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Melalui UPPKS, perempuan yang menjadi kelompok target bisa memperoleh pinjaman uang untuk kegiatan ekonomi produktif, dengan catatan mereka harus memiliki tabungan di bank, yang dikenal dengan Takesra (Tabungan Keluarga Sejahtera) (Prihatinah, dkk. 2001). Meskipun target program adalah

¹ MDGs adalah kesepakatan yang ditandatangani oleh 189 kepala negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia, pada tahun 2000. MDGs mencantumkan 8 tujuan yang hendak dicapai oleh negara-negara penandatangan sampai dengan tahun 2015 (<http://www.undp.org>). Penanggulangan kemiskinan merupakan tujuan pertama, yang secara lengkap dicantumkan “menanggulangi kemiskinan dan kelaparan”. Secara spesifik target yang hendak dicapai berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan adalah menurunkan persentase penduduk yang berpendapatan kurang dari 1 dolar sehari sebanyak 50 persen selama tahun 1990-2015.

² Garis kemiskinan untuk daerah perkotaan adalah Rp. 20.614,-/kapita/bulan, sedangkan untuk daerah perdesaan sebesar Rp. 13.295,-/kapita/bulan.

³ Pada bulan Maret 2013 garis kemiskinan untuk daerah perkotaan adalah Rp. 289.014,-/kapita/bulan dan untuk daerah perdesaan sebesar Rp. 253.273,-/kapita/bulan. Dengan tukar 1 dolar AS = Rp. 10.000,-, jumlah tersebut kurang dari 1 dolar per hari.

perempuan, tujuan yang hendak dicapai adalah peningkatan ekonomi rumah tangga.

Departemen Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan beberapa lembaga donor internasional seperti World Bank (WB) dan Asian Development Bank (ADB) meluncurkan Coremap⁴ (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program*) yang dilaksanakan di wilayah pesisir dan kepulauan di 10 provinsi. Dua di antara 10 provinsi yang terpilih sebagai lokasi program tersebut adalah Kepulauan Riau dan Sulawesi Selatan. Coremap memiliki beberapa kegiatan, yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelestarian terumbu karang, khususnya dan sumber daya laut pada umumnya, serta peningkatan kondisi ekonomi masyarakat. Kegiatan yang terakhir ini secara implisit memperlihatkan bahwa Coremap terkait dengan upaya penurunan kemiskinan. Dalam dokumen Coremap dicantumkan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi implementasinya sebesar 2 persen per tahun dan pada akhir program sebanyak 10.000 rumah tangga mengalami peningkatan taraf hidup (Project Appraisal Document, 2005). Salah satu kegiatan program tersebut adalah penciptaan mata pencaharian alternatif (MPA) yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi program. Dalam kondisi sumber daya laut yang makin berkurang hasilnya, yang berakibat pada menurunnya penghasilan masyarakat, penciptaan MPA menjadi salah satu strategi untuk mencegah bertambahnya penduduk miskin di lokasi program dan bahkan untuk meningkatkan penghasilan mereka. Selain itu, melalui penciptaan MPA diharapkan ketergantungan ekonomi masyarakat pesisir dan kepulauan yang tinggi terhadap sumber daya laut dapat dikurangi, agar kondisi sumber daya alam tersebut terjaga kelestariannya.

Namun sayangnya, program-program yang telah dilaksanakan cenderung kurang mempertimbangkan kondisi sosial budaya, termasuk kebiasaan masyarakat di lokasi program dalam melaksanakan aktifitas ekonomi. Sebagai contoh, kebanyakan kegiatan dilakukan secara berkelompok, padahal cara kerja berkelompok bukan kebiasaan dan bahkan tidak pernah dipraktekkan oleh mereka yang menjadi kelompok target. Akibatnya, tidak semua penerima bantuan ekonomi produktif terlibat kegiatan yang dilaksanakan kelompok. Dalam kasus dana bergulir, kurang terlibatnya semua anggota kelompok

berpengaruh negatif terhadap kelangsungan kegiatan karena dana yang telah diberikan kepada masyarakat sebagai modal usaha tidak berkembang. Hal ini tidak sejalan dengan indikator keberhasilan program, misalnya IDT yang menyatakan bahwa berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok serta makin kuatnya permodalan kelompok merupakan salah satu di antaranya (Bappenas, 1994: 18)

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh Coremap di dua lokasi, yaitu Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun upaya penanggulangan kemiskinan mencakup berbagai kegiatan, dalam tulisan ini pembahasan dibatasi pada kegiatan MPA, dengan fokus pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan kegiatan tersebut. Data yang digunakan berupa data kualitatif yang diperoleh dari penelitian di kedua lokasi selama kurun waktu 2006 – 2011. Data diperoleh dari narasumber-narasumber yang berasal dari berbagai kalangan, antara lain penerima bantuan MPA dan pengelola kegiatan tersebut, menggunakan teknik wawancara mendalam dan FGD (*focus group discussion*). Pemilihan narasumber dilakukan secara *purposive* berdasarkan pertimbangan penguasaan terhadap data yang hendak dikumpulkan.

PENDUDUK MISKIN DI SEKTOR PERTANIAN

Data menunjukkan bahwa pada bulan Maret 2015 sekitar 28,59 juta penduduk Indonesia (11,22 persen) termasuk kategori miskin, yaitu mereka yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan (http://bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20150915122517.pdf). Jika dibandingkan dengan 6 bulan sebelumnya (September 2014)⁵, jumlah ini bertambah sekitar 860.000 orang. Pada saat itu jumlah penduduk miskin adalah 27,73 juta orang (10,95 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Di antara seluruh miskin, persentase yang tinggal di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan, yaitu 14,21 persen dan 8,29 persen pada Maret 2015 secara berturut-turut.

Lebih besarnya proporsi penduduk miskin di wilayah perdesaan daripada di perkotaan merupakan fenomena yang telah lama terjadi. World Bank (2006)

⁴ Program ini diluncurkan dengan pertimbangan rusaknya terumbu karang di berbagai daerah, antara lain akibat eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut tanpa mempertimbangkan kelestariannya.

⁵ Garis kemiskinan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2014 berdasarkan pendapatan per kapita per bulan sebesar Rp.312.328,- (<http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301>).

mengemukakan beberapa karakteristik penduduk miskin Indonesia, yaitu sekitar 65 persen tinggal di pedesaan, 55 persen di antaranya berpendidikan rendah (kurang dari pendidikan dasar), bahkan sekitar 16 persen buta huruf, dan sekitar 64 persen bekerja di sektor pertanian. Selain itu, mereka juga memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yang terbatas, antara lain 73 persen tidak memiliki akses sanitasi yang layak, 50 persen tinggal di desa-desa tanpa pendidikan lanjutan (SLTP dan SLTA), 49 persen tanpa akses telepon, serta sekitar 47 persen melahirkan dibantu oleh bidan tidak terlatih. Semua kondisi tersebut mencerminkan kondisi kerentanan dari penduduk miskin.

Sektor pertanian yang merupakan lapangan pekerjaan sekitar 65 persen penduduk miskin Indonesia mencakup pertanian dalam arti luas. Ini antara lain termasuk perikanan (tangkap), mata pencaharian utama penduduk yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kemiskinan sangat melekat dengan nelayan. Meskipun Indonesia merupakan negara perairan dengan potensi berbagai jenis ikan melimpah, masih banyak nelayan, terutama yang berskala tradisional hidup dalam kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Dahuri (2012) mengatakan bahwa kata “nelayan” seolah-olah identik dengan kemiskinan.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan sebagian besar nelayan hidup dalam kemiskinan, mencakup faktor teknis, faktor kultural, dan faktor struktural (Dahuri, 2012). Semuanya bermuara pada pendapatan nelayan yang tidak menentu, antara lain karena stok sumber daya ikan yang menurun akibat pencemaran, kerusakan ekosistem laut sebab penangkapan ikan yang merusak, serta kondisi alam seperti perubahan iklim global. Selain itu, kondisi gelombang laut yang kuat pada musim-musim tertentu menyebabkan nelayan tradisional tidak dapat menghasilkan pendapatan yang memadai dalam melaut. Masa ini dikenal sebagai masa paceklik yang memaksa nelayan untuk melakukan berbagai upaya guna mempertahankan kelangsungan hidup.

Fenomena kemiskinan nelayan ini sesungguhnya tidak hanya tipikal Indonesia, melainkan juga di belahan dunia lainnya. Dari kajian berbagai literatur yang dilakukan oleh Olale, dkk. (2010) diketahui bahwa di negara-negara berkembang masyarakat nelayan terkait erat dengan kemiskinan dan ada kecenderungan mengalami peningkatan. Di benua Afrika, khususnya, kondisi kemiskinan banyak ditemukan di wilayah pantai Kenya dan danau Victoria. Selanjutnya, Ifejika,

dkk. (2013) mengemukakan bahwa di Nigeria, sekitar 69 persen penduduk miskin adalah mereka yang bekerja di sektor pertanian. Bahkan kelompok termiskin dari penduduk miskin tersebut adalah nelayan yang aktivitas ekonominya sangat tergantung pada kegiatan eksploitasi sumber daya laut. Kenyataan yang sama juga ditemukan di negara lain seperti Filipina. Tingkat kemiskinan penduduk yang tinggal di beberapa pantai di negara kepulauan tersebut mencapai sekitar 90 persen (Asian Development Bank, 1999).

PENCIPTAAN MATA PENCAHARIAN ALTERNATIF (MPA) SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI PENGURANGAN KEMISKINAN

Bagi penduduk yang bermukim di pulau-pulau kecil dan pesisir, mata pencaharian di bidang perikanan tangkap merupakan sumber ekonomi rumah tangga yang paling utama. Meskipun demikian, kegiatan ekonomi di sektor ini tidak dapat menjamin ketahanan ekonomi rumah tangga secara berkelanjutan. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kondisi rentannya sektor perikanan tangkap terhadap berbagai ancaman, seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta eksploitasi sumber daya perikanan yang berlebihan. Situasi ini umumnya diperparah dengan kondisi tingginya tekanan penduduk di tengah keterbatasan sumberdaya lahan di wilayah pesisir.

Agar para nelayan dapat mempertahankan penghasilan di tengah berbagai ancaman yang dialami sektor perikanan dan sekaligus mengurangi kemiskinan di antara mereka, penting dilakukan upaya untuk menciptakan mata pencaharian tambahan bagi kelompok penduduk ini, yang antara lain diperoleh melalui penciptaan mata pencaharian alternatif. Menurut Ireland (2004), mata pencaharian alternatif dapat diartikan sebagai mata pencaharian di luar kegiatan ekonomi tradisional atau kegiatan ekonomi yang telah umum dilakukan sebelumnya oleh penduduk di suatu wilayah. MPA dapat dipahami sebagai usaha untuk membuka pilihan pekerjaan bagi masyarakat agar mereka tidak hanya terbatas pada jenis pekerjaan tertentu. Kegiatan mata pencaharian alternatif dilakukan dengan diversifikasi pekerjaan yang sekaligus juga bertujuan untuk mengurangi risiko dan kerentanan terkait dengan kemiskinan (Brugere, dkk., 2008).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan di negara-negara Afrika seperti Kenya dan Nigeria mendapatkan bahwa salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan di kalangan nelayan adalah melalui diversifikasi pendapatan (Olale & Henson, 2013; Tavida, dkk., 2011). Diversifikasi pendapatan dilakukan dengan beberapa cara, mulai dari mengganti pekerjaan sampai

dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang masih terkait dan saling melengkapi dengan pekerjaan sebelumnya (Brugere, dkk., 2008). Namun sayangnya, penelitian mengenai diversifikasi pekerjaan di kalangan nelayan masih terbatas. Selama ini penelitian mengenai isu tersebut masih cenderung dilakukan untuk masyarakat petani (Olale, dkk., 2010).

Kegiatan MPA yang pada gilirannya memberikan penghasilan tambahan tidak hanya diperlukan untuk memberikan jaminan ketahanan finansial bagi masyarakat di wilayah pesisir, melainkan juga dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan sumberdaya kelautan. Dalam konteks masyarakat nelayan, diversifikasi pekerjaan melalui penciptaan mata pencaharian alternatif juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap eksploitasi sumber daya laut (Brugere, dkk., 2008). Oleh karena itu, kegiatan MPA harus dipastikan tidak akan berdampak pada degradasi lingkungan di wilayah pesisir (Tobey, 2003). Lebih lanjut, dalam melaksanakan kegiatan MPA perlu pula dicermati kondisi sosial ekonomi, budaya, dan isu-isu lokal pada masyarakat setempat.

Selain dilakukan pada masa paceklik, kegiatan-kegiatan MPA/diversifikasi pekerjaan juga dapat dijalankan secara terus menerus untuk mengurangi eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut. Eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan, apalagi diikuti dengan penggunaan alat tangkap yang merusak telah menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem perairan. Dahuri (2012) mengemukakan beberapa jenis kegiatan yang dapat digunakan untuk mengalihkan mata pencaharian nelayan tangkap antara lain budidaya, baik budidaya laut (*marine culture*), tambak, dan budidaya di perairan air tawar, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, dan industri serta jasa penunjang perikanan lainnya. Beberapa jenis kegiatan tersebut juga sudah dipraktekkan di beberapa negara, seperti Filipina, Madagaskar, dan Nigeria, termasuk juga untuk tujuan mengurangi kerusakan sumber daya alam (Asian Development Bank, 1999; Harris, 2007; Brugere, dkk., 2008; Ifejika, dkk., 2013).

Keberhasilan diversifikasi pekerjaan ditentukan oleh beberapa faktor. Dalam studinya di kalangan masyarakat nelayan di Kenya bagian barat, Olale dkk. (2010) menemukan bahwa faktor-faktor tersebut antara lain pendidikan, jenis pekerjaan yang terkait dengan kenelayan (misalnya nelayan, pedagang ikan), keikutsertaan dalam organisasi kemasyarakatan, dan ketersediaan akses pendanaan untuk melaksanakan pekerjaan alternatif selain nelayan. Beberapa di antara faktor tersebut tidak hanya berpengaruh dalam upaya

penciptaan pekerjaan alternatif di kalangan nelayan, akan tetapi juga di masyarakat petani. Winters, dkk. (2009) mengemukakan bahwa pendidikan memberikan kemudahan bagi seseorang untuk berpindah pekerjaan dari sektor pertanian ke pekerjaan-pekerjaan lain di luar sektor tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilannya, para pengelola kegiatan penciptaan pekerjaan alternatif perlu mempertimbangkan berbagai faktor di atas.

PELAKSANAAN KEGIATAN MATA PENCAHARIAN ALTERNATIF DI KOTA BATAM DAN KABUPATEN PANGKEP

Penduduk di wilayah pesisir Kota Batam dan Kabupaten Pangkep memiliki ketergantungan yang besar terhadap sumber daya laut. Hal ini terlihat dari mata pencaharian mayoritas penduduk bersumber dari sektor perikanan tangkap (Noveria & Aswatini 2007; Noveria, Harfina, & Malamassam, 2011). Seperti telah dikemukakan sebelumnya, penghasilan yang diperoleh dari kegiatan perikanan tangkap sangat rentan terhadap perubahan kondisi cuaca, khususnya kondisi ekstrem yang cenderung terjadi sekitar satu dekade terakhir.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa situasi kerentanan ekonomi yang cukup tinggi dialami oleh penduduk di pulau-pulau kecil dan pesisir di kedua kabupaten yang dikaji dalam studi ini (Noveria & Malamassam 2009; Romdiati & Noveria, 2009; Noveria, Harfina, & Malamassam, 2011). Perubahan gelombang laut yang cukup ekstrem sepanjang tahun berpengaruh pada kesulitan rumah tangga nelayan untuk memperoleh pendapatan yang stabil. Di Kabupaten Pangkep (Desa Mattiro Bombang dan Kelurahan Pundatta Baji), nelayan memperoleh pendapatan yang cukup tinggi hanya pada masa gelombang tenang dan pancaroba. Ketika masa gelombang laut kuat dan cuaca buruk, jumlah hari melaut para nelayan berkurang drastis sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan nelayan. Kondisi sebaliknya terjadi pada nelayan di Pulau Abang dan Pulau Karas, Kecamatan Galang Baru, Kota Batam yang memperoleh pendapatan tertinggi pada masa gelombang kuat. Sementara itu, pada musim gelombang tenang dan pancaroba, hasil tangkapan mereka umumnya berkurang banyak sehingga berdampak pada penurunan pendapatan rumah tangga. Ketidakstabilan pendapatan rumah tangga para nelayan perikanan tangkap mengindikasikan pentingnya penciptaan mata pencaharian alternatif dalam rangka tetap menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kondisi di atas mendorong pentingnya usaha penciptaan MPA di wilayah pesisir di Kota Batam dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Seperti yang dikemukakan Noveria & Malamassam (2009), penciptaan dan pemberdayaan MPA diperlukan untuk membuka kesempatan bagi masyarakat nelayan untuk memperoleh tambahan penghasilan rumah tangga. Tidak seperti aktivitas perikanan tangkap, aktivitas MPA diharapkan dapat memberikan insentif ekonomi bagi rumah tangga nelayan tanpa terpengaruh perubahan cuaca ataupun gelombang laut.

Berbagai kegiatan MPA telah diinisiasi, baik oleh institusi pemerintah, organisasi non-pemerintah maupun pihak masyarakat secara mandiri, di kedua lokasi penelitian ini. Umumnya, inisiatif pelaksanaan kegiatan MPA tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha untuk berbagai kegiatan ekonomi produktif, serta pelatihan dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Pelatihan dilaksanakan pada awal pelaksanaan kegiatan, sedangkan bimbingan teknis diberikan selama kegiatan MPA berlangsung. Dalam skema Coremap, bantuan modal untuk kelompok kegiatan MPA disalurkan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten yang bekerjasama dengan pihak lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi non-pemerintah untuk pelatihan dan bimbingan teknis.

Kegiatan MPA dalam skema Coremap diarahkan untuk usaha ekonomi produktif, baik yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya kelautan maupun non kelautan. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, kegiatan MPA yang dapat dibantu Coremap adalah usaha produktif dengan bahan baku sumberdaya alam yang tersedia di lingkungan setempat. Secara umum, kegiatan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu (1) usaha ekonomi produktif yang berbasis kegiatan di wilayah perairan atau lautan; dan (2) usaha ekonomi produktif yang berbasis kegiatan di wilayah daratan. Untuk program MPA yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya laut, usaha ekonomi produktif yang dilakukan adalah budidaya perikanan (laut) dengan menggunakan keramba jaring apung (KJA) dan keramba jaring tangkap (KJT). Sementara itu, program MPA yang berbasis kegiatan di darat meliputi usaha ekonomi produktif di sektor pertanian, perdagangan, industri rumah tangga dan pariwisata.

Kegiatan MPA yang diinisiasi oleh Coremap disyaratkan untuk dilakukan secara berkelompok, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Jumlah anggota kelompok bervariasi, antara 5-18 orang (Romdiati & Noveria, 2007). Pembentukan kelompok difasilitasi oleh petugas lapangan Coremap, antara lain didasarkan pada kesamaan mata pencaharian. Karena mayoritas

laki-laki bekerja sebagai nelayan, kelompok laki-laki terdiri dari para nelayan dan kegiatan MPA yang dilakukan adalah budidaya perikanan (laut) dengan keramba jaring tancap (KJT) dan keramba jaring apung (KJA). Jenis sumber daya laut yang dibudidayakan dalam KJT dan KJA adalah ikan kerapu, khususnya kerapu macan. Sementara itu, perempuan terlibat dalam kegiatan MPA yang berorientasi darat, misalnya pembuatan kerupuk ikan, kue-kue basah, perdagangan kelontong, dan peternakan ayam dengan skala rumah tangga.

Dukungan terhadap penciptaan MPA oleh Coremap diwujudkan dalam berbagai bentuk bantuan. Salah satu di antaranya adalah modal usaha, yang diberikan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan kelompok, melalui penilaian terhadap proposal yang diajukan oleh masing-masing kelompok. Untuk kegiatan budidaya perikanan di Kota Batam, misalnya, bantuan modal usaha mencakup penyediaan bibit dan alat serta pemberian uang pakan dan biaya operasional sampai masa panen. Secara keseluruhan, jumlah dana berkisar sekitar Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000,- (Romdiati dan Noveria, 2007). Kelompok-kelompok MPA di luar kegiatan perikanan memperoleh dana bantuan dengan jumlah yang juga bervariasi, misalnya antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- di Kabupaten Pangkep (Noveria, Harfina, & Malamassam, 2011; Noveria, Harfina, Malamassam & Hidayati, 2011) dan mencapai sekitar Rp. 5.000.000,- di Kota Batam (Romdiati dan Noveria, 2007). Bantuan modal yang diberikan bersifat dana bergulir. Oleh karena itu, semua kelompok harus mengembalikannya dengan cara mencicil kepada pekerja lapangan Coremap, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dana cicilan dari kelompok-kelompok yang ada kemudian diberikan kepada kelompok lain yang belum memperoleh bantuan.

Selain modal usaha, bantuan yang diberikan berupa pendampingan oleh tenaga ahli. Pendamping bertugas untuk memberikan bimbingan, baik dalam hal peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, peningkatan pengetahuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan MPA, serta keterampilan pembukuan keuangan kegiatan MPA. Adakalanya kelompok-kelompok yang sudah panen juga mendapat bantuan dalam penjualan hasilnya.

Terdapat perbedaan karakteristik dan mekanisme pelaksanaan kegiatan pada kelompok-kelompok MPA di Kota Batam dan Kabupaten Pangkep. Di Kota Batam, semua anggota dalam suatu kelompok mengerjakan satu jenis pekerjaan secara kolektif yang merupakan kegiatan kelompok, misalnya budidaya

ikan kerapu dan membuat kerupuk ikan atau telur asin. Sebaliknya, di Kabupaten Pangkep anggota-anggota kelompok mengerjakan kegiatan ekonomi masing-masing karena dana bantuan modal usaha diberikan kepada masing-masing individu. Artinya, kelompok hanya menjadi wadah untuk penyaluran dana, sementara itu, tidak ada pekerjaan kolektif yang dilakukan oleh semua anggota sebagai suatu kelompok.

Selain Coremap, terdapat pula beberapa kegiatan penciptaan MPA yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintahan lainnya melalui berbagai program yang antara lain bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Salah satunya adalah, bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemendukokesa) melalui program PNPM Mandiri. Melalui salah satu kegiatannya yaitu SPP (Simpan Pinjam Perempuan), program ini memberikan bantuan dana bergulir khusus untuk perempuan yang dapat digunakan sebagai modal usaha ekonomi produktif. Khusus di wilayah pulau-pulau kecil dan pesisir, dana bantuan dari SPP ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan MPA rumah tangga nelayan, meskipun secara langsung diberikan kepada kelompok perempuan. Selain itu, terdapat bantuan dari Kementerian Sosial melalui program Koperasi Syariah yang juga memberikan bantuan pinjaman modal untuk usaha ekonomi produktif. Tidak hanya pemerintah pusat, pihak pemerintah daerah pun melakukan inisiasi penciptaan mata pencaharian alternatif. Sebagai contoh, di Kabupaten Pangkep, pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, yang juga bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi negeri di Kota Makassar, memberikan bantuan modal, alat dan bimbingan untuk budidaya rumput laut dan budidaya ikan hias. Skema bantuan ini utamanya diarahkan untuk menciptakan sumber pendapatan ekonomi yang tidak merusak sumberdaya laut.

KEGIATAN MATA PENCAHARIAN ALTERNATIF: FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, program-program penanggulangan kemiskinan memiliki kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan pendapatan adalah usaha ekonomi produktif. Sub bagian ini mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan MPA.

Faktor Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Mata Pencaharian Alternatif

Menurut Tobey (2004), terdapat beberapa hal yang mendukung suksesnya penciptaan dan pemberdayaan kegiatan MPA di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal pertama adalah adanya bimbingan teknis dan manajemen, baik dalam bentuk pelatihan maupun pendampingan lapangan. Bimbingan ini sebaiknya tidak hanya diberikan pada awal program bantuan saja, namun berlangsung secara berkelanjutan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kegiatan MPA harus dapat memberikan insentif ekonomi yang sama atau bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan kegiatan perikanan tangkap. Kedua, pemahaman yang menyeluruh terhadap beberapa komponen penting dalam penciptaan usaha ekonomi produktif juga diperlukan dalam mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan MPA. Komponen-komponen tersebut antara lain adalah pasar hasil produksi, pengetahuan mengenai risiko usaha, akses terhadap kredit mikro, aktivitas yang menjaga kelestarian lingkungan, serta pemahaman mengenai heterogenitas kelompok masyarakat di suatu wilayah.

Salah satu kunci sukses seperti yang dikemukakan di atas dilaksanakan dalam kegiatan MPA Coremap. Seperti telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, bimbingan teknis dan pendampingan diberikan kepada kelompok-kelompok penerima bantuan modal untuk kegiatan MPA. Untuk kelompok budidaya ikan dengan KJT dan KJA, bimbingan teknis diberikan mulai dari penempatan bibit sampai dengan pemanenan ikan.

Faktor pendukung lain untuk penciptaan MPA di kedua wilayah pesisir adalah ketersediaan sumberdaya manusia yang akan melaksanakan kegiatan pekerjaan alternatif tersebut. Proporsi penduduk usia produktif, baik di Kota Batam dan Kabupaten Pangkep, tergolong tinggi (Noveria & Malamassam 2009; Noveria, Harfina, & Malamassam, 2011). Kondisi ini mencerminkan ketersediaan angkatan kerja yang cukup besar sebagai modal penciptaan lapangan kerja alternatif di kedua wilayah ini. Meskipun secara umum tingkat pendidikan penduduk di wilayah penelitian tergolong rendah, mayoritas penduduk setempat memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pentingnya upaya pelestarian sumber daya laut. Pemahaman mengenai hal ini menjadi dasar penting dalam usaha mengadvokasi masyarakat di wilayah pesisir mengenai pentingnya penciptaan kegiatan MPA.

Selanjutnya, ketersediaan sarana prasarana yang dapat mendukung pemasaran produksi kelompok kegiatan MPA di kedua wilayah pesisir ini menjadi faktor

pendukung lainnya. Meskipun terletak cukup jauh dari pusat kota, ketersediaan sarana transportasi publik cukup memadai di kedua lokasi penelitian. Hal ini memudahkan untuk membawa produksi ke pasar (<http://www.dkpkepri.info>) atau sebaliknya, pihak pembeli datang ke lokasi yang menghasilkan produk. Selain itu, penduduk memiliki akses yang cukup baik terhadap sarana informasi dan komunikasi. Hal ini ditunjukkan dengan akses terhadap siaran televisi nasional serta jaringan telepon seluler yang tersedia di kedua wilayah pesisir ini. Ketersediaan jaringan telepon seluler memudahkan penduduk untuk mengetahui ketersediaan pasar serta harga komoditas yang mereka hasilkan.

Pangsa pasar yang besar bagi produksi budidaya perikanan melalui KJT dan KJA menjadi faktor pendukung yang juga tidak kalah pentingnya. Jenis ikan kerapu, khususnya kerapu macan yang dibudidayakan oleh kelompok KJT dan KJA di lokasi Coremap di Kota Batam memiliki prospek yang bagus di pasar luar negeri seperti Singapura dan Hongkong (<http://skpd.batamkota.go.id/kp2k>). Hasil panen biasanya langsung dijual kepada pedagang penampung untuk selanjutnya dijual ke pasar dalam negeri maupun luar negeri (<http://www.dkpkepri.info>). Harga ikan kerapu yang tinggi di Singapura menyebabkan kegiatan budidaya jenis ikan tersebut sangat diminati oleh penduduk di Kepulauan Riau, termasuk di Batam (Zakaria, tanpa tahun).

Selain kegiatan kenelayanan, kegiatan MPA yang berpotensi dikembangkan di wilayah pesisir adalah sektor industri rumah tangga, yaitu pengolahan hasil perikanan tangkap. Rumah tangga nelayan umumnya telah mengolah sebagian kecil hasil tangkapannya untuk menjadi kerupuk ikan, sambal ikan, ikan asin, ataupun ikan asap. Hasil produksi industri rumah tangga ini umumnya didistribusikan secara terbatas. Kemampuan pengolahan komoditas perikanan, walaupun masih terbatas, dapat menjadi modal dasar dalam mengembangkan sumber ekonomi alternatif.

Untuk pengembangan MPA di bidang pertanian, khususnya di Kota Batam, potensi pengolahan sumberdaya pertanian masih cukup besar. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ketersediaan lahan pertanian yang masih cukup luas di wilayah ini. Pulau Abang kecil yang menjadi salah satu lokasi Coremap, misalnya, memiliki 40 persen lahan dengan topografi datar-berombak dari total luas sekitar 6,003 km² (regional.coremap.or.id). Lahan dengan kondisi topografi tersebut sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, misalnya menanam sayur-sayuran serta buah-buahan. Namun dalam kenyataannya, lahan potensial tersebut dilerantarkan

oleh masyarakat. Situasi ini sangat berbeda dengan kondisi di Desa Mattiro Bombang di Kabupaten Pangkep yang tidak lagi memiliki lahan pertanian yang memadai untuk dikelola karena hampir semua wilayah pulau sudah dimanfaatkan untuk pemukiman penduduk.

Aspek Sosial Budaya: Faktor penghambat kegiatan MPA

Meskipun telah memperlihatkan hasil yang positif, program MPA tidak terlepas dari hambatan. Berbagai hambatan muncul, baik akibat faktor alam, kendala teknis yang berpengaruh terhadap aktifitas ekonomi maupun karena faktor manusia yang menerima bantuan. Kendala teknis bisa diatasi melalui pemberian pendampingan/bimbingan teknis dalam menjalankan aktifitas ekonomi dan kendala alam diatasi dengan melakukan berbagai penyesuaian terhadap kondisi alam. Selanjutnya, hambatan yang berasal dari faktor manusia, khususnya karena sikap dan kebiasaan serta pandangan terhadap kegiatan MPA, hanya dapat diatasi melalui perubahan sikap, kebiasaan, dan pandangan mereka. Upaya ini sulit dilakukan dalam waktu singkat. Diperlukan waktu yang lama serta pendekatan khusus agar dapat merubah sikap, kebiasaan, dan pandangan yang sudah lama dilakukan dan dianut. Kendala yang muncul akibat faktor manusia, terutama sikap dan kebiasaan menjadi fokus bahasan pada subbagian ini.

Berkaitan dengan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan MPA, hasil penelitian di kedua lokasi memperlihatkan beberapa kecenderungan yang sama. Salah satunya adalah kebiasaan dalam melakukan aktifitas ekonomi. Masyarakat di kedua lokasi kebanyakan adalah nelayan yang terbiasa bekerja sendiri atau bersama-sama dengan satu atau dua orang yang pada umumnya adalah anggota rumah tangga mereka. Bekerja dalam kelompok besar, misalnya 10 orang yang tergabung dalam kelompok KJA dan usaha industri rumah tangga merupakan hal yang sangat jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan. Akibatnya, aktifitas ekonomi yang dilakukan secara bersama-sama dalam suatu kelompok sulit dilaksanakan.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber di lokasi penelitian diketahui bahwa kerja kelompok hanya terlaksana pada awal kegiatan, misalnya saat membuat dan memasang karamba. Setelah itu, hanya satu atau dua orang yang ikut bekerja sampai panen. Bahkan, pada salah satu kelompok KJA di Kelurahan Pulau Abang (Kota Batam), hanya ketua kelompok yang terus bekerja dan terpaksa membayar orang lain yang bukan anggota kelompok untuk membantu,

misalnya memberi makan ikan yang dibesarkan serta membersihkan karamba. Hal ini dikemukakan oleh seorang narasumber (bapak S, ketua salah satu kelompok KJA di Kelurahan Pulau Abang) seperti kutipan berikut,

Selama ini cuma Bapak sendiri yang kerja. Waktu dulu pasang keramba memang kita bekerja sama-sama satu kelompok, tapi lama-lama mulai ada yang diam-diam tidak datang kerja. Ada juga yang bilang ndak jadi anggota kelompok lagi. Akhirnya Bapak suruh orang untuk urus, kasih makan ikan dan bersih-bersih karamba. Orang itu dikasih upah.

Kenyataan di atas tidak sejalan dengan prinsip kerja yang telah disepakati sejak awal, yaitu seluruh anggota kelompok KJA bekerja bersama-sama sampai panen. Hasil panen kemudian dibagi bersama-sama, setelah menyisihkan jumlah yang akan digunakan untuk modal usaha selanjutnya dan yang harus dikembalikan ke penyelenggara Coremap.⁶ Namun, keberhasilan yang dicapai oleh salah satu kelompok di atas kemudian menumbuhkan motivasi di kalangan nelayan lainnya untuk melakukan kegiatan yang sama. Setelah itu, ada kelompok yang sebelumnya tidak melanjutkan aktifitas, akan melaksanakan kembali kegiatan mereka, sebagaimana dikemukakan oleh narasumber yang sama.

... setelah Bapak panen terus orang-orang liat..ooh bisa juga dapat uang ya. Akhirnya mereka jadi bersemangat untuk kerja karamba lagi. Ini ada yang bilang mau usaha kelompok lagi. Jadi mereka harus liat bukti dulu, baru mau bekerja...

Kondisi yang sama juga dihadapi oleh kelompok perempuan pembuat kerupuk ikan dan pembuat telur asin. Keterlibatan anggota sangat tidak menentu dan dipengaruhi oleh aktifitas dan kepentingan mereka di rumah masing-masing. Anggota kelompok biasanya meninggalkan pekerjaan di kelompok jika mereka sedang sibuk dengan urusan rumah tangga. Pekerjaan kelompok selanjutnya menjadi tanggung jawab ketua kelompok, sehingga tidak terelakkan menimbulkan kesan bahwa usaha ekonomi yang dilakukan oleh ketua kelompok adalah kegiatan individu.

Masih terkait dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi, salah satu penghambat dalam pelaksanaan MPA adalah lamanya waktu tunggu untuk mendapatkan hasil pekerjaan. Tidak seperti kegiatan melaut yang bisa memperoleh hasil secara cepat, pekerjaan-pekerjaan yang termasuk kegiatan MPA memerlukan waktu tertentu untuk memperoleh hasil. Sebagai contoh, ikan yang dibesarkan di KJA pada umumnya dipanen 9 bulan setelah bibit dimasukkan dalam karamba. Hal yang sama juga terjadi di kalangan mereka yang melakukan kegiatan MPA di bidang pertanian, seperti yang menanam sayuran. Masa panen sayuran sekitar 3 bulan juga dirasakan lama oleh keluarga nelayan karena mereka terbiasa memperoleh uang tunai secara cepat, yaitu langsung setelah pulang melaut. Pada umumnya mereka berkeberatan dengan cara kerja seperti budidaya ikan dengan KJA serta bertanam sayuran ini. Akibatnya, mereka tetap menjadikan kegiatan menangkap ikan di laut sebagai pekerjaan utama dan meninggalkan kegiatan MPA.

Secara konsep, kegiatan MPA yang diperkenalkan Coremap (serta program-program penanggulangan kemiskinan lainnya di daerah kepulauan dan pesisir) bertujuan untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya laut. Kegiatan tersebut sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau menghentikan sama sekali kegiatan melaut di kalangan nelayan. Dengan MPA, aktifitas melaut diharapkan dapat dikurangi, yang pada gilirannya berpengaruh positif terhadap kelangsungan hidup sumber daya laut. Akan tetapi, keinginan kuat untuk memperoleh uang secara cepat menyebabkan para nelayan menerima bantuan kegiatan MPA tidak mengurangi intensitas pekerjaan menangkap ikan di laut. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dari kegiatan MPA, diperlukan waktu yang lama agar perilaku dan pandangan masyarakat dalam memperoleh penghasilan bisa berubah.

Satu hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam menghambat pelaksanaan kegiatan MPA adalah pandangan/penerimaan masyarakat terhadap bantuan yang diberikan. Di kalangan masyarakat di lokasi penelitian di Pangkep, dikenal istilah “uang mati” untuk bantuan dana usaha ekonomi produktif yang dikucurkan melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan (Noveria, Harfina, & Malamassam, 2011). Artinya, uang yang telah diterima merupakan pemberian dari pemerintah atau penyelenggara kegiatan tanpa harus dikembalikan lagi. Padahal, menurut konsepnya uang yang diterima harus diperlakukan sebagai “hutang” yang harus dikembalikan untuk selanjutnya bisa pula dimanfaatkan bagi penerima bantuan yang lain. Dengan demikian, semakin banyak anggota

⁶ Bantuan modal usaha untuk kegiatan MPA diberlakukan sebagai “hutang” dan harus dikembalikan kepada penyelenggara Coremap di tingkat desa/kelurahan. Dana pengembalian tersebut kemudian digulirkan kepada kelompok lainnya. Jika usaha KJA dan pembayaran “hutang” berjalan, maka akan makin banyak kelompok dalam masyarakat yang bisa menerima manfaat dari kegiatan MPA. Hal ini pada gilirannya menciptakan sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat, di samping juga mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya laut.

masyarakat yang mendapatkan bantuan untuk modal kegiatan ekonomi.

Anggapan bahwa dana bantuan untuk kegiatan MPA adalah “uang mati” juga menyebabkan sebagian penerimanya memanfaatkan bantuan tersebut bukan untuk kegiatan ekonomi produktif. Hasil penelitian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bahkan menemukan bahwa ada penerima yang menggunakan dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Noveria, Harfina, & Malamassam, 2011). Akibatnya, kegiatan penciptaan MPA tidak memunculkan mata pencaharian alternatif bagi penerimanya. Khusus untuk kegiatan MPA Coremap, kenyataan di atas diperburuk dengan tidak adanya sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak mengembalikan dana bantuan. Hal ini memberikan pengaruh negatif bagi mereka yang telah mengembalikan pinjaman. Dengan pertimbangan bahwa tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak mengembalikan pinjamannya, sebagian penerima bantuan yang terbiasa mengembalikan pinjaman secara teratur juga menghentikan pengembaliannya (wawancara dengan salah seorang ibu, pengelola kegiatan MPA di Pangkep). Konsekuensinya, dana MPA tidak bisa digulirkan kepada kelompok yang lain.

Berbeda dengan Coremap, kegiatan simpan pinjam untuk usaha ekonomi yang dilakukan oleh PNPM Mandiri berjalan dengan lancar. Para penerima bantuan mengembalikan pinjaman dengan teratur, terutama karena program ini memberikan sanksi yang tegas bagi daerah-daerah yang tidak lancar pengembalian dana simpan pinjamnya.⁷ Dengan semikian, tidak mengherankan jika kegiatan SPP dari PNPM Mandiri bisa bertahan dalam waktu yang lebih lama.

KESIMPULAN

Upaya-upaya untuk menanggulangi kemiskinan telah menjadi perhatian pemerintah sejak lama, terbukti dari banyaknya program sejenis yang telah dilakukan. Beberapa di antara kegiatan yang dilaksanakan dalam program penanggulangan kemiskinan menunjukkan keberhasilan, misalnya dari peningkatan pendapatan penduduk yang menjadi target program. Namun, ada pula yang tidak berhasil mencapai tujuannya, misalnya kegiatan MPA yang pada umumnya menumbuhkan

usaha-usaha ekonomi produktif yang berbasis kelompok.

Dari bahasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai faktor (pendukung dan penghambat) yang berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan MPA di lokasi penelitian. Salah satu faktor penghambat yang memerlukan waktu relatif lama untuk mengatasinya adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan sosial budaya menjadi penting dilakukan sebelum kegiatan MPA diluncurkan di suatu masyarakat. Hal ini antara lain dilakukan untuk merubah cara pandang masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan rumah tangga. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa usaha ekonomi tidak hanya dilakukan secara individu, melainkan juga bisa secara berkelompok.

Kegiatan penciptaan MPA sesungguhnya tidak hanya berupa pemberian bantuan modal usaha serta bimbingan teknis semata. Perlu pula upaya untuk merubah kebiasaan dan pandangan masyarakat terhadap sistem kerja yang hendak diperkenalkan. Oleh karenanya, kegiatan MPA tidak semata-mata menciptakan usaha ekonomi baru, namun juga memerlukan transformasi perilaku ekonomi masyarakat setempat. Pada kasus di kedua lokasi penelitian, membiasakan bekerja dalam kelompok dan memperoleh hasil kerja setelah menunggu selama waktu tertentu merupakan perubahan sosial yang diperlukan agar kegiatan MPA mencapai hasil yang optimal.

Berdasarkan kenyataan di atas, hal utama yang perlu disadari sebelum melakukan inisiasi kegiatan MPA adalah pentingnya pemahaman yang menyeluruh mengenai kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat di wilayah pesisir. Para pengelola program perlu memahami kondisi sosial, termasuk kebiasaan dan pandangan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penciptaan MPA. Dengan pemahaman mengenai kondisi sosial budaya masyarakat yang menjadi kelompok target, para pengelola dapat merencanakan berbagai upaya untuk mendukung keberhasilan program.

Upaya-upaya tersebut meliputi berbagai bentuk aktifitas. Pada awalnya adalah sosialisasi untuk memberikan pemahaman mengenai manfaat kegiatan ekonomi yang dilakukan secara berkelompok. Kegiatan ini selanjutnya diikuti dengan pelaksanaan kegiatan percontohan untuk bekerja dalam kelompok. Untuk itu, sebelum program dilaksanakan, perlu dibentuk (satu atau dua) kelompok contoh dengan

⁷ Daerah-daerah yang memiliki tunggakan cicilan dana SPP diberi sanksi berupa tidak dicairkannya dana untuk pembangunan infrastruktur pada tahun berikutnya. Aturan ini menjadi pendorong utama bagi pengembalian cicilan SPP.

mekanisme kerja sesuai dengan yang direncanakan dalam program. Pelaksanaan kegiatan kelompok contoh tersebut dimonitor dengan cermat, paling sedikit selama masa satu siklus produksi. Keterlibatan pemimpin masyarakat, formal maupun informal dalam pemantauan kegiatan kelompok contoh sangat diperlukan. Keberhasilan kelompok contoh menjadi bukti nyata bahwa kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan mekanisme kerja kelompok. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat mengubah cara kerja yang selama ini mereka praktekkan dalam kegiatan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. 1994. *Kaji Tindak Program IDT 1994-1997*. Jakarta: Bappenas.
- Brugere, C., Holvet, K, & Allison, E. 2008. *Livelihood Diversification in Coastal and Inland Fishing Communities: Misconceptions, Evidence and Implications for Fisheries Management*. Working Paper, Sustainable Fisheries Livelihood Programme (SFLP). Rome, FAO/DFID.
- Dahuri, Rokhmin. 2012. *Akar Masalah Kemiskinan Nelayan dan Solusinya*. <http://rokhmindahuri.info/2012/10/10/akar-masalah-kemiskinan-nelayan-dan-solusinya/>. diunduh tanggal 10 Oktober 2015.
- Harris, Alasdair. 2007. "To Live with the Sea" *Development of the Velondriake Community-Managed Protected Area Network, Southwest Madagascar*. Madagaekar Conservation & Development, Volume 2, Issue 2, hal. 43-49.
- <http://skpd.batamkota.go.id/kp2k/2014/10/08/info-tanjung-riau-panen-kerapu/>. Info; Tanjung Riau Panen Kerapu. diunduh tanggal 10 November 2015.
- <http://www.adb.org/sites/default/files/evaluation-document/35266/files/17152-01-phi-ppar.pdf>. *Program Performance Audit Report on the Fisheries Sector Program in the Philippines*. diunduh tanggal 11 November 2015.
- <http://www.dkpkepri.info>. *Budidaya Perikanan Kota Batam Budidaya Laut*. diunduh tanggal 10 November 2015.
- <http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301>. *Kemiskinan di Indonesia*. diunduh tanggal 11 November 2015.
- http://www.pnpm-perdesaan.or.id/?page=halaman&story_id=1. diunduh tanggal 17 November 2014.
- <http://www.pnpm-perdesaan.or.id/?page=news&topic=Pembangunan&id=321>. *Bangun Jembatan, Menguk Keterisolasian*. diunduh tanggal 17 November 2014.
- <http://www.pnas.org/content/110/6/2076.full.pdf>. *Income diversification and risk for fishermen* Stephen Kasperskia and Daniel S. Holland. diunduh tanggal 10 November 2015.
- http://regional.coremap.or.id/downloads/KONDISI_GEOG_RAFIS.pdf. *Kondisi Geografis*. diunduh tanggal 17 November 2015.
- Ifejika, P.I, E.N. Belonwu, Y.Y. Malogwi, A.O. Odunuga, dan A.A. Mbah. 2013. "Emerging Income Generating Activities of Fisherfolk in Riverine Communities of Niger State, Nigeria". *Journal of Fisheries and Aquatic Science*, 2013/DOI:10.3923/jfes.2013.
- Ireland, C. 2004. *Alternative sustainable livelihoods for coastal communities: A review of experience and experience and guide to best practice*. Somerset: theIDLgroup.
- Noveria M. & Aswatini. 2007. *Kondisi sosial ekonomi masyarakat di lokasi COREMAP II: Kelurahan Karas Kota Batam*. Jakarta: CRITC – LIPI.
- Noveria M. & Malamassam, M.A., 2009. *Perkembangan pendapatan masyarakat di lokasi COREMAP II: Pulau Abang Kota Batam*. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan LIPI & COREMAP.
- Noveria M., Harfina, D. & Malamassam, M.A., 2011. *Pelestarian terumbu karang berbasis masyarakat: Suatu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pangkajene Kepulauan*. Jakarta: PT. Leuser Cita Pustaka & COREMAP-LIPI.
- Noveria, M., Harfina, D, Malamassam, M.A. & Hidayati, I. 2011. *Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Masyarakat*. Jakarta: PT Leuser Cita Pusaka & COREMAP-LIPI.
- Olale, Edward, Spencer Henson dan John Cranfield. 2010. "Determinants of Income Diversification among Fishing Communities in Western Kenya". *Selected Paper prepared for presentation at the Agricultural & Applied Economics Association 2010 AAEA, CAES, & WAEA Joint Annual Meeting*, Denver, Colorado, July 25-27, 2010. <http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/61259/2/Determinants%20of%20ID%20paper%20-AAEA.pdf>. diunduh tanggal 10 November 2015.
- Olale, Edward & Henson, Spencer. 2013. "The impact of income diversification among fishing communities in Western Kenya". *Food Policy*, 43, hal. 90-99.
- Partinah, Tri Lisiani, Dora Marinova, & Laura Stocker. 2011. "Empowering Women Through Income Generating Projects: Evidence from Indonesia". *Paper dopresentasikan pada International Community Development Conference*, Rotorua, New Zealand, April 2011.

- Project Appraisal Document. *COREMAP II 2005*.
- Romdiati, H. & Noveria, M. 2007. *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Lokasi Coremap II Desa Pulau Abang, Kota Batam. Hasil BME*. Jakarta: CRITC-LIPI.
- Tavida, A.A., Adebayo. A.A., Galtima, M., Raji, A., Jimme, M. & John, C.T. 2011. "Livelihood Strategies and Rural Income: The Case of Fishing Communities in Kainji Lake Basin Nigeria". *Agricultural Journal*, Volume 5, Issue 5, hal. 259-263.
- Tobey, J. 2003. Coastal management and poverty alleviation, dalam S.B. Olsen (ed). *Crafting coastal governance in a changing world*. Coastal Management Report No. 2241. Rhode Island: Coastal Resource Management Program.
- United Nations. 2015. *Global Sustainable Development Reports. 2015 Edition*. <https://sustainabledevelopment.un.org/globalsdreport/2015>. diunduh tanggal 20 Agustus 2015.
- Winters, Paul dkk.,. 2009. "Asstes, Activities and Rural Income Generation: Evidence from a Multicountry Analysis". *World Development*. Vol. 37, No. 9, hal. 1435-1452.
- World Bank. 2006. *Making the New Indonesia Work for the Poor*. Jakarta: the World Bank Office.
- www.bps.go.id. Jumlah Penduduk Miskin, Presentase Penduduk Miskin, dan Garis Kemiskinan, 1970-2013. diunduh tanggal 17 November 2015.
- Zakaria, Buchari. Tanpa tahun. *WBL/85/WP - 17 Budidaya Laut dan Kemungkinan Pengembangannya di Propinsi Riau*. <http://www.fao.org/docrep/field/003/ab882e/AB882E17.htm>. diunduh tanggal 10 November 2015.

PANDUAN PENULISAN JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

Naskah yang akan diterbitkan dalam Jurnal Kependudukan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah adalah karya asli yang belum pernah dipublikasikan di media cetak lain maupun elektronik.
2. Naskah dapat berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, tinjauan buku, dan jenis tulisan ilmiah lainnya.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan menggunakan tata bahasa yang benar.
4. Naskah ditulis dengan menggunakan model huruf Times New Roman, font 12, margin atas 4 cm, margin bawah, 3 cm, margin kanan 3 cm, dan margin kiri 4 cm, pada kertas berukuran A4 minimal 5000 kata, diketik 1,5 spasi dengan program Microsoft Word. Setiap lembar tulisan diberi halaman.
5. Isi naskah terdiri dari;
 - a. Judul ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Judul harus mencerminkan isi tulisan, bersifat spesifik dan terdiri atas 10-15 kata.
 - b. Identitas Penulis yang diletakkan di bawah judul, meliputi nama dan alamat lembaga penulis serta alamat email
 - c. Abstrak dan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak ditulis dalam satu paragraf dengan jumlah kata antara 100-150. Isi abstrak menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan.
 - d. Pendahuluan yang berisi tentang justifikasi pentingnya penulisan artikel, maksud/tujuan menulis artikel, sumber data yang dipakai, dan pembabakan penulisan.
 - e. Tubuh/inti artikel berisi tentang isi tulisan, pada umumnya berisi tentang kupasan, analisis, argumentasi, komparasi, dan pendirian penulis. Bagian inti artikel dapat dibagi menjadi beberapa subbagian yang jumlahnya bergantung kepada isu/aspek yang dibahas.
 - f. Kesimpulan berisi temuan penting dari apa yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.
 - g. Tampilan tabel, gambar atau grafik harus bisa dibaca dengan jelas dan judul tabel diletakkan diatas tabel, sedangkan judul gambar atau grafik diletakkan dibawah gambar atau grafik serta dilengkapi dengan penomoran tabel/gambar/grafik.
 - h. Acuan Pustaka diupayakan menggunakan acuan terkini (lima tahun terakhir)
 - i. Penulisan daftar Pustaka mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - Kutipan dalam teks: nama belakang pengarang, tahun karangan dan nomor halaman yang dikutip
Contoh: (Jones, 2004:15), atau Seperti yang dikemukakan oleh Jones (2004:15).
 - Kutipan dari buku: nama belakang, nama depan penulis, tahun penerbitan. *Judul buku*. kota penerbitan: penerbit.
Contoh: Horowitz, Donald. 1985. *Ethnic Groups in Conflict*, Berkeley: University of California.
 - Kutipan dari artikel dalam buku bunga rampai: nama belakang, nama depan pengarang, tahun. "judul artikel" dalam nama editor (Ed.), Judul Buku. nama kota: nama penerbit. Halaman artikel.
Contoh: Hugo, Graeme. 2004. "International Migration in Southeast Asia since World War II", dalam A. Ananta dan E.N.Arifin (Eds.), *International Migration in Southeast Asia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. hal: 28—70.
 - Kutipan dari artikel dalam jurnal: nama belakang, nama depan penulis, tahun penerbitan. "Judul artikel", Nama Jurnal, Vol (nomor Jurnal): halaman.
Contoh: Hull, Terence H. 2003. "Demographic Perspectives on the Future of Indonesian Family", *Journal of Population Research*, 20 (1):51—65.
 - Kutipan dari *website*: dituliskan lengkap alamat *website*, tahun dan alamat URL dan html sesuai alamatnya. Tanggal *download*.
Contoh: World Bank. 1998. <http://www.worldbank.org/data/countrydata/countrydata.html>. Washington DC. Tanggal 25 Maret.
 - Catatan kaki (*footnote*) hanya berisi penjelasan tentang teks, dan diketik di bagian bawah dari lembaran teks yang dijelaskan dan diberi nomor.
6. Naskah dikirim melalui email: jki.ppklipi@yahoo.com dan jurnalkependudukanindonesia@mail.lipi.go.id
7. Kepastian pemuatan/penolakan naskah akan diinformasikan melalui e-mail.
8. Redaksi memiliki kewenangan untuk merubah format penulisan dan judul tulisan sesuai dengan petunjuk penulisan, serta mengatur waktu penerbitan.

KEPENDUDUKAN INDONESIA

Community Based Analysis on Mangrove Forest Changes in Rembang District, Central Java Province

Mochamad Budi Purnomo, Dyah R. Hizbaron, Michiel Damen

Environmental, Demographic, and Socio-Economic Correlates of Access to Improved Sanitation: Empirical Evidence from Papua and West Papua Provinces

Sri Irianti, Puguh Prasetyoputra

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Makanan, Pendidikan, dan Kesehatan Rumah Tangga Indonesia (Analisis Data Susenas 2011)

Ratna Dewi Wuryandari

Pengembangan Wisata Agro: Peluang Kerja Masyarakat di Kawasan Poncokusumo Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur

Triyono, Eniarti B. Djohan

Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Kebutuhan Tenaga Kerja di Era Global

Titik Handayani

Implementasi Kebijakan Kesehatan Reproduksi di Indonesia: Sebelum dan Sesudah Reformasi

Zainal Fatoni, Yuly Astuti, Sari Seftiani, Augustina Situmorang, Widayatun, Sri Sunarti Purwaningsih

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Jurnal Kependudukan Indonesia	Vol. 10	No. 1	1-74	Jakarta, Juni 2015	ISSN 1907-2902
----------------------------------	---------	-------	------	-----------------------	-------------------

ISSN 1907-2902



9 771907 290214